



**KEMENTERIAN
PERTANIAN**



LAPORAN KINERJA 2021

**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 dapat tersusun dengan baik. Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2021. Laporan Kinerja mencakup ikhtisar pencapaian Sasaran Program sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk terwujudnya *good governance*.

Jakarta, 15 Februari 2022

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Maret 2022

Inspektur IV



Drh. IGMN Kuswandana, MM
NIP. 19660408 199403 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	3
1.4 Sumber Daya Manusia.....	6
1.5 Dukungan Anggaran	7
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	9
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.3 Perjanjian Kinerja	19
III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran	23
3.2 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2021	23
3.3 Kinerja Lainnya.....	100
3.4 Akuntabilitas Keuangan	101
IV. PENUTUP	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran Ditjen PKH TA. 2021 Per Kewenangan Per Jenis Belanja	8
Tabel 2.	Anggaran Ditjen PKH TA. 2021 Per Kegiatan	8
Tabel 3.	Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Ditjen PKH.....	14
Tabel 4.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024	19
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2021	20
Tabel 6.	Klasifikasi Rincian Ouput /Rincian Output (RO/KRO) Ditjen PKH TA. 2021	21
Tabel 7.	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021.....	25
Tabel 8.	Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Daging.....	27
Tabel 9.	Pertumbuhan produksi daging pada tahun 2017-2021	27
Tabel 10.	Kegiatan Pendukung IKU 1 Tahun 2021	30
Tabel 11.	Realisasi KUR Sektor Pertanian Tahun 2021.....	32
Tabel 12.	Realisasi KUR Sub Sektor Peternakan Berdasarkan Komoditas Tahun 2021**	33
Tabel 13.	Realisasi Investasi Bidang Usaha Peternakan Tahun 2017- 2021	34
Tabel 14.	Realisasi Investasi PMA dan PMDN Bidang PKH Tahun 2017-2021 ...	35
Tabel 15.	Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Peternak Tahun 2021	36
Tabel 16.	Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2021	36
Tabel 17.	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas Tahun 2021	38
Tabel 18.	Distribusi Tanaman Pakan ternak (TPT) oleh UPT Pusat Tahun 2021 .	38
Tabel 19.	Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Susu	40
Tabel 20.	Kegiatan Pendukung IKU 2 Tahun 2021	42
Tabel 21.	Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Telur	45
Tabel 22.	Perkembangan Produksi Telur	46
Tabel 23.	Kegiatan Pendukung IKU 3 Tahun 2021	47
Tabel 24.	Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan.....	49
Tabel 25.	Kegiatan Pendukung IKU 4 Tahun 2021	51
Tabel 26.	Status Wilayah Terhadap Kasus Penyakit Rabien dan Anthrax Tahun 2021 Dibandingkan Kasus Tahun 2020.....	53
Tabel 27.	Capaian Indikator Persentase Wilayah yang Terkendali dari <i>Zoonosis</i> .	54
Tabel 28.	Kegiatan Pendukung IKU 5 Tahun 2021	56
Tabel 29.	Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Th 2021 ...	59
Tabel 30.	Hasil perhitungan Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis	59
Tabel 31.	Kegiatan Pendukung IKU 6 Tahun 2021	62



Tabel 32.	Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	64
Tabel 33.	Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	64
Tabel 34.	Penghitungan Kemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium	66
Tabel 35.	Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak.....	67
Tabel 36.	Kegiatan Pendukung IKU 7 Tahun 2021	69
Tabel 37.	Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.....	70
Tabel 38.	Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	71
Tabel 39.	Kegiatan Pendukung IKU 8 Tahun 2021	73
Tabel 40.	Realisasi Capaian IKU Peningkatan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan.....	74
Tabel 41.	Capaian Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021	75
Tabel 42.	Nilai Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2016-2021	76
Tabel 43.	Capaian Nilai Ekspor Pertanian Tahun 2021	76
Tabel 44.	Perbandingan Rincian Ekspor Hewan Hidup.....	82
Tabel 45.	Kegiatan Pendukung IKU 9 Tahun 2021	83
Tabel 46.	Realisasi Capaian IKU Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	88
Tabel 47.	Kegiatan Pendukung IKU 10 Tahun 2021	92
Tabel 48.	Realisasi Capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH.....	95
Tabel 49.	Kegiatan Pendukung IKU 11 Tahun 2021	99
Tabel 50.	Realisasi Anggaran Per Kegiatan.....	105



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Komposisi SDM Ditjen PKH	7
Grafik 2.	Realisasi KUR Bidang Usaha Peternakan.....	32
Grafik 3.	Perkembangan Produksi Susu untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional Tahun 2017-2021	41
Grafik 4.	Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2016-2021.....	51
Grafik 5.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan Tahun 2021.....	75
Grafik 6.	Realisasi Anggaran per Jenis Belanja dan Kewenangan.....	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pemotongan Sapi di RPHR Kota Makassar.....	66
Gambar 2.	Capaian Kinerja Anggaran Ditjen PKH Tahun 2021.....	96
Gambar 3.	Penghargaan Predikat Zona Integritas menuju WBK Nasional Tahun 2021.....	100
Gambar 4.	Penghargaan SNI Award dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.....	100
Gambar 5.	Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2021.....	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	110
Lampiran 2.	Data Pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	114
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	115
Lampiran 4.	Tabel Produksi Daging, Telur, dan Susu Tahun 2017-2021	1178
Lampiran 5.	Tabel Populasi Ternak Tahun 2017-2021.....	119
Lampiran 6.	Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2021	120
Lampiran 7.	Status Wilayah Terhadap Kasus Penyakit <i>Rabies</i> dan <i>Anthrax</i> Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Kasus Tahun 2020	121
Lampiran 8.	Status Kesehatan Hewan Per Provinsi Tahun 2021	126
Lampiran 9.	Data Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	123
Lampiran 10.	Data Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.....	124
Lampiran 11.	Data Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021	125
Lampiran 12.	Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021.....	1276
Lampiran 13.	NKA Satker Lingkup Ditjen PKH Tahun 2021 pada Aplikasi SMART Kemenkeu.....	127



RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020-2024 telah memasuki tahun kedua. Pada tahun ini, Ditjen PKH masih menghadapi tantangan untuk mencapai peningkatan ketersediaan pangan asal ternak, pertumbuhan ekspor, terjaminnya mutu pangan asal ternak, tingkat kemanfaatan sarana produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan, peningkatan luas wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), terkendalinya kasus *zoonosis* pada manusia, terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, serta terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas. Upaya yang dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun pendekatan intervensi melalui belanja pemerintah dari dana APBN.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Ditjen PKH mempunyai tugas “Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak Serta Kesehatan Hewan” yang diwujudkan dalam 3 (tiga) Program yaitu (i) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (ii) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta (iii) Program Dukungan Manajemen. Indikator Kinerja program dijabarkan menjadi 11 (sebelas) indikator yaitu: (1) Peningkatan produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan produksi susu; (3) Peningkatan produksi telur; (4) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; (5) Persentase wilayah yang terkendali dari *zoonosis*; (6) Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (7) Tingkat kemanfaatan sarana produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; (9) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (10) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen PKH; serta (11) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Ditjen PKH dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent, transparent*, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Capaian Sasaran Program Ditjen PKH pada tahun 2021 masuk dalam kategori **sangat berhasil** yang diperoleh dari Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 berkisar antara 40,93% sampai dengan 657,65%. Capaian Indikator Kinerja Program dengan kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik); (2) Peningkatan produksi susu; (3) Persentase wilayah yang terkendali *zoonosis*; (4) Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan



Menular Strategis; (5) Tingkat kemanfaatan sarana produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; serta (6) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH. Indikator Kinerja Program dengan kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; (2) Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; serta (3) Nilai PMPRB Ditjen PKH. Selain itu, terdapat Indikator Kinerja Program dengan kategori **kurang berhasil** yaitu: 1) Peningkatan produksi telur; dan 2) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ditjen PKH tahun 2021 senilai Rp.1,621 Triliun dengan realisasi Rp.1,550 Triliun atau sebesar 95,62%. Anggaran yang tidak terealisasi sebesar 4,38% disebabkan oleh: 1) Pengadaan ternak Kegiatan Desa Korporasi Sapi terkendala pelaksanaan lelang oleh penyedia barang yang kesulitan mendapat ternak sesuai spesifikasi teknis, dan 2) Terdapat pengadaan yang tidak terealisasi, serta sisa anggaran dari kegiatan pengadaan Barang/Jasa.

Menjawab tantangan terkait ketersediaan daging sapi/kerbau, Ditjen PKH terus melakukan program terobosan sebagai upaya mendorong peningkatan produksi komoditas peternakan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022, antara lain:

1. Menyusun program terobosan “Desa Korporasi Sapi” pada lokasi sentra sebagai solusi untuk percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau di dalam negeri sekaligus memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.
2. Mendorong pembiayaan yang bersumber dari non-APBN antara lain: kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara.
3. Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
4. Penambahan impor bibit sapi indukan untuk meningkatkan jumlah induk sapi/kerbau dalam negeri dengan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tahun-tahun sebelumnya.
5. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
6. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Ditjen PKH memiliki Tugas “Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak Serta Kesehatan Hewan”. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, kinerja Ditjen PKH dapat diukur dari aspek Makro Ekonomi yaitu kinerja Produk Domestik Bruto (PDB), investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), serta proksi kesejahteraan peternak melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Subsektor Peternakan. Sebagai wujud kinerja dari aspek teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah dikaitkan dengan produksi dan populasi ternak.

Kinerja Makro Ekonomi menunjukkan bahwa untuk PDB Subsektor Peternakan selama lima tahun (2017-2021) menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDB Sektor Pertanian. PDB Subsektor Peternakan tahun 2017 mencapai sebesar Rp.148.688,8 miliar menjadi sebesar Rp.167.629,1 miliar pada tahun 2021 atau meningkat 3,10% per tahun, sedangkan PDB Sektor Pertanian tahun 2017 sebesar Rp.970.262,9 miliar menjadi Rp.1.072.507,0 miliar pada tahun 2021 atau meningkat 2,54% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Subsektor Peternakan berpeluang sebagai sumber pertumbuhan baru Sektor Pertanian. Investasi dari PMDN pada Subsektor Peternakan tumbuh positif pada periode tahun 2017-2021 yaitu dari Rp.842.711,4 juta menjadi Rp.2.138.747,2 juta secara kumulatif meningkat sebesar Rp.1.296.035,8 juta. NTP Subsektor Peternakan tahun 2021 sebesar 99,19, atau naik 0,37% dari NTP 2019 sebesar 98,82. sementara NTUP Subsektor Peternakan tahun 2021 sebesar 98,72 atau naik 0,64% dari NTUP tahun 2019 sebesar 98,09.

Kinerja populasi ternak pada periode lima tahun 2017-2021 terdapat rata-rata pertumbuhan positif yaitu sapi potong sebesar 2,39%, sapi perah sebesar 1,79%, ayam ras pedaging 1,73%, ayam buras 1,43%, kambing 1,38%, domba 1,11%, puyuh 1,16%, dan itik 0,71%. Sementara populasi ternak yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif adalah ayam ras petelur 0,11%, kerbau 0,18%, kuda 0,37%, babi 0,56%, itik manila 0,22%, dan kelinci 0,71%.

Kinerja produksi daging periode lima tahun 2017-2021 terdapat rata-rata pertumbuhan positif yaitu, daging puyuh sebesar 10,84%, ayam ras petelur sebesar 6,72%, domba 3,72%, babi 2,90%, kelinci 2,37%, ayam ras pedaging 2,10%, dan itik 1,88%. Sedangkan yang memiliki rata-rata pertumbuhan negatif adalah itik manila sebesar 1,52%, ayam buras 2,36%, sapi 2,46%, kambing 2,93%, kerbau 7,00%, dan kuda 11,33%. Kinerja produksi telur tahun 2017-2021 memiliki rata-rata pertumbuhan positif yaitu telur ayam buras 16,02%, telur ayam ras petelur 2,76%, itik 2,24%, dan puyuh 2,73%. Sedangkan



yang memiliki rata-rata pertumbuhan negatif adalah itik manila sebesar 0,84%. Kinerja produksi susu tahun 2017-2021 memiliki rata-rata pertumbuhan positif sebesar 0,93%.

Produksi ternak pada tahun 2021, tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu produksi daging secara total sebesar 4.379,03 ribu ton atau mencapai 96,53% dari target sebesar 4.536,66 ribu ton, produksi telur sebesar 5.926,03 ribu ton atau mencapai 106,06% dari target 5.587,64 ribu ton. Namun beberapa komoditas belum mencapai target produksi terutama pada daging sapi/kerbau sebesar 343,75 ribu ton atau mencapai 80,70% dari target 425,98 ribu ton, dan susu sebesar 962,68 ribu ton atau mencapai 98,89% dari target 973,47 ribu ton. Dari aspek konsumsi, berdasarkan Susenas BPS, konsumsi daging apabila disetarakan dengan protein selama 2017-2021 menunjukkan angka yang berfluktuasi, namun terjadi peningkatan pada kurun waktu 2017 ke tahun 2021, yaitu pada tahun 2017 sebesar 4,20 gram/kapita/hari menjadi 4,38 gram/kapita/hari pada tahun 2021. Begitupun protein dari telur dan susu mengalami peningkatan dari 3,35 gram/kapita/hari menjadi 3,49 gram/kapita/hari.

Ditjen PKH masih menghadapi tantangan terkait: (1) Produksi daging sapi di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, sehingga masih diperlukan impor dalam bentuk daging sapi beku dan sapi bakalan; (2) Permasalahan stabilitas harga daging ayam ras *livebird* karena adanya *oversupply*; (3) Kelembagaan yang terkait dengan efektivitas kemitraan, peran koperasi, dukungan perbankan dan asuransi; (4) Kemampuan Sumber Daya Manusia; (5) Infrastruktur berupa kualitas Rumah Potong Hewan (RPH) dan sarana transportasi; (6) Persaingan dan liberalisasi pasar; (7) Ketergantungan sarana produksi dari impor; (8) Penyakit eksotik; serta (9) Persaingan dalam penggunaan lahan dan alih fungsi lahan.

Menjawab tantangan tersebut, Ditjen PKH melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu: (i) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (ii) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan (iii) Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan dengan *prudent, transparent, akuntabel, efektif dan efisien* sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Ditjen PKH dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selama tahun 2021 serta merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014



tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Kementerian Pertanian.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Ditjen PKH mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PKH menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- 3) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- 4) Pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Ditjen PKH didukung 6 (enam) unit kerja Eselon II, dengan rincian dan tugas sebagai berikut:



1. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak, dengan fungsi:
 - (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (c) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (d) Pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan
 - (f) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
2. Direktorat Pakan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan, dengan fungsi:
 - (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (c) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (d) Pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan
 - (f) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Pakan.
3. Direktorat Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi, dengan fungsi:
 - (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;



- (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (c) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (d) Pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan
 - (f) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Kesehatan Hewan.
4. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan fungsi:
- (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang *higiene, sanitasi* dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari dan perumusan standar, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - (b) Pelaksanaan kebijakan dibidang *higiene, sanitasi* dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari dan perumusan standar, *zoonosis*, serta Kesejahteraan Hewan;
 - (c) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang *higiene, sanitasi* dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, *sanitari, zoonosis*, serta Kesejahteraan Hewan
 - (d) Pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di bidang *higiene, sanitasi* dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari dan perumusan standar, *zoonosis*, serta Kesejahteraan Hewan;
 - (e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang *higiene, sanitasi* dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari dan perumusan standar, *zoonosis*, serta Kesejahteraan Hewan; dan
 - (f) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dengan fungsi:
- (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;



- (c) Penyiapan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (d) Pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan
 - (f) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
6. Sekretariat Direktorat Jenderal, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PKH, dengan menyelenggarakan fungsi:
- (a) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama serta pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan informasi publik di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - (b) Pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara;
 - (c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
 - (d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian Layanan Rekomendasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - (e) Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan rumah tangga Ditjen PKH; dan
 - (f) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Dirjen PKH.

Struktur Organisasi Ditjen PKH Tahun 2021 disajikan pada Lampiran 1.

1.4 Sumber Daya Manusia

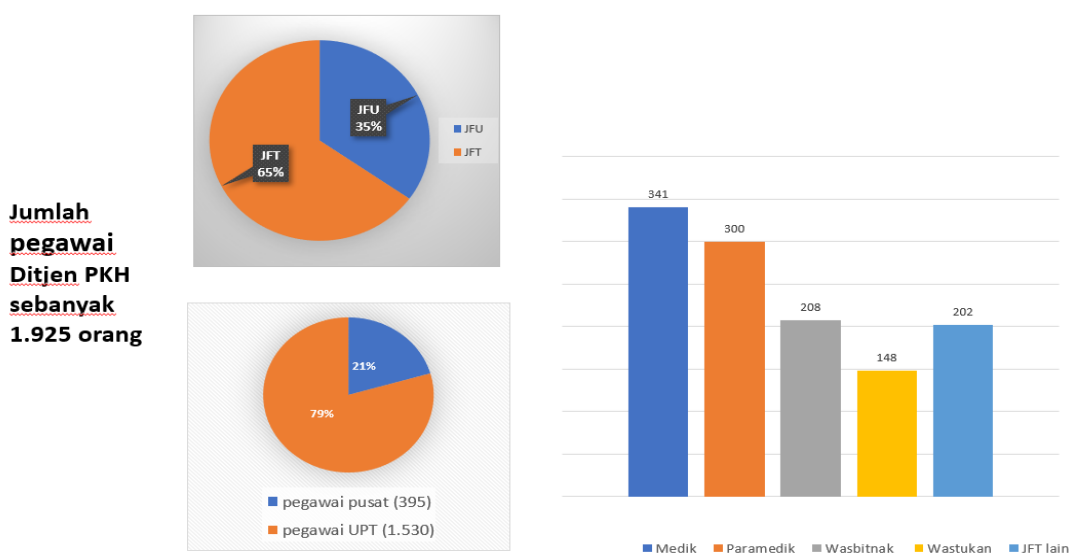
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Tahun 2021 Ditjen PKH memiliki SDM sebanyak 1.925 orang, terdiri dari:

1. Jumlah pegawai menurut pusat dan Unit Pelayanan Teknis (UPT):
 - a. Jumlah pegawai Kantor Pusat sebanyak 348 orang yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 118 orang; Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak sebanyak 59 orang; Direktorat Pakan sebanyak 44 orang; Direktorat Kesehatan Hewan sebanyak 81 orang; Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 46 orang, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebanyak 47 orang
 - b. Jumlah pegawai UPT sebanyak 1.577 orang.
2. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 300 orang; golongan III sebanyak 1.175 orang; golongan II sebanyak 428 orang; dan golongan I sebanyak 22 orang.



3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 24 orang; S-2 sebanyak 540 orang; S-1/D4 sebanyak 490 orang; Sarjana Muda/D3/D2 sebanyak 268 orang; SLTA sebanyak 532 orang; SLTP sebanyak 35 orang; dan SD sebanyak 36 orang.
4. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 1.127 orang dan perempuan sebanyak 798 orang.
5. Jumlah pegawai menurut kelas jabatan: Medik Veteriner sebanyak 341 orang; Paramedik Veteriner sebanyak 300 orang; Pengawas Mutu Pakan sebanyak 148 orang; Pengawas Bibit Ternak sebanyak 208 orang; JFT lainnya sebanyak 202 orang; JFU sebanyak 671 orang; dan Struktural sebanyak 55 orang.

Selengkapnya data pegawai Ditjen PKH disajikan pada Lampiran 2.



Sumber: Ditjen PKH, 2021

Grafik 1. Komposisi SDM Ditjen PKH Tahun 2021

1.5 Dukungan Anggaran

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2021, Ditjen PKH memperoleh alokasi APBN sebesar Rp.1,621 Triliun, dengan bobot anggaran terbesar berdasarkan kewenangan terdapat pada Satker Kantor Daerah (KD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rp.1,079 Triliyun (66,60%). Sedangkan berdasarkan jenis belanja bobot terbesar pada Belanja Barang Rp.1,348 Triliun (83,15%), dan berdasarkan jenis kegiatan bobot terbesar pada Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Rp.968,84 Miliar (59,76%).

Tabel 1. Anggaran Ditjen PKH TA. 2021 Per Kewenangan Per Jenis Belanja

No	Kewenangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	Kantor Pusat	23.230.080.000	54.643.316.000	1.914.765.000	207.631.020.000
2	Kantor Daerah	110.988.844.000	76.304.455.000	281.814.000	1.079.771.901.000
3	Tugas Pembantuan	-	8.268.561.000	-	333.960.791.000
	Total	134.218.924.000	1.348.175.444.000	138.969.344.000	1.621.363.712.000
	Proporsi	8,28%	83,15%	8,57%	100%

Sumber: DIPA Ditjen PKH, 2021

Tabel 2. Anggaran Ditjen PKH TA. 2021 Per Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Proporsi
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	120.348.719.000	7,42%
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	179.856.226.000	11,09%
3	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	968.849.258.000	59,76%
4	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	54.145.505.000	3,34%
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	275.631.835.000	17,00%
6	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	22.532.169.000	1,39%
	Total	1.621.363.712.000	100%

Sumber: DIPA Ditjen PKH, 2021



II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam melaksanakan visi dan misi tahun 2021, Ditjen PKH mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yang telah mengalami revisi kedua pada 29 Oktober 2021 dengan menyesuaikan perubahan Renstra Kementerian Pertanian.

Visi

Mengacu visi Kementerian Pertanian yaitu “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Ditjen PKH merumuskan visi:

“Terwujudnya Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern”

Misi

Untuk mewujudkan visinya, Ditjen PKH merumuskan misi organisasi yang tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Ketersediaan Benih/Bibit dan Produksi Ternak yang Berkualitas dan Berkelanjutan**

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam Pengembangan Peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak merupakan kekuatan yang harus dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. **Meningkatkan Ketersediaan Pakan yang Berkualitas secara Berkelanjutan**

Pakan merupakan komponen terbesar dalam peternakan, baik usaha pembibitan, pengembangbiakan, maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan, dapat menggunakan bahan pakan lokal maupun *biomassa* ikutan dari hasil tanaman yang ada di sekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian, dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.



3. Mewujudkan Kesehatan Hewan dalam rangka Meningkatkan Produktivitas Ternak dan Mendukung Kesehatan Masyarakat

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk, selain itu juga mempengaruhi kesehatan masyarakat disekitarnya. Pengembangan kesehatan hewan sebagai bagian dari pembangunan pertanian melalui pencegahan penyakit *zoonosis* serta bagian dari kesehatan lingkungan melalui kelestarian hewan dan lingkungannya.

Produktivitas ternak secara optimal hanya dapat terpenuhi jika status dan kondisi kesehatan hewan dalam keadaan yang baik. Salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan peternakan adalah melalui evaluasi peningkatan produktivitas ternak serta kinerjanya.

Di sisi lain, resistensi antimikroba saat ini berkembang menjadi isu global yang dibahas dalam berbagai forum internasional, dan dipandang sebagai salah satu ancaman yang serius untuk ditangani bersama. Untuk mengoptimalkan dan mengurangi resistensi antimikroba di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka penatagunaan antimikroba harus diterapkan untuk meningkatkan penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, penatagunaan antimikroba di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan program terkoordinasi yang mempromosikan penggunaan antimikroba yang tepat dan sesuai aturan, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesembuhan pasien, mengurangi resistensi mikroba dan mencegah penyebaran infeksi yang disebabkan oleh organisme yang resistan terhadap berbagai jenis antimikroba (termasuk antibiotik dan *antiprotozoa*).

4. Meningkatkan Keamanan dan Mutu Produk Hewan serta Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan *higiene* dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan, serta pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan Usaha Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan Berdaya Saing

Potensi komoditas dan produk unggulan Subsektor Peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Daya saing subsektor peternakan merupakan kemampuan menghasilkan komoditas yang



memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional. Beberapa langkah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, antara lain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit pembiayaan usaha, asuransi ternak, pengembangan investasi, diseminasi teknologi tepat guna dan penyuluhan, penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, pengembangan standar mutu dan penerapan tata cara pengolahan hasil peternakan yang baik, sertifikasi dan ijin edar produk, perbaikan sistem logistik, pengembangan informasi, serta pengembangan pasar domestik dan internasional).

6. Menerapkan Reformasi Birokrasi Ditjen PKH Menuju Birokrasi Profesional dan Modern

Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan Reformasi Birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan, maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik dalam mewujudkan *good governance*.

Misi Ditjen PKH tersebut sudah relevan dengan misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian serta Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan

Tujuan Program/Kegiatan Pembangunan Ditjen PKH periode 2020-2024 mencakup:

1. Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Peningkatan Produksi Ternak yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Bibit dan benih ternak merupakan komponen yang akan mempengaruhi dalam produksi, sehingga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan bibit/benih ternak berbasis sumber daya lokal harus diwujudkan dengan baik. Upaya penyediaan benih/bibit ternak terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan melakukan pengembangan secara teknis maupun manajerial. Penerapan *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP) pada peternak/kelompok peternak diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, serta mendukung peningkatan daya saing ekspor.

2. Tersedianya Pakan Berkualitas dan Berkelanjutan

Pakan merupakan faktor penting dalam menghasilkan produk peternakan disamping bibit ternak. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci sistem produksi yang efisien dan berdaya saing. Optimalisasi penyediaan pakan berbasis bahan lokal termasuk biomassa ikutan hasil tanaman dengan menggunakan teknologi yang adaptif dan modern sangat diperlukan dalam menunjang peningkatan produksi.



3. Meningkatnya Kesehatan Hewan

Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah, maupun antar negara harus selalu ditingkatkan. Keberhasilan penanggulangan dan pengendalian diindikasikan dengan status kesehatan hewan di suatu wilayah (bebas, sporadik, endemik, dan wabah). Kegiatan seperti pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, bimbingan teknis, dan pengawasan obat hewan adalah kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (*prevention better than cure*).

4. Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Veteriner Nasional

Penyelenggaraan Kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal, pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*, serta penerapan kesejahteraan hewan. Pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesejahteraan hewan pada produk hewan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hewan baik skala nasional maupun internasional.

5. Tersedianya Produk Peternakan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

Produk peternakan bernilai tambah diperoleh dari upaya pengolahan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi produk sesuai kebutuhan pasar; termasuk didalamnya praktek peternakan organik. Produk peternakan berdaya saing diperoleh dengan efisiensi produksi baik budidaya maupun pasca panen dan pengolahan, penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi, serta kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk peternakan. Untuk itu, perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar, aspek distribusi dan pemasaran memegang peran yang penting dalam peningkatan daya saing produk.

Selain untuk memenuhi pasar domestik dengan penyediaan produk peternakan yang berkualitas dan terjangkau dari aspek harga maupun ketersediaan di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ekspor juga merupakan prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan produk berdaya saing sesuai kebutuhan pasar internasional, dan didukung dengan pengembangan pemasaran dan kerjasama internasional.

Beberapa upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan ijin edar, pelayanan informasi



pasar, serta peningkatan efisiensi produksi dengan fasilitasi pembiayaan untuk peningkatan skala usaha dan pengembangan kemitraan usaha.

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Ditjen PKH

Upaya mewujudkan birokrasi yang berorientasi profesional pada pelayanan prima, terdapat perbaikan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang menyangkut aspek manajemen perubahan, Peraturan Perundang Undangan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, akan terus ditingkatkan. Sebagai organisasi publik, perbaikan dalam hal pelayanan yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan terus ditingkatkan.

Tujuan dan indikatornya merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024. Penjabaran tujuan dan indikator tujuan dapat dilihat pada Tabel 3.



Tabel 3. Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Ditjen PKH

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya Produk Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit dan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Tersedianya benih/bibit ternak berkualitas dan berkesinambungan	1. a. Jumlah benih/bibit ternak tersertifikasi yang tersedia (sertifikat) b. Jumlah produksi ternak (ekor)
	2. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan pakan secara berkelanjutan	2. Tersedianya pakan berkualitas, aman, dan berkelanjutan	2. Indeks ketersediaan pakan berkualitas dan aman (indeks)
	3. Menyelenggarakan kesehatan hewan dalam meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat	3. Meningkatnya kesehatan hewan	3. Status Kesehatan Hewan (%)
	4. Menyelenggarakan kesehatan masyarakat veteriner dalam meningkatkan daya saing produk hewan dan kesehatan masyarakat	4. Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Veteriner Nasional	4. Jumlah unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Unit Usaha)
			5. Jumlah produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Sertifikat Veteriner)
			6. Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan dari hewan ke manusia (kasus)
	5. Meningkatkan pengolahan, dan pemasaran produk peternakan berdaya saing	5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing	7. Jumlah produk peternakan yang berhasil dihilirisasi (ton)
			8. Ekspor produk peternakan (US\$) Kuantitatif
	6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional	6. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai roadmap RB Kementan	9. Nilai RB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (indeks)

Sumber: Renstra Revisi 2 Ditjen PKH Tahun 2020-2024



Sasaran

Berdasarkan tugas dan kewenangan, Ditjen PKH memiliki 4 (empat) Sasaran Strategi yang dicapai melalui 3 (tiga) Program dari 5 (lima) Program Kementan, yaitu:

- i) SS 1: Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- ii) SS 2: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
- iii) SS 4: Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian
- SS 6: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel.

Program

Adapun rincian Program dan Sasaran Program disampaikan sebagai berikut:

A. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Sasaran Program:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak

Kinerja ketersediaan pangan strategis asal ternak dapat diukur dari capaian produksi daging yang terdiri dari komoditas: sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik. Selain pangan strategis, kinerja ketersediaan pangan asal ternak diukur juga dari capaian produksi telur dan susu.

2. Meningkatnya Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan

Kinerja keamanan pangan diukur berdasarkan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Meningkatnya persentase keamanan dan mutu pangan merupakan sebuah indikasi bahwa pangan asal hewan yang diproduksi untuk masyarakat dapat dijamin aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan.

3. Termanfaatkannya Sarana Pertanian sesuai dengan Kebutuhan

Indikator kinerja sasaran program ini diukur dari tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya kemanfaatan sarana prasarana produksi peternakan dan kesehatan hewan diharapkan akan mendukung pencapaian kinerja produksi dan layanan lainnya.

4. Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis

Indikator kinerja sasaran program ini adalah persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis. Dengan indikator kinerja ini maka meningkat luas wilayah yang terbebas dari PHMS untuk mencapai sasaran strategisnya yaitu meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

5. Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis

Indikator kinerja sasaran program ini adalah persentase wilayah yang terkendali *zoonosis*. Dengan indikator ini maka sasaran program yaitu meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari *zoonosis* dapat mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.



B. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan Sasaran Program:

1. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan.

Meningkatnya ekspor, merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri yang merupakan hasil seluruh kinerja fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah sektor pertanian terbesar ada pada agroindustri. Menciptakan nilai tambah dapat dilakukan melalui penguasaan teknologi. Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

C. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program:

1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen PKH yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator kinerja sasaran program diukur dari seberapa jauh nilai PMPRB Ditjen PKH. Pencapaian nilai RB dengan sasaran program mewujudkan birokrasi Ditjen PKH akan mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya birokrasi Kementan.

2. Terkelolanya Anggaran Ditjen PKH yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran program terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas diukur dari indikator nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di setiap satker yang secara agregat akan menggambarkan kinerja Ditjen PKH secara nasional. Pencapaian sasaran program dengan indikator kinerja anggaran Ditjen PKH, merupakan bagian dari kualitas dan akuntabilitas anggaran Kementan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai penjabaran arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementan Tahun 2020-2024, Kebijakan Ditjen PKH diarahkan mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan: visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Peternakan yang Sesuai dengan *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP)

GBP dan GFP adalah pelaksanaan usaha peternakan dibidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. GBP dan GFP meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit dan ternak; pelestarian lingkungan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:



- a) Penyediaan benih/bibit dan peningkatan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b) Penyediaan pakan yang berkualitas, aman dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal.
- c) Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan perbaikan proses budidaya seperti pada peternakan organik, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran. Peningkatan daya saing atau keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dapat dicapai melalui daya saing mutu dan daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha, dan didukung dengan peningkatan akses pasar.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a) Peningkatan nilai tambah produk peternakan melalui pengolahan hasil peternakan dan pengembangan peternakan organik.
- b) Peningkatan daya saing produk peternakan melalui pengembangan investasi, kemitraan, kelembagaan peternak, fasilitasi prasarana dan sarana pemasaran hasil peternakan, promosi peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri serta pengembangan sistem pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

3. Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan *higiene dan sanitasi*; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana yang berdampak pada hewan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a) Meningkatkan kesehatan hewan
- b) Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PKH dilakukan berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan



mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen PKH dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Arah kebijakan Kementan yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen PKH untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sesuai dokumen Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Utama Ditjen PKH Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 4.



Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program		Indikator		Satuan	Target	
						2021	2024
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	0,85	1,28
			2	Peningkatan produksi susu	%	0,55	0,85
			3	Peningkatan produksi telur	%	2,15	2,16
	SP2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	85,2	86
	SP3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus <i>zoonosis</i>	5	Persentase wilayah yang terkendali <i>zoonosis</i>	%	74	76
	SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80,5	81
	SP5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan	%	91,25	94,5
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	SP6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	87	95
	SP7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan	%	15	30
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	SP8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,75	35,5
	SP9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,68	90,85

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 Revisi II

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Pada tahun 2021, Dirjen PKH telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja sebanyak 9 (sembilan) kali terkait dengan adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan indikator kinerja sasaran program dan alokasi anggaran) sehingga Perjanjian Kinerja Dirjen PKH pada revisi terakhir terdiri dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu: (1) Peningkatan produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan produksi susu; (3) Peningkatan produksi telur; (4) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; (5) Persentase wilayah yang terkendali dari *zoonosis*; (6) Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (7) Tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan; (8) Tingkat



kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; (9) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan; (10) Nilai PMPRB Ditjen PKH; serta (11) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH. Selengkapnya target indikator kinerja perjanjian kinerja Dirjen PKH Tahun 2021 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2021

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target 2021
SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	0,85
		2	Peningkatan produksi susu	%	0,55
		3	Peningkatan produksi telur	%	2,15
SP2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	85,2
SP3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus <i>zoonosis</i>	5	Persentase wilayah yang terkendali <i>zoonosis</i>	%	74
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6	Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,5
SP5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan	%	91,25
SP6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	87
SP7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	15
SP8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,75
SP9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,68

Perjanjian Kinerja Dirjen PKH dengan Menteri Pertanian Tahun 2021 disampaikan pada Lampiran 3. Untuk mencapai Sasaran Program tersebut, pada tahun 2021 Ditjen PKH melaksanakan beberapa kegiatan sesuai pada Tabel 6 sebagai berikut.



Tabel 6. KRO dan RO Ditjen PKH TA. 2021

NO	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN
1	1783.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan	2.369.523.000
2	1783.AEA.101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (PEN)	1.618.500.000
3	1783.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	861.657.000
4	1783.QEG.001 Hijauan Pakan Ternak	19.311.961.000
5	1783.QEG.002 Pakan Olahan dan bahan pakan	32.220.579.000
6	1783.QEG.101 Hijauan Pakan Ternak (PEN)	1.991.016.000
7	1783.QEG.102 Pakan Olahan Dan Bahan Pakan (PEN)	46.411.937.000
8	1783.QJA.001 Mutu dan Keamanan Pakan	9.831.169.000
9	1783.QJA.101 Mutu dan Keamanan Pakan (PEN)	5.732.377.000
10	1784.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	5.389.554.000
11	1784.AEA.101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan (PEN)	1.000.440.000
12	1784.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	15.496.915.000
13	1784.AFA.101 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan (PEN)	13.918.709.000
14	1784.QAH.001 Pelayanan Kesehatan Hewan	13.870.152.000
15	1784.QAH.002 Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik	20.927.512.000
16	1784.QAH.003 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	59.408.827.000
17	1784.QAH.101 Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN)	13.146.325.000
18	1784.QAH.102 Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik (PEN)	1.726.989.000
19	1784.QAH.103 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan (PEN)	23.899.569.000
20	1784.QJA.001 Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	8.965.999.000
21	1784.QJA.101 Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (PEN)	1.845.000.000
22	1785.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	2.797.987.000
23	1785.AEA.101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak (PEN)	15.176.583.000
24	1785.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	13.228.486.000
25	1785.AFA.101 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak (PEN)	34.360.461.000
26	1785.CAG.001 Sarana Balai Perbibitan Ternak	3.042.550.000
27	1785.CAG.002 SBSN Bull Center Indrapuri	18.680.481.000
28	1785.CBK.001 Prasarana Balai Perbibitan Ternak	3.649.223.000
29	1785.CBK.002 SBSN Bull Center Indrapuri	519.519.000
30	1785.PDA.001 Benih Ternak Unggul	54.081.093.000
31	1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul	37.490.285.000
32	1785.PDA.101 Benih Ternak Unggul (PEN)	1.085.308.000
33	1785.PDA.102 Bibit Ternak Unggul (PEN)	28.902.761.000
34	1785.QEH.001 Optimalisasi Reproduksi	115.611.321.000
35	1785.QEH.002 Ternak Ruminansia Perah	1.474.904.000
36	1785.QEH.003 Ternak Ruminansia Potong	31.602.632.000



NO	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN
37	1785.QEH.004 Ternak Unggas dan Aneka Ternak	4.004.796.000
38	1785.QEH.101 Optimalisasi Reproduksi (PEN)	154.069.037.000
39	1785.QEH.102 Ternak Ruminansia Perah (PEN)	12.697.465.000
40	1785.QEH.103 Ternak Ruminansia Potong (PEN)	365.289.464.000
41	1785.QEH.104 Ternak Unggas Dan Aneka Ternak (PEN)	66.444.297.000
42	1786.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.091.625.000
43	1786.AEA.101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (PEN)	4.083.860.000
44	1786.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	993.100.000
45	1786.PDF.001 Sertifikasi Unit Usaha	2.983.411.000
46	1786.PDF.101 Sertifikasi Unit Usaha (PEN)	7.454.501.000
47	1786.QDC.001 Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	783.073.000
48	1786.QJA.001 Mutu dan Keamanan Produk Hewan	9.413.007.000
49	1786.QJA.101 Mutu dan Keamanan Produk Hewan (PEN)	11.945.436.000
50	1786.RAG.001 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	6.152.200.000
51	1786.RBK.001 Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	6.209.552.000
52	1787.EAA.001 Layanan Perkantoran	222.340.693.000
53	1787.EAB.001 Layanan Perencanaan	14.383.815.000
54	1787.EAB.002 Layanan Perbendaharaan Internal	8.199.758.000
55	1787.EAB.003 Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	4.176.301.000
56	1787.EAC.001 Layanan Kearsipkan dan Ketatausahaan	545.500.000
57	1787.EAC.002 Layanan Kerumahtanggaan	10.936.229.000
58	1787.EAD.001 Layanan Sarana Internal	1.472.209.000
59	1787.EAE.001 Layanan Prasarana Internal	150.000.000
60	1787.EAF.001 Layanan Manajemen SDM	2.614.069.000
61	1787.EAG.001 Layanan Hukum	2.916.755.000
62	1787.EAI.001 Layanan Humas dan Informasi	5.159.135.000
63	1787.EAI.002 Layanan Protokoler	322.944.000
64	1787.EAJ.001 Layanan Sistem Informasi	1.887.165.000
65	1787.EAJ.002 Layanan Data dan Informasi	3.318.935.000
66	1787.EAL.001 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.144.907.000
67	5891.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	4.482.977.000
68	5891.AEA.101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PEN)	7.178.978.000
69	5891.AFA.001 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1.094.025.000
70	5891.QDB.001 Lembaga yang Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor	3.845.301.000
71	5891.RAG.001 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1.590.068.000
72	5891.RAG.101 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PEN)	2.577.560.000
73	5891.RBK.001 Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1.763.260.000
	Jumlah	1.621.363.712.000

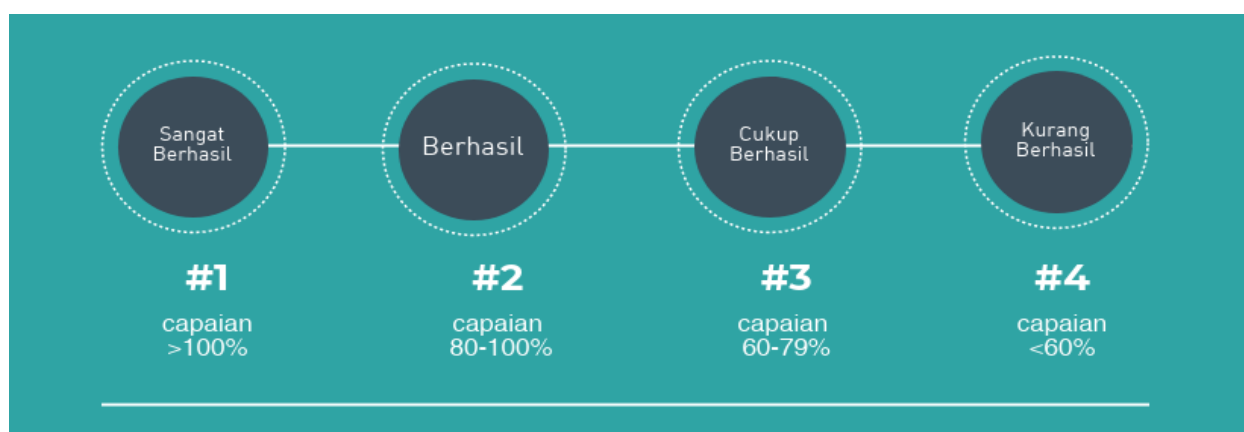
Sumber: SATUDJA, 2021



III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program

Untuk mengukur Capaian Kinerja Ditjen PKH menggunakan metode *scoring*, yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap Sasaran Program yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Ditjen PKH tahun 2021 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Program tahun 2021 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*:



Evaluasi kinerja Ditjen PKH tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2021 dengan kinerja tahun sebelumnya, terhadap target akhir Jangka Menengah, serta terhadap target Kementerian Pertanian dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi target, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta upaya perbaikan di tahun 2022. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

3.2 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2021

Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (Revisi II) memiliki 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang diukur melalui *maximize target* yaitu: 1) Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik); 2) Peningkatan produksi susu; 3) Peningkatan produksi telur; 4) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; 5) Persentase wilayah yang terkendali dari *zoonosis*; 6) Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; 7) Tingkat kemanfaatan sarana



produksi peternakan dan kesehatan hewan; (8) Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; (9) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan; (10) Nilai PMPRB Ditjen PKH; serta (11) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PKH.

Maximize target adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 22/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka dilakukan perhitungan Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

<p>$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$</p> <p>Dimana :</p> <p>NE = Nilai Efisiensi</p> <p>E = Efisiensi</p>	<p>* Catatan :</p> <p>Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.</p>
---	--

Pencapaian kinerja Ditjen PKH tahun 2021 selengkapnya disajikan pada Tabel 7.



Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Ukuran Keberhasilan
SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	0,85	5,59	657,65	Sangat berhasil
		2	Peningkatan produksi susu	%	0,55	1,66	301,82	Sangat berhasil
		3	Peningkatan produksi telur	%	2,15	0,88	40,93	Kurang berhasil
SP2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	85,20	84,00	98,59	Berhasil
SP3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus zoonosis	5	Persentase wilayah yang terkendali zoonosis	%	74,00	88,00	118,92	Sangat berhasil
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80,50	80,70	100,25	Sangat berhasil
SP5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan	%	91,25	98,42	107,86	Sangat Berhasil
SP6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	87,00	81,82	94,05	Berhasil
SP7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan	%	15,00	8,21	54,73	Kurang berhasil
SP8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,75	32,66	99,73	Berhasil
SP9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,68	90,42	101,96	Sangat berhasil

Sumber: 1) Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2021; 2) Data Ditjen PKH 2021

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 7 di atas, dapat dikatakan pencapaian kinerja Ditjen PKH adalah **sangat berhasil**. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan, serta segenap jajaran Kementerian Pertanian untuk mewujudkan peningkatan kinerjanya. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Ditjen PKH tahun 2021. Capaian Indikator Kinerja yang



masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik); (2) Peningkatan produksi susu; (3) Persentase wilayah yang terkendali *zoonosis*; (4) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis; (5) Tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan (6) Nilai kinerja anggaran Ditjen PKH. Capaian Indikator Kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan dan (2) Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dan (3) Nilai PMPRB Ditjen PKH. Sedangkan capaian Indikator Kinerja yang masuk kategori **kurang berhasil** yaitu 1) Peningkatan produksi telur dan 2) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan.

Selengkapnya analisis capaian Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran Program disampaikan sebagai berikut:

Sasaran Program 1 (SP1) MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PANGAN ASAL TERNAK

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan produksi daging sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok, Kementerian Pertanian menetapkan Sasaran Strategis (SS), yaitu Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri. Oleh karena itu, subsektor Peternakan salah satu target Indikator Kinerja Sasaran Program yang ingin dicapai adalah peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, itik).

SP1. IKU1	
Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik)	
Target 0,85%	Realisasi 5,59%
% Capaian 657,65% (Sangat Berhasil)	

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) terhadap target tahun 2021.



Cara perhitungan Pertumbuhan Produksi Daging adalah akumulasi produksi daging pada tahun berjalan (A^t) ($t=2021$) dikurangi akumulasi produksi daging tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2020$), dibagi dengan akumulasi produksi daging tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2020$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci peningkatan produksi daging 2017-2021 dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil perhitungan IKU Peningkatan Produksi Daging dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Daging

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021*	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	0,40	0,85	1,20	1,24	1,28	657,65	3.993	436,72
Realisasi IKSP (%)	0,14	5,59	-	-	-			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Capaian produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) tahun 2021 dalam bentuk *meatyield* sebesar 4.379,03 ribu ton atau mencapai 96,53% dari target produksi sebesar 4.536,66 ribu ton dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pertumbuhan Produksi Daging pada Tahun 2017-2021*

No	Jenis Ternak	Tahun					% Peningkatan 2021/2020
		2017	2018	2019	2020	2021*)	
1	Sapi	364,40	373,13	378,25	339,75	328,03	(3,45)
2	Kerbau	22,01	18,99	18,57	13,88	15,71	13,20
3	Kambing	47,72	47,59	49,42	41,86	41,87	0,02
4	Domba	37,69	56,26	47,92	37,05	38,20	3,09
5	Babi	214,15	145,61	159,42	189,55	218,38	15,21
6	Ayam Buras	300,13	287,16	292,33	270,21	272,00	0,66
7	Ayam Ras Pedaging	3.175,85	3.409,56	3.495,09	3.219,12	3.426,04	6,43
8	Itik	36,39	38,65	39,81	35,75	38,79	8,50
Jumlah		4.198,34	4.376,94	4.480,80	4.147,17	4.379,03	5,59

Sumber: Ditjen PKH, 2021

Keterangan: *) Angka Sementara (dalam *meatyield*)

Selanjutnya Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging sebesar 5,59% jika dibandingkan terhadap target tahun 2021 sebesar 0,85%, maka diperoleh capaian peningkatan produksi daging sebesar 657,65% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) tahun 2021 sebesar 5,59% atau mencapai 3.992,86%



apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,14%. Secara rinci pertumbuhan produksi daging pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 9.

Namun demikian, pada tahun 2021 capaian kinerja produksi terutama untuk komoditas daging sapi belum mencapai sesuai target. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah pemotongan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagai dampak terjadinya pandemi *Covid-19* selama dua tahun terakhir. Penurunan konsumsi masyarakat diakibatkan termasuk adanya penerapan kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau *lockdown* terutama di beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota terbesar di Indonesia, untuk membendung laju kenaikan pandemi *Covid-19*. Kondisi ini menimbulkan hotel dan restoran banyak yang ditutup, termasuk penjual makanan dan minuman.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi kinerja Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) tahun 2021 sebesar 5,59 % jika dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 1,28%, maka saat ini sudah mencapai 436,72%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Menindaklanjuti amanat RPJMN 2020-2024 dalam Kegiatan Prioritas 2, yaitu Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan Pangan Laut Secara Berkelanjutan, maka Kementan telah menetapkan peningkatan produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Target produksi daging nasional yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Nasional pada tahun 2024 adalah sebesar 4,60 juta ton. Capaian produksi daging nasional tahun 2021 adalah sebesar 4,38 juta ton, dengan demikian maka realisasi capaian kinerja produksi daging tahun 2021 adalah kategori “**Berhasil**” atau mencapai 95,22% apabila dibandingkan dengan target Kementan tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja peningkatan populasi dan produksi daging secara nasional pada tahun 2021, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

1. Pengembangan ternak ruminansia melalui Optimalisasi Reproduksi (SIKOMANDAN) mampu menambah kelahiran sebanyak 2.237.887 ekor pada tahun 2021. Total kelahiran ternak dari Optimalisasi Reproduksi tahun 2020-2021 sebanyak 4.538.617 ekor. Namun demikian, pengembangan sapi potong di Indonesia saat ini masih terkendala belum banyaknya pengembangan budidaya yang berskala ekonomi. Berdasarkan data Sensus Pertanian Tahun 2013 BPS RI pola pemeliharaan sapi/kerbau dengan skala Rumah Tangga Peternakan (RTP) adalah sebesar 99,97%.



Hal ini berpengaruh terhadap percepatan capaian produksi daging sapi/kerbau untuk mampu memenuhi kebutuhan nasional.

2. Produksi daging khususnya ruminansia kecil (Kambing dan Domba) telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan sudah ekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia.
3. Produksi unggas (telur dan daging ayam ras) saat ini sudah swasembada, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Myanmar, Timor Leste, namun terdapat kendala di aspek hilirisasi untuk pasar dalam negeri.

Upaya yang dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait ketersediaan daging sapi/kerbau, Ditjen PKH terus melakukan terobosan untuk mendukung peningkatan produksi terutama komoditas daging sapi/kerbau melalui Rencana Kerja Tahun 2022, antara lain:

1. Menyusun program terobosan “Desa Korporasi Sapi” pada lokasi sentra sebagai solusi percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau dalam negeri sekaligus memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.
2. Mendorong pembiayaan yang bersumber dari nonAPBN antara lain kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara.
3. Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
4. Kegiatan reguler Pengembangan Ternak Ruminansia Potong berupa pengadaan ternak sebanyak 10.876 ekor sapi sapi potong dengan target sebanyak 472 Kelompok Masyarakat (Pokmas).
5. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
6. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging kambing/domba:

1. Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong berupa pengadaan ternak kambing/domba sebanyak 15.330 ekor dengan target pokmas sebanyak 628 kelompok.
2. Berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk melakukan promosi peningkatan konsumsi daging kambing/domba sebagai alternatif sumber protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan daging sapi/kerbau.
3. Koordinasi dengan asosiasi peternak kambing/domba atau Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan peternak agar melakukan penyeleksian terhadap ternak yang diekspor (bukan merupakan bibit unggul).

Upaya yang dilakukan Ditjen PKH terkait stabilisasi perunggasan, antara lain:

1. Koordinasi dengan kementerian lain yang terkait untuk mendorong adanya *Roadmap* Perunggasan Nasional.
2. Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
3. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor Subsektor Peternakan.
4. Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar



- tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
- Mendorong investasi di industri hilir dan perluasan negara tujuan ekspor.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) didukung oleh Kegiatan dan KRO sebagaimana tercantum dalam Tabel 10 dengan nilai efisiensi sebesar **61,93%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 10. Kegiatan Pendukung IKU 1 Tahun 2021

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	FISIK			KEUANGAN		CRO per KRO $\frac{\sum CRO^{(2)}}{\sum AAKRO}$	AAKRO x CRO - RAKRO	$E = \frac{\sum ((AAKRO \times (\frac{CRO^{(2)}}{AAKRO}) - RAKRO)}{\sum AAKRO)}$	$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$
	TVRO	RVRO	CRO: RVRO / TVRO	AAKRO: Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	RAKRO: Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output				
IKU 1 Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik)									
1783.AEA Koordinasi									
001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (Kegiatan)	5	5	100%	8.197.085.000	7.835.438.379	100%	361.646.621		
101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (PEN) (Kegiatan)	1	1	100%						
1783.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria									
001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan (NSPK)	4	4	100%	861.657.000	854.754.564	100%	6.902.436		
1783.QEG Bantuan Peralatan / Sarana									
001 Hijauan Pakan Temak (Unit)	15	15	100%	99.935.493.000	97.811.387.179	100%	2.124.105.821		
002 Pakan Olahan dan bahan pakan (Unit)	13	13	100%						
101 Hijauan Pakan Temak (PEN) (Unit)	4	4	100%						
102 Pakan Olahan Dan Bahan Pakan (PEN) (Unit)	29	29	100%						
1783.QJA Penyidikan dan Pengujian Produk									
001 Mutu dan Keamanan Pakan (Produk)	2.170	2.170	100%	15.563.546.000	14.248.980.742	100%	1.314.565.258		
101 Mutu dan Keamanan Pakan (PEN) (Produk)	100	100	100%						
1785.AEA Koordinasi									
001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Temak (Kegiatan)	11	11	100%	18.022.198.000	16.260.972.776	93%	516.780.490		
101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Temak (PEN) (Kegiatan)	30	26	87%						
1785.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria									
001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Temak (NSPK)	5	5	100%	47.613.227.000	46.413.604.069	100%	1.199.622.931		
101 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Temak (PEN) (NSPK)	1	1	100%						
1785.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
001 Sarana Balai Perbibitan Temak (Unit)	3	3	100%	21.723.031.000	21.219.766.984	100%	503.264.016		
002 SBSN Bull Center Indrapuri (Unit)	1	1	100%						
1785.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
001 Prasarana Balai Perbibitan Temak (Unit)	2	2	100%	4.168.742.000	4.154.739.995	100%	14.002.005		
002 SBSN Bull Center Indrapuri (Unit)	1	1	100%						
1785.PDA Standarisasi Produk									
001 Benih Temak Unggul (Produk)	5.425.800	6.740.054	124%	121.559.447.000	116.299.912.603	99%	4.092.182.065		
002 Bibit Temak Unggul (Produk)	1.401.251	1.166.382	83%						
101 Benih Temak Unggul (PEN) (Produk)	1	1	100%						
102 Bibit Temak Unggul (PEN) (Produk)	1.525	1.419	93%						
1785.QEH Bantuan Kelompok Masyarakat									
001 Optimalisasi Reproduksi (Kelompok Masyarakat)	1.204.220	1.204.220	100%	755.782.613.000	702.330.535.545	98%	39.581.042.363		
002 Temak Ruminansia Parah (Kelompok Masyarakat)	13	13	100%						
003 Temak Ruminansia Potong (Kelompok Masyarakat)	21	21	100%						
004 Temak Unggas dan Aneka Temak (Kelompok Masyarakat)	16	16	100%						
101 Optimalisasi Reproduksi (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.481.921	2.586.920	120%						
102 Temak Ruminansia Parah (PEN) (Kelompok Masyarakat)	6	5	83%						
103 Temak Ruminansia Potong (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.045	943	90%						
104 Temak Unggas Dan Aneka Temak (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.203	1.150	96%						
JUMLAH				950.827.060.000	890.438.559.196		45.390.113.380	4,77%	61,93%

Sumber: Ditjen PKH, 2021



g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Produksi Daging ditunjang oleh beberapa Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH antara lain:

(1) Peningkatan Kelahiran Ternak melalui Kegiatan Optimalisasi Reproduksi/ Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN)

Capaian kinerja optimalisasi reproduksi secara nasional periode 2017-2021 sebanyak 18.886.850 akseptor, bunting sebanyak 10.464.816 ekor, dan lahir sebanyak 9.278.047 ekor.

(2) Aspek Pembiayaan (Realisasi Pemberian Kredit Pembibitan dan Penggemukan)

Aspek pembiayaan sangat penting dalam mewujudkan akselerasi peningkatan populasi dan produksi ternak, terutama melalui peningkatan skala usaha dan efisiensi usaha. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing usaha, semakin efisien usaha maka biaya produksi per satuan produk lebih rendah sehingga daya saing usaha meningkat. Fasilitasi pembiayaan usaha peternakan terutama dilakukan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN. Pada tahun 2021, Kementerian Pertanian menargetkan KUR untuk usaha Peternakan sebesar Rp 15,06 Triliun, dan dapat direalisasikan sebesar Rp 15,54 Triliun atau mencapai 103,18% dari target. KUR tersebut diakses oleh 462.346 debitur untuk usaha produktif pembibitan dan budidaya sapi, ternak perah, kambing/domba, dan unggas.

Selain itu terkait usaha peternakan, terdapat realisasi untuk kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan (*mixed-farming*), dimana minimal 60% dari nilai KUR *mixed-farming* untuk usaha peternakan. Total realisasi untuk *mixed-farming* sebesar Rp. 5,58 triliun untuk 216.620 debitur, sehingga kontribusi KUR untuk usaha peternakan sebesar Rp. 21,12 triliun.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan sektor pertanian atau ditingkat Kementerian Pertanian, maka KUR Subsektor Peternakan mempunyai kontribusi sebesar 18,15%, dan apabila ditambah dengan *mixed-farming* atau kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan berkontribusi sebesar 6,52%, sehingga total kontribusi KUR Subsektor Peternakan terhadap KUR sektor pertanian sebesar 24,67%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 11.

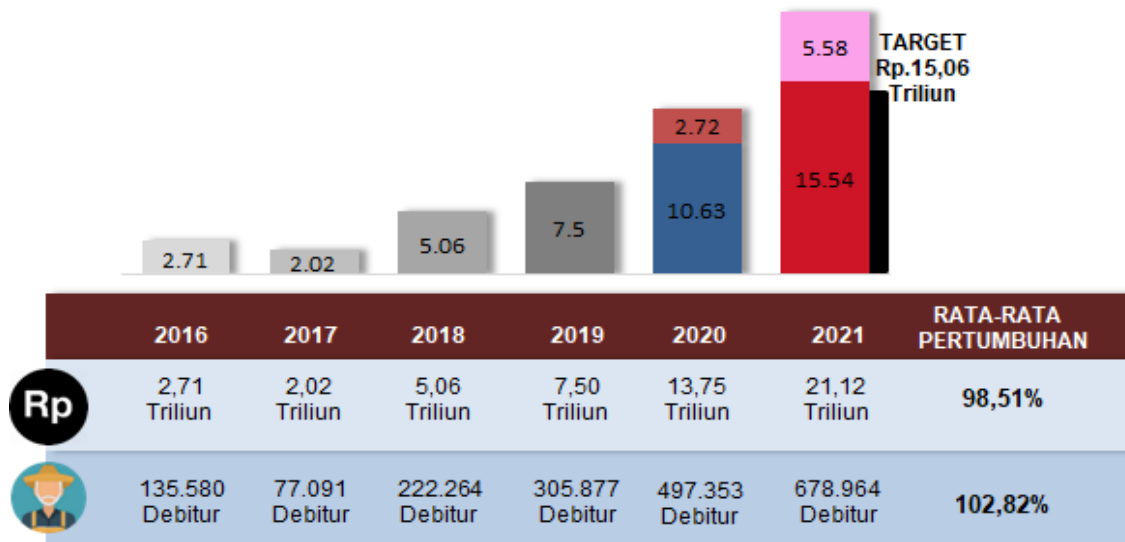


Tabel 11. Realisasi KUR Sektor Pertanian Tahun 2021

NO	SUB SEKTOR	DEBITUR	AKAD KREDIT (Rp.)
1	TANAMAN PANGAN	851.288	23.026.460.225.872
2	HORTIKULTURA	372.479	10.673.726.018.251
3	PERKEBUNAN	678.720	29.740.952.130.572
4	PETERNAKAN	462.346	15.537.759.044.591
5	Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming)	216.620	5.585.227.505.923
6	Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	33.236	1.053.904.165.651
TOTAL		2.614.689	85.618.029.090.860
TARGET KEMANTAN utk SUB SEKTOR PETERNAKAN			15,06 triliun
% Capaian			103,18%

Sumber: SAKURA (Sistem Informasi KUR Pertanian) Ditjen PSP diolah Ditjen PKH, 2021

Pada Grafik 2 dapat dilihat pertumbuhan realisasi KUR subsektor Peternakan (tanpa *mixed-farming*) pada periode 2016-2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 98,51% per tahun, dan pertumbuhan jumlah debitur sebesar 102,82% per tahun. Agar efektif dalam dukungan KUR terhadap peningkatan populasi dan produksi ternak, maka ketersediaan bibit ternak yang baik dan terjangkau baik dari segi harga maupun kemudahan untuk mendapatkan bibit di semua wilayah Indonesia sangat diperlukan.



Sumber:
Tahun 2021 SAKURA (Sistem Informasi KUR Pertanian) Ditjen PSP diolah Ditjen PKH
Tahun 2016-2020: SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) Kemenkeu diolah Ditjen PKH

Grafik 2. Realisasi KUR Bidang Usaha Peternakan

Realisasi akad kredit KUR Subsektor Peternakan pada tahun 2021 berdasarkan komoditas didominasi oleh usaha pembibitan dan budidaya sapi/kerbau Rp.7,89 Triliun (50,76%), usaha pembibitan dan budidaya babi Rp.0,91 Triliun (5,86%), usaha pembibitan dan budidaya unggas Rp.3,25 Triliun (20,92%), dan usaha pembibitan dan budidaya kambing domba potong Rp.2,04 Triliun (13,13%), dan pembibitan dan budidaya ternak perah Rp.1,45 Triliun (9,32%). Secara rinci realisasi per komoditas dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi KUR subsektor Peternakan Berdasarkan Komoditas Tahun 2021**

NO	SEKTOR USAHA (KBLI LBU*)	DEBITUR	AKAD KREDIT (Rp.)
1	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	247.224	7.887.172.487.319
2	Pembibitan dan Budidaya Unggas	68.188	3.250.444.318.171
3	Pembibitan dan Budidaya Kambing Domba	80.898	2.040.709.011.663
4	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	36.333	1.448.800.852.430
5	Pembibitan dan Budidaya Babi	29.703	910.632.375.008
	TOTAL	462.346	15.537.759.044.591

Sumber: Direktorat PPHNak, Ditjen PKH, 2021

Selain fasilitasi akses KUR, pada tahun 2021 telah dilakukan fasilitasi kerja sama dan pembinaan dalam upaya memanfaatkan program kemitraan (PK) BUMN sebesar Rp. 21,6 miliar kepada:

- Koperasi Berkah Salama Jaya, Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebesar Rp.20,6 miliar untuk komoditas sapi potong;
- SPR Kuamang Abadi, Kab. Bungo, Jambi sebesar Rp.1 miliar untuk komoditas sapi potong; dan
- SPR Wanaraya, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan dengan status masih dalam proses pengajuan untuk pengembangan usaha sapi potong.

Pada bulan April 2021, Program Kemitraan berubah nama menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN, selain berubah nama, terdapat perubahan pada besaran biaya administrasi (bunga) dari 3% menjadi 6% dari saldo pinjaman awal tahun. Pada tahun 2021 Koperasi Berkah Salama Jaya masih menggunakan biaya administrasi yang lama (3%) sedangkan SPR Kuamang Abadi dengan biaya administrasi 6%.

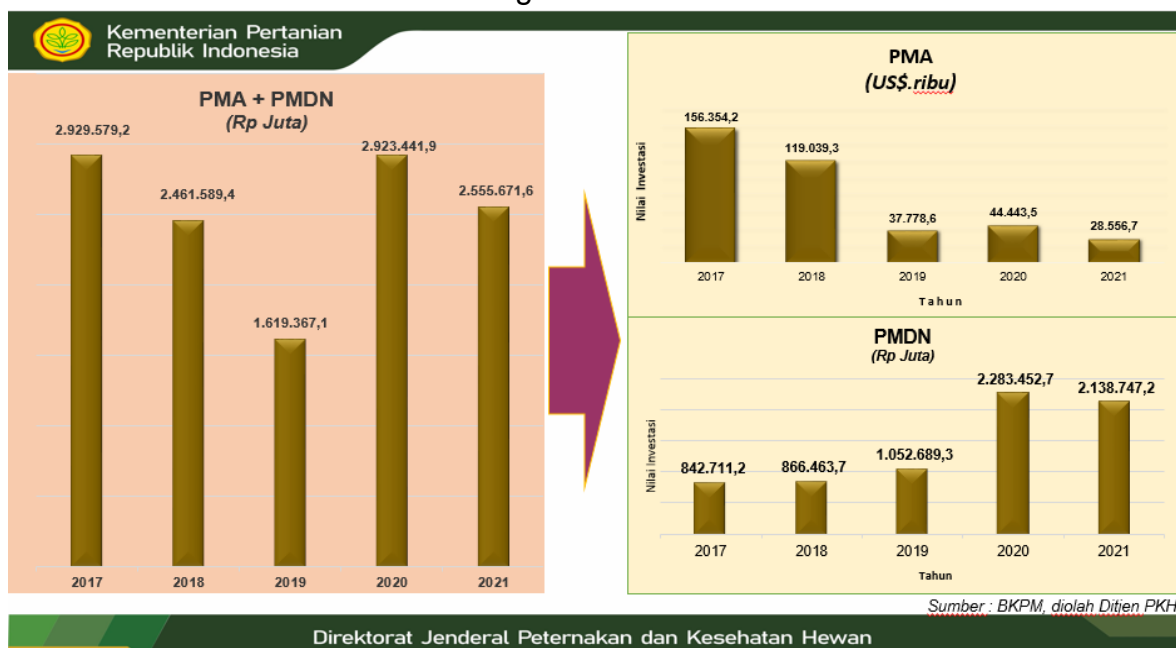
Dana pinjaman PK BUMN ini oleh peternak digunakan untuk pembelian ternak dan sarana seperti kandang. Total fasilitasi PK BUMN selama 4 tahun (2018-2021) sebesar Rp. 55,44 Milyar untuk lebih dari 818 peternak.



(3) Investasi Bidang Usaha Peternakan

Nilai investasi bidang usaha peternakan selama 5 tahun terakhir periode tahun 2017-2021 secara kumulatif mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,4%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kontribusi PMA yang masih rendah dan mengalami penurunan secara rata-rata sebesar -27,5%, sedangkan nilai PMDN mengalami peningkatan rata-rata sebesar 33,7% selama periode tersebut.

Tabel 13. Realisasi Investasi Bidang Usaha Peternakan Tahun 2017-2021



Nilai investasi bidang usaha peternakan tahun 2021 secara kumulatif sebesar Rp.2,5 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 12,6% dibanding tahun 2020, disebabkan rendahnya realisasi PMA pada tahun 2021 yang hanya mencapai US\$ 28,5 juta atau turun sebesar 34,9% dibanding tahun 2020 dan realisasi PMDN sebesar Rp 2,1 triliun atau turun 6,3% dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 realisasi PMA bidang usaha peternakan unggas sebesar US\$ 9,1 juta, atau secara signifikan mengalami penurunan sebesar 77,6% dibanding tahun 2020. Sedangkan pada usaha Sapi Kerbau dan Domba Kambing realisasinya meningkat dari US\$ 3,1 juta menjadi US\$ 19,3 juta. Untuk PMDN, pada tahun 2021 nilai unggas juga mengalami penurunan sebesar 15,6% dan Domba Kambing sebesar 54,4%, sementara untuk Babi dan Sapi Kerbau mengalami kenaikan diatas 100% dibanding tahun 2020.

Tabel 14. Realisasi Investasi PMA dan PMDN Bidang PKH Tahun 2017-2021

Kementerian Pertanian Republik Indonesia										
Rincian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Bidang Peternakan Tahun 2017-2021 (PMA dalam US\$ribu; PMDN dalam Rp.Juta)										
Bidang Usaha	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
Peternakan Sapi Dan Kerbau	2.574,2	76.131,4	47.551,6	123.929,4	9.855,1	174.724,8	3.468,2	109.863,4	19.388,7	228.930,0
Peternakan Babi	210,6	97.317,5	-	26.000,0	-	-	-	10.881,0	-	30.136,4
Peternakan Unggas	153.257,5	669.262,3	71.280,9	651.010,6	24.289,8	875.765,9	40.975,3	2.160.547,1	9.164,6	1.823.977,4
Peternakan Domba dan Kambing	-	-	3,7	-	1.900,4	2.198,6	-	2.146,2	3,4	979,3
Jasa Penunjang & Peternakan Lainnya	312,0	-	203,0	65.523,7	1.733,3	-	-	15,0	-	54.724,1
Total	156.354,2	842.711,2	119.039,3	866.463,7	37.778,6	1.052.689	44.443,5	2.283.452,7	28.556,7	2.138.747,2
Total Realisasi Investasi PMA+PMDN Bidang Peternakan Tahun 2017-2021 (dalam Rp. Juta)										
Bidang Usaha	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021					
Peternakan Sapi Dan Kerbau	110.581,2	761.121,0	322.550,3	159.804,9	512.005,0					
Peternakan Babi	100.139,5	26.000,0	-	10.881,0	30.136,4					
Peternakan Unggas	2.714.677,9	1.606.174,2	1.240.112,2	2.750.594,7	1.957.776,8					
Peternakan Domba dan Kambing	-	50,0	30.704,6	2.146,3	1.029,3					
Jasa Penunjang & Peternakan Lainnya	4.180,5	68.244,1	26.000,0	15,0	54.724,1					
Total	2.929.579,2	2.461.589,4	1.619.367,1	2.923.441,9	2.555.671,6					

Sumber: BKPM, diolah Ditjen PKH

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Secara keseluruhan, nilai realisasi kumulatif PMA dan PMDN pada bidang usaha peternakan unggas yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap capaian realisasi investasi peternakan selama tahun 2021 yakni sebesar Rp1,9 triliun mengalami penurunan signifikan sebesar 28,8% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,7 triliun. Sementara itu, pada bidang usaha sapi dan kerbau naik sebesar 220,4% dengan nilai investasi total PMA dan PMDN sebesar Rp 512 miliar.

(4) Penguatan Kelembagaan

Pada tahun 2021, penguatan kelembagaan peternakan dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan, dalam upaya pengembangan kemitraan usaha peternakan dan pengembangan kawasan korporasi. Pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak tahun 2021 dialokasikan di 9 (sembilan) kawasan, yaitu kawasan sapi potong di Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh, Kab. Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Kab. Cianjur Jawa Barat, Kab. Kediri Jawa Timur, Kab. Boyolali Jawa Tengah, Kab. Banyuasin Sumatera Selatan, dan Kab. Morowali Sulawesi Tengah. Secara ringkas kinerja pengembangan kawasan korporasi peternak dapat dilihat pada Tabel 15.



Tabel 15. Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Peternak Tahun 2021

No	Lokasi	Status Kelembagaan	Komoditas
1	Aceh Besar (Aceh)	UMKK Sapi Panca Montera	Sapi Potong
2	Solok Selatan (Sumbar)	Koperasi produsen Sangir Serumpun Sejahtera	Sapi Potong
3	PPU (Kalimantan Timur)	Koperasi Babulu Brahman Jaya	Sapi Potong
4	Sidrap (Sulawesi Selatan)	UMKK Panca Ternak Sejahtera	Sapi Potong
5	Cianjur (Jawa Barat)	Koperasi produsen sapi Mekar Surya Kencana	Sapi Potong
6	Kediri (Jawa Timur)	Masih dalam proses pembentukan UMKK	Sapi Potong
7	Boyolali (Jawa Tengah)	Koperasi produksi lembu Sukur Rukun Tentrem	Sapi Potong
8	Banyuasin (Sumatera Selatan)	Koperasi produsen Dekopi Aka Jaya	Sapi Potong
9	Morowali (Sulawesi Tengah)	UMKK Brahman Jaya Morowali	Sapi Potong

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, 2021

(5) Penguatan Sistem Logistik

Pada tahun 2021 terdapat 6 kapal khusus angkutan ternak yang beroperasi, yaitu CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, CN 5 dan CN 6 untuk mengangkut ternak dari sentra ternak ke sentra konsumen. Ditjen PKH berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kelancaran tataniaga ternak melalui pemanfaatan kapal ternak dan optimalisasi muatan pada trayek kapal ternak. Total jumlah ternak yang diangkut pada 2021 sebanyak 45.190 ekor dalam 99 *voyage* dengan rata-rata *loading factor* 91%. Secara rinci rute pelayaran dan rekap muatan ternak tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2021

No	Pangkalan/ Provinsi	Kapal	Jaringan Trayek	Jumlah Pelayaran	Jumlah Ternak (ekor)	Rata-rata Loading Faktor (%)
1	Kupang, NTT	CN 1	Kupang-Waingapu-Tj Priok-Cirebon-Kupang	16	7.374	92
2	Kupang, NTT	CN 3	Kupang-Wini-Atapupu-Tj Priok/Banjarmasin/ Samarinda-Kupang	15	7.071	94
3	Kupang, NTT	CN 2	Kupang/Bima-Tj Priok-Cirebon-Kupang/Bima	17	10.074	119
4	Kupang, NTT	CN 4	Kupang-Wini-Atapupu-Samarinda/Balikpapan-Kupang	14	6.902	99
5	Kupang, NTT	CN 6	Kupang-Banjarmasin-Bima-Banjarmasin-Kupang	17	9.070	107
6	Kwandang, Gorontalo	CN 5	Kwandang-Tarakan-Balikpapan/Samarinda-Palu-Balikpapan/Samarinda-Kwandang	20	4.699	47
TOTAL				99	45.190	91

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, 2021



(6) Regulasi dan Deregulasi

Tahun 2021 Ditjen PKH aktif menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta dalam upaya mendukung iklim investasi pertanian (termasuk peternakan) yang lebih baik. Ditjen PKH bersama Unit Kerja Eselon I Kementan yang dikoordinasikan oleh Setjen Kementan telah menyusun Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, dan Permentan No. 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permentan No. 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Ditjen PKH juga berperan aktif dalam pengusulan daftar prioritas investasi yang dikoordinasikan oleh Setjen Kementan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya ditetapkan Peraturan Presiden RI No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pada tanggal 24 Mei 2021. Berdasarkan peraturan ini diatur beberapa bidang usaha yang terkait dengan peternakan sebagai berikut:

a. Bidang Usaha Prioritas

1) Fasilitas Pajak Penghasilan (*Tax Allowance*)

- a) Pembibitan dan budidaya sapi potong (KBLI 01411) meliputi pembibitan sapi potong dan budidaya pembiakan sapi potong dengan persyaratan melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang.
- b) Pembibitan dan budidaya sapi perah (KBLI 01412) meliputi pembibitan sapi perah dan budidaya sapi perah dengan persyaratan melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan terintegrasi dan/atau kemitraan dengan Industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510).
- c) Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim (KBLI 10510).

2) Fasilitas Pengurangan Neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan usaha padat karya (*Investment Allowance*), yaitu Industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510); dan Industri penyamakan kulit (KBLI 15112)

b. Bidang usaha wajib melakukan kemitraan dengan Koperasi dan UMKM

- 1) Budidaya ayam ras pedaging (KBLI 10520).
- 2) Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental (KBLI 10520).

c. Bidang usaha dialokasikan untuk koperasi dan UMKM, yaitu perdagangan eceran daging dan ikan olahan (KBLI 47245).

(7) Penyediaan Pakan Ternak

Dalam mendukung pencapaian produksi daging, maka pada tahun 2021 telah dilakukan fasilitasi Penyediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) melalui pengembangan hijauan pakan sapi potong dengan kegiatan penanaman dan



pengembangan tanaman pakan berkualitas di 5 (lima) Provinsi seluas 50 Ha, terdiri dari: 1) Provinsi Jawa Barat seluas 10 Ha; 2) Lampung 10 Ha; 3) Banten 10 Ha; 4) Jawa Timur 10 Ha; dan 5) Nusa Tenggara Barat seluas 10 Ha. Rincian penanaman hijauan sebagai berikut:

Tabel 17. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas Tahun 2021

No	Provinsi	Kabupaten	Nama Kelompok	Luas Tanam (Ha)	Jumlah Stek	Jenis Rumput
1	Jawa Barat	Majalengka	Sawah Haseum	5	50.000	Rumput Odot
		Subang	Harapan Sejahtera I	5	50.000	Rumput Odot
2	Lampung	Pesisir Barat	Karya Mandiri	10	100.000	Rumput Odot
3	Banten	Tangerang	Sabana Mandiri	1	10.000	Rumput Odot
		Tangerang	Arum Jaya	1	10.000	Rumput Odot
		Tangerang	Kendal Karet	1	10.000	Rumput Odot
		Tangerang	Karya Alam	1	10.000	Rumput Odot
		Tangerang	Fajar Sejahtera	1	10.000	Rumput Odot
		Pandeglang	Cihurang	5	50.000	Rumput Odot
4	Jawa Timur	Tuban	KWT Flamboyan	2	20.000	Rumput Odot
		Tuban	Suloyo Gandring	2	20.000	Rumput Odot
		Tuban	Makaryo	2	20.000	Rumput Odot
		Bojonegoro	KTT Tanjung Sari	2	20.000	Rumput Pakchong
		Bojonegoro	KTT Lembu Jaya	2	20.000	Rumput Pakchong
5	NTB	Lombok Barat	KTT. Batu Bangke Mdri	2	20.000	King Grass dan Odot
		Lombok Tengah	KTT. Renseng	2	20.000	King Grass dan Odot
		Lombok Utara	KTT. Titiq Sama Guna	2	20.000	King Grass dan Odot
		Sumbawa Barat	KTT. Mako Aji	2	20.000	King Grass dan Odot
		Kab. Bima	PP Oi Tui	1	10.000	King Grass dan Odot
		Kab. Dompu	PP Dorocanga	1	10.000	King Grass dan Odot
TOTAL				50	500.000	

Sumber: Direktorat Pakan, Ditjen PKH, 2021

Kegiatan penanaman hijauan pakan tersebut dilaksanakan di 20 kelompok peternak di 13 Kabupaten dan 5 provinsi. Jenis hijauan yang ditanam adalah rumput gajah, rumput odot dan Indigofera, estimasi produksi hijauan pakan berkualitas hasil dari penanaman tersebut 1.900 ton segar/tahun yang dapat memenuhi kebutuhan pakan sapi potong 175 ekor. Diharapkan dengan stimulus kegiatan penanaman hijauan pakan berkualitas dapat meningkatkan kesadaran peternak dalam upaya penyediaan hijauan pakan berkualitas dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak ruminansia khususnya sapi.

Selain upaya di atas untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sapi potong juga dilakukan distribusi benih tanaman pakan ternak dari UPT kepada peternak dalam mendukung penyediaan hijauan pakan ternak berkualitas. Distribusi benih tanaman pakan ternak masing-masing UPT sebagai berikut:

Tabel 18. Distribusi Tanaman Pakan Ternak (TPT) oleh UPT Pusat Tahun 2021

No	Instansi	Rumput			Legum	
		Stek	Polybag	Pools	Kg	Stek
1	BPTU-HPT Indrapuri	70.620		28.100	0,80	
2	BPTU-HPT Siborong-borong	7.500			1,00	
3	BPTU-HPT Padang Mangatas	73.372			4,05	
4	BPTU-HPT Sembawa	319.133	10.889	163.785	260,10	



No	Instansi	Rumput			Legum	
		Stek	Polybag	Pools	Kg	Stek
5	BPTU-HPT Baturraden	61.220			7,80	
6	BPTU-HPT Denpasar	129.420			168,00	
7	BPTU-HPT Pelaihari	471.150		1.000	19,80	44.850
8	BET Cipelang	45.000				
9	BIB Lembang	365.000				
10	BBIB Singosari	661.790			39,90	
	Total	2.204.205	10.889	192.885	501,45	44.850

Sumber: Direktorat Pakan, Ditjen PKH, 2021

Disamping itu juga dilakukan fasilitasi pengembangan bahan pakan/pakan melalui Kegiatan Bank Pakan untuk sapi potong di 6 Provinsi dengan fasilitasi alat pengolah pakan dan bahan pakan dengan total capaian 506 ton. Rincian capaian disampaikan sebagai berikut: (1) Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 kelompok dengan capaian 45 ton; (2) Jawa Timur 3 kelompok dengan total capaian 225 ton; (3) Lampung sebanyak 1 kelompok dengan capaian 36 ton (4) Nusa Tenggara Barat sebanyak 2 kelompok dengan total capaian 135 ton; (5) Sulawesi Selatan sebanyak 1 kelompok dengan total capaian 20 ton; dan (6) Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 kelompok dengan capaian 36 ton. Alokasi anggaran antara lain adalah bahan pakan yang disesuaikan dengan potensi pengembangan bahan pakan lokal di masing-masing lokasi, alat pengolahan pakan antara lain seperti mesin *mixer*, mesin *hammer mill*, timbangan pakan, mesin *baler silase*, mesin *chopper*, mesin *press*, mesin *sprayer*, gerobak dorong, tong silase dan karung pakan, serta pembangunan/perbaikan gudang pakan.

Selain itu, dalam mendukung pengawasan mutu dan keamanan pakan, maka pada tahun 2021 juga telah difasilitasi pengujian untuk 2.270 sampel produk pakan, baik yang dilakukan melalui Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMS) Bekasi dan laboratorium pakan daerah.

(8) Pengendalian Penyakit dan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan

- Peningkatan kapasitas peralatan maupun SDM laboratorium veteriner.
- Penguatan Puskesmas dengan memfasilitasi ketersediaan obat-obatan dan sarana lainnya di lokasi kegiatan prioritas.
- Penempatan Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner untuk membantu dinas dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit.
- Kegiatan kompartementalisasi unit-unit usaha peternakan sehingga terjamin kesehatan unit usaha tersebut dari penyakit tertentu.

SP1. IKU2 Peningkatan Produksi Susu	
Target 0,55%	Realisasi 1,66%
% Capaian 301,82% (Sangat Berhasil)	



Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi susu terhadap target tahun 2021.

Cara perhitungan Peningkatan Produksi Susu adalah produksi susu pada tahun berjalan (A^t) ($t=2021$) dikurangi produksi susu tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2020$), dibagi produksi susu tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2020$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil peningkatan produksi susu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil perhitungan IKU Peningkatan Produksi Susu dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Susu

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	2,50	0,55	0,61	0,71	0,85	301,82	1.186	195,29
Realisasi IKSP (%)	0,14	1,66	-	-	-			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

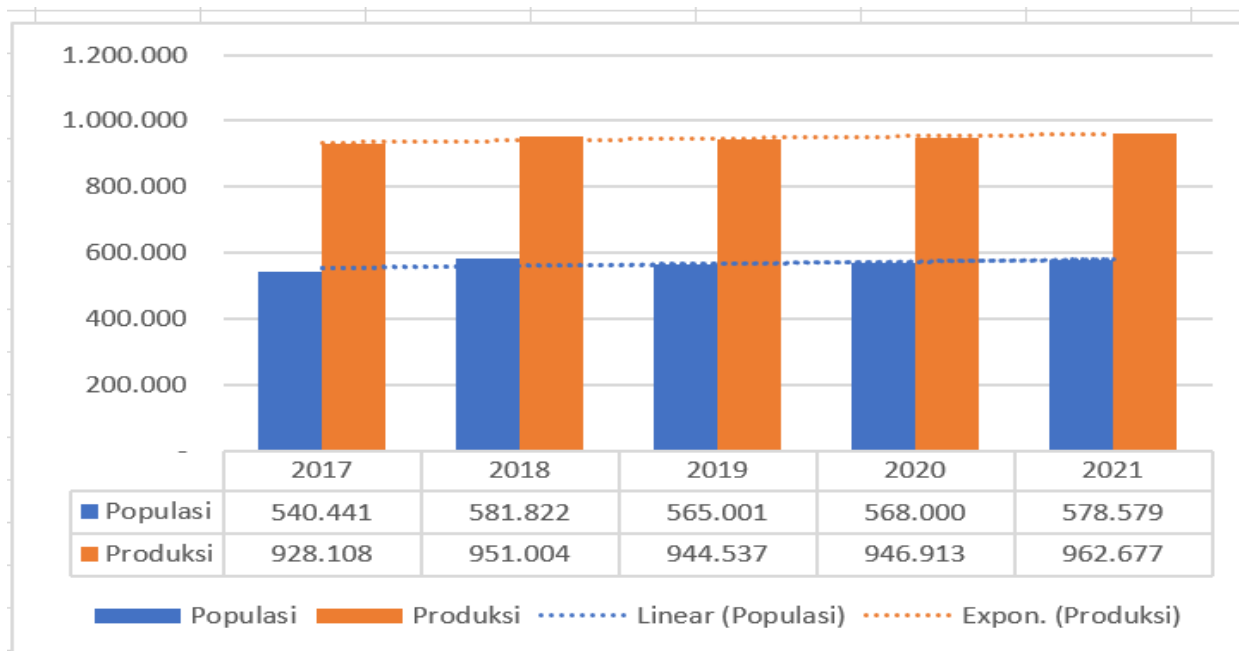
a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Produksi susu tahun 2021 sebesar 962.677 ton atau mencapai 98,89% dari target sebesar 973.470 ton. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu pada tahun 2021 mencapai 1,66% dari target 0,55%, artinya capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu sebesar 301,82% atau **“Sangat Berhasil”** dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu Tahun 2021 sebesar 1,66% atau mencapai 503,03% atau apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,33%. Secara rinci peningkatan produksi susu pada tahun 2017-2021 tergambar pada Grafik 3.





Grafik 3. Perkembangan Produksi Susu Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional Tahun 2017-2021*)

Sumber : Ditjen PKH, 2021

Keterangan : *) Angka sementara

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja peningkatan produksi susu tahun 2021 sebesar 1,66% jika dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 0,85% sudah mencapai 195,29%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi capaian kinerja peningkatan produksi susu tahun 2021 tidak dapat dibandingkan karena IKU ini tidak terdapat pada target Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas sapi perah nasional, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH berupaya meningkatkan kualitas genetik sapi perah dan membentuk pejantan unggul sapi perah Indonesia melalui Uji Zuriat (*Progeny Test*). Uji zuriat telah dimulai sejak tahun 2004 dan hingga saat ini telah mencapai tahap ke-4. Hasil uji zuriat tahap 1 sampai 4, telah menghasilkan 20 ekor pejantan unggul sapi perah dengan rata-rata produksi harian susu anaknya sebanyak 16,67 liter/ekor/hari. Untuk tahap ke-4 telah ditetapkan 3 Calon Pejantan Unggul (CPU) yaitu INA40378/008428, 320541 dan 320542.

Peningkatan populasi dan produksi sapi perah pada tahun 2021 karena adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen PKH sebagai berikut:



- (1) Penyediaan/produksi benih (semen beku dan embrio) dan bibit unggul yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKH.
- (2) Pemasukan bibit dari luar negeri, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.
- (3) Kelahiran pedet dari Kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, yang dilanjutkan dengan kegiatan Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja produksi susu didukung oleh kegiatan dan KRO sebagaimana tercantum dalam Tabel 20 dengan nilai efisiensi sebesar **62,69%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 20. Kegiatan Pendukung IKU 2 Tahun 2021

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	FISIK			KEUANGAN		CRO per KRO $\frac{CRO}{\sum CRO}$	(AAKRO x CRO) - RAKRO	$E = \frac{\sum ((AAKRO \times (\sum CRO)^{\frac{1}{2}}) - RAKRO)}{\sum (AAKRO)}$	NE = 50% + $\frac{E}{20} \times 50$						
	TVRO	RVRO	CRO: RVRO / TVRO	AAKRO: Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	RAKRO: Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output										
IKU 2 Peningkatan Produksi Susu															
1785.AEA Koordinasi															
001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Temak (Kegiatan)	11	11	100%	16.022.198.000	16.260.972.776	93%	516.780.490	5,08%	62,69%						
101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Temak (PEN) (Kegiatan)	30	26	87%												
1785.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria															
001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Temak (NSPK)	5	5	100%	47.613.227.000	46.413.604.069	100%	1.199.622.931	5,08%	62,69%						
101 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Temak (PEN) (NSPK)	1	1	100%												
1785.QEH Bantuan Kelompok Masyarakat															
001 Optimalisasi Reproduksi (Kelompok Masyarakat)	1.204.220	1.204.220	100%	755.762.613.000	702.350.535.545	98%	39.581.042.363	5,08%	62,69%						
002 Temak Ruminansia Perah (Kelompok Masyarakat)	13	13	100%												
003 Temak Ruminansia Potong (Kelompok Masyarakat)	21	21	100%												
004 Temak Unggas dan Aneka Temak (Kelompok Masyarakat)	16	16	100%												
101 Optimalisasi Reproduksi (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.481.921	2.586.920	120%												
102 Temak Ruminansia Perah (PEN) (Kelompok Masyarakat)	6	5	83%												
103 Temak Ruminansia Potong (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.045	943	90%												
104 Temak Unggas Dan Aneka Temak (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.203	1.150	96%												
JUMLAH										803.375.840.000	748.764.139.614		40.780.665.294		

Sumber: Ditjen PKH, 2021

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi perah, sejak tahun 2017 Ditjen PKH melaksanakan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dengan *tagline* Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) sampai dengan tahun 2019, kemudian sejak tahun 2020 *tagline* menjadi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang bertujuan meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau, guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu.

Komoditas sapi perah, dalam kurun waktu empat tahun terakhir (sampai akhir Desember 2021) tercatat didalam iSIKHNAS bahwa terdapat kelahiran pedet sapi perah sebanyak 386.807 ekor, dengan rincian tahun 2018 sebanyak 77.035 ekor, tahun 2019 sebanyak 94.025 ekor, tahun 2020 sebanyak 105.388 ekor dan tahun 2021 sebanyak 110.359 ekor atau rata-rata kelahiran selama empat tahun terakhir kurang lebih 96.701 ekor/tahun.



Sebaran kelahiran sapi perah tersebut yaitu sebanyak 381.633 ekor (98,7%) di Pulau Jawa (5 terbesar pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta), sisanya sebanyak 5.174 ekor (1,3%) berada di luar Jawa (terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan). Dari jumlah kelahiran tersebut rata-rata perbandingan atau rasio jenis kelamin (*sex ratio*) betina: jantan yaitu 51% : 49% (betina 199.021 ekor, jantan 187.786 ekor). Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi penambahan populasi calon sapi dara (*heifer*) sebanyak 51% dari total kelahiran per tahun sebagai *replacement stock* sapi induk yang sudah tidak produktif, dan terdapat potensi penambahan populasi sapi bakalan sebanyak 49% dari total kelahiran per tahun yang diperoleh dari kelahiran pedet jantan untuk digemukkan (*fattening*).

Kegiatan lain yang mendukung peningkatan populasi ternak perah adalah:

- a) Kerja sama dengan NGO/LSM *Mercy-USA* untuk pengembangan ternak sapi perah pada kelompok dan di wilayah pengembangan sapi perah di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat.
- b) Pengembangan sapi perah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, dan Sulawesi Selatan.
- c) Kerjasama dengan Denmark
 Dalam mendukung pengembangan sistem pertanian organik komoditas peternakan khususnya susu, telah dilakukan inisiasi kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Denmark dalam penyusunan regulasi/kebijakan dan kerangka kerja pengembangan susu organik di Indonesia. Kerjasama akan berjalan selama 3 tahun dengan sistem *share funding*. Selain penyusunan kerangka kerja juga akan dilakukan *Pilot Project* Pengembangan Susu organik dalam kerjasama B2B melalui *Danida Market Development Partnership*, yaitu kerjasama antara Arla Food dengan PT. Indofood dan KPSP Setia Kawan Pasuruan.

Kegiatan *South-South Cooperation* (SSC) pada tahun 2021 yaitu penandatanganan *project document* sebagai legalitas pelaksanaan kerjasama telah dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021. Pada bulan April 2021 dilaksanakan *kick off* Webinar sebagai tanda mulai dilaksanakannya kerjasama SSC. Pada bulan Mei sampai Oktober dilaksanakan beberapa webinar yang bermaksud untuk meningkatkan kapasitas SDM. Pada bulan November dilaksanakan kegiatan *Benchmarking* ke Denmark oleh seluruh perwakilan Eselon 2 lingkup Ditjen PKH.

- d) Fasilitasi untuk pengolahan susu
 Dalam peningkatan mutu hasil olahan susu beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu dan sertifikasi izin edar Makanan Dalam (MD) yang dikeluarkan oleh Badan POM. Fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang berupa:
 - 1) Fasilitas prasarana: renovasi rumah produksi.
 - 2) Fasilitasi sarana (alat dan mesin): alat penampung susu (*milk can*), boks pendingin susu (*coolbox*), mesin pengolah susu pasteurisasi, mesin penepung/



grinder, mesin oven serbuk susu, mesin penutup botol, meja *stainless steel*, alat uji susu, *freezer* tutup atas bahan baku, *tray stainless steel* dan genset.

Selain itu untuk peningkatan mutu hasil olahan susu yang dilakukan adalah dengan memberikan sertifikasi izin edar MD, jumlah kelompok yang sudah mempunyai sertifikasi dari tahun 2020-2021 sejumlah 3 kelompok pengolahan dengan output 4 izin edar MD.

e) Bantuan benih tanaman pakan ternak

Dalam rangka mendukung produksi susu, Direktorat Pakan mengalokasikan fasilitasi penanaman hijauan pakan ternak pada lahan kelompok ternak sapi perah seluas 20 Ha dalam mendukung pengembangan kawasan sapi perah di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu juga dilaksanakan perawatan dan pemeliharaan padang penggembalaan (*pastura*) di BBPTU-HPT Baturraden seluas 66 Ha dan perawatan kebun hijauan 130 ha yang menjadi sumber pakan sapi perah dan kambing perah yang dialokasikan mendukung produksi susu tersebut.

f) Impor sapi perah

Rekomendasi teknis pemasukan bibit ternak perah yang diterbitkan pada periode tahun 2016-2020 adalah sebanyak 13.902 ekor, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 1.050 ekor, tahun 2017 sebanyak 2.320 ekor, tahun 2018 sebanyak 3.482 ekor, tahun 2019 sebanyak 4.124 ekor, dan tahun 2020 sebanyak 899 ekor.

g) Penyaluran KUR ternak perah sebesar 1,448 Triliun kepada 36.333 debitur

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan produksi susu diantaranya:

1) Pengembangan Ternak Ruminansia Perah dan Fasilitasi *Rearing* Unit Sapi Perah pada tahun anggaran 2022.

Penerima manfaat dari kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah adalah kelompok peternak penerima bantuan pengembangan (1) sapi perah: Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Tenggara; (2) kambing perah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Penerima manfaat kegiatan Fasilitasi *Rearing* Unit Sapi Perah adalah UPTD yang menangani peternakan sapi perah di Provinsi: Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.

2) Produksi semen beku sapi perah di BBIB Singosari dan BIB Lembang.

3) Produksi bibit sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden sebanyak 400 ekor.

4) Rekomendasi impor benih dan bibit sapi perah.

SP1. IKU3	
Peningkatan Produksi Telur	
Target 2,15%	Realisasi 0,88%
% Capaian 40,93% (Kurang Berhasil)	



Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Telur merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) terhadap target tahun 2021.

Cara perhitungan Pertumbuhan Produksi Telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) adalah akumulasi produksi telur pada tahun berjalan (A^t) ($t=2021$) dikurangi akumulasi produksi telur tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2020$), dibagi dengan akumulasi produksi telur tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2020$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil peningkatan produksi telur 2017-2021 dapat dilihat pada Lampiran 4 dan realisasi capaian IKU dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Telur

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	2,15	2,15	2,16	2,16	2,16	40,93	15,83	40,74
Realisasi IKSP (%)	5,56	0,88	-	-	-			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pertumbuhan Produksi Telur sebesar 0,88% jika dibandingkan terhadap target peningkatan pertumbuhan tahun 2021 sebesar 2,15%, maka diperoleh capaian peningkatan pertumbuhan produksi telur sebesar 40,93% dengan kategori “**Kurang Berhasil**”.

Namun demikian, Capaian Produksi Telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) tahun 2021 sebesar 5.926,03 ribu ton jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2021 sebesar 5.587,64 ribu ton, diperoleh capaian 106,06%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian produksi telur adalah “**Sangat Berhasil**”. Capaian produksi telur dapat dilihat pada Tabel 22.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Telur tahun 2021 sebesar 0,88% atau mencapai 15,83% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 5,56%.



Tabel 22. Perkembangan Produksi Telur (Ribu Ton)

No	Jenis Temak	Tahun					% Peningkatan
		2017	2018	2019	2020	2021*)	
1	Ayam Buras	221,00	212,34	246,69	358,86	381,61	6,34
2	Ayam Ras Petelur	4.632,83	4.688,12	4.753,38	5.141,57	5.156,00	0,28
3	Itik	302,70	306,54	294,01	316,95	329,57	3,98
4	Itik Manila	35,09	31,97	34,67	32,35	33,57	3,78
5	Puyuh	25,02	28,96	25,86	24,65	25,28	2,57
Jumlah		5.216,64	5.267,93	5.354,62	5.874,38	5.926,03	0,88

Sumber: Ditjen PKH, 2021

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi kinerja Peningkatan Produksi Telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) tahun 2021 sebesar 0,88 % jika dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 2,16%, maka saat ini sudah mencapai 40,74%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi capaian kinerja peningkatan produksi telur tahun 2021 tidak dapat dibandingkan karena IKU ini tidak terdapat pada target Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian produksi telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) tahun 2021 adalah sebesar 5.926,03 ribu ton atau mencapai 106,06% dari target produksi telur sebesar 5.587,64 ribu ton. Khusus untuk produksi telur ayam ras tahun 2021 sebesar 5,16 juta ton, dengan kebutuhan sebesar 5,13 juta ton, maka masih terdapat neraca ketersediaan terhadap kebutuhan telur ayam ras surplus sebesar 0,03 juta ton. Selain itu, pertumbuhan populasi ayam ras petelur di Indonesia tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,67%. Oleh karena itu, Ditjen PKH terus menerus mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan ekspor dan bersaing di perdagangan global.

Komoditas telur merupakan komoditas yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu Ditjen PKH terus melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk gemar mengonsumsi telur sebagai sumber protein hewani asal ternak, sebagai upaya untuk peningkatan konsumsi di dalam negeri. Ditjen PKH juga melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui Kementerian Koordinasi (Kemenko) Bidang Perekonomian, agar komoditas telur menjadi salah satu alternatif komoditas yang dimanfaatkan untuk Bantuan Sosial kepada masyarakat, terutama di tengah mewabahnya pandemi *Covid-19* dalam dua tahun terakhir ini.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja produksi telur didukung oleh kegiatan dan KRO sebagaimana tercantum dalam Tabel 23 dengan nilai efisiensi sebesar **62,69%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 23. Kegiatan Pendukung IKU 3 Tahun 2021

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	FISIK			KEUANGAN		CRO per KRO $\frac{CRO}{\sum CRO}$	(AAKRO x CRO) - RAKRO	$E = \frac{\sum((AAKRO \times (\sum CRO)^{\frac{1}{2}}) - RAKRO)}{\sum(AAKRO)}$	$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$						
	TVRO	RVRO	CRO: RVRO / TVRO	AAKRO: Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	RAKRO: Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output										
IKU 3 Peningkatan Produksi Telur															
1783.AEA Koordinasi															
001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (Kegiatan)	5	5	100%	8.197.085.000	7.835.438.379	100%	361.646.621								
101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (PEN) (Kegiatan)	1	1	100%												
1783.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria															
001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan (NSPK)	4	4	100%	861.657.000	854.754.564	100%	6.902.436								
1783.QEG Bantuan Peralatan / Sarana															
001 Hewan Pakan Temak (Unit)	15	15	100%	99.935.483.000	97.811.387.179	100%	2.124.105.821								
002 Pakan Olahan dan bahan pakan (Unit)	13	13	100%												
101 Hewan Pakan Temak (PEN) (Unit)	4	4	100%												
102 Pakan Olahan Dan Bahan Pakan (PEN) (Unit)	29	29	100%												
1783.QJA Penyidikan dan Pengujian Produk															
001 Mutu dan Keamanan Pakan (Produk)	2.170	2.170	100%	15.563.546.000	14.248.980.742	100%	1.314.565.258								
101 Mutu dan Keamanan Pakan (PEN) (Produk)	100	100	100%												
1785.AEA Koordinasi															
001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Temak (Kegiatan)	11	11	100%	18.022.198.000	16.260.972.776	93%	516.780.490	5,08%	62,69%						
101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Temak (PEN) (Kegiatan)	30	26	87%												
1785.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria															
001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Temak (NSPK)	5	5	100%	47.613.227.000	46.413.604.069	100%	1.199.622.931								
101 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Temak (PEN) (NSPK)	1	1	100%												
1785.QEH Bantuan Kelompok Masyarakat															
001 Optimalisasi Reproduksi (Kelompok Masyarakat)	1.204.220	1.204.220	100%	755.762.613.000	702.350.535.545	98%	39.581.042.363								
002 Temak Ruminansia Parah (Kelompok Masyarakat)	13	13	100%												
003 Temak Ruminansia Potong (Kelompok Masyarakat)	21	21	100%												
004 Temak Unggas dan Aneka Temak (Kelompok Masyarakat)	16	16	100%												
101 Optimalisasi Reproduksi (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.481.921	2.586.920	120%												
102 Temak Ruminansia Parah (PEN) (Kelompok Masyarakat)	6	5	83%												
103 Temak Ruminansia Potong (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.045	943	90%												
104 Temak Unggas Dan Aneka Temak (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.203	1.150	96%												
JUMLAH										803.375.840.000	748.764.139.614		40.780.665.294		

Sumber: Ditjen PKH, 2021

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi telur adalah:

1. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait (peternak rakyat, PINSAR Petelur, Peternak layer Nasional, BPS dan BKP Kementan);
2. Pemantauan pelaporan secara *online*;
3. Koordinasi penetapan impor GPS *layer* dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.
4. Pengembangan pakan olahan

Dalam mendukung pencapaian produksi telur, maka pada tahun 2021 telah dilakukan fasilitasi APBN melalui RO Pakan Olahan dengan komponen pengembangan bahan pakan/pakan melalui kegiatan bank pakan untuk itik petelur di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 kelompok dengan capaian 29,4 ton. Alokasi anggaran antara lain bahan pakan disesuaikan dengan potensi pengembangan bahan pakan lokal, untuk alat pengolahan pakan seperti, mesin mixer, mesin *hammer mill/disk mill*, mesin pencetak pellet, timbangan, mesin jahit karung, karung dan perbaikan gudang.



Sasaran Program 2 (SP2)

MENINGKATNYA PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN PANGAN

Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Untuk mencegah dan mengurangi risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, maka pengawasan keamanan menjadi sangat penting agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.

SP2. IKU4	
Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	
Target 85,20%	Realisasi 84%
% Capaian 98,59% (Berhasil)	

Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Disamping itu, pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat.

Cara perhitungan capaian indikator Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan adalah dengan mengidentifikasi jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan dibagi dengan mengidentifikasi jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan, dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan}}{\sum \text{sampel produk pangan segar asal hewan}} \right) \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2021 sebesar 84%. Angka ini didapat dari perhitungan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi



persyaratan keamanan dan mutu pangan terhadap jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan dikalikan 100%.

Jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan tahun 2021 sebanyak 16.862 sampel yang terdiri atas 14.754 sampel aktif dan 2.108 sampel pasif. Adapun sampel aktif diambil dari 738 unit usaha, yang meliputi tempat penampungan susu, tempat pengolahan susu, gudang kering, rumah potong/gudang, tempat pengolahan daging, peternakan/pengumpul/pengemas telur konsumsi, tempat pengolahan telur. Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.

Hasil perhitungan realisasi capaian IKU Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	81,50	85,2	85,50	85,70	86,00	98,59	97,00	97,67
Realisasi IKSP (%)	86,60	84,0	-	-	-			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2021 sebesar 84% jika dibandingkan terhadap target tahun 2021 sebesar 85,2%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan sebesar 98,59% dengan kategori **“Berhasil”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2021 sebesar 84% atau mencapai 97,00% apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 86,60%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2021 sebesar 84% jika dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 86%, maka saat ini sudah mencapai 97,67%.



d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2021 sebesar 84% atau mencapai 98,70% apabila dibandingkan dengan target Kementan sebesar 85,10%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementan, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementan.

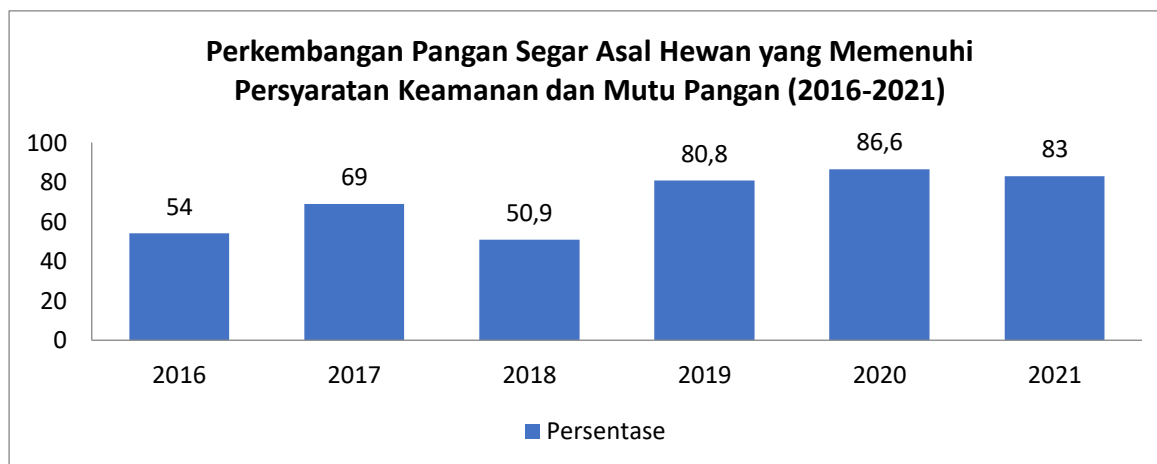
e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan, terutama pangan segar asal hewan. Sehubungan dengan hal tersebut telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan *output* pengawasan mutu dan keamanan produk hewan. *Output* ini dilaksanakan melalui tiga komponen meliputi: (1) pengawasan keamanan produk hewan yang melibatkan pemerintah daerah (Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota), (2) monitoring dan *surveillans* keamanan produk hewan (residu, cemaran mikroba serta resistensi antimikroba) yang melibatkan 9 laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang meliputi: BPMSPH, BBVet, dan BVet dan (3) pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang dilaksanakan oleh BPMSPH.

Pada Tahun 2021 persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kegiatan monitoring dan *surveillans* keamanan produk hewan difokuskan pada produk pangan segar asal hewan. Perubahan target ini sejalan dengan pembagian kewenangan pengawasan pangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, yang mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan untuk pangan segar. Hal ini juga mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang mengamanatkan indikator program untuk Kementerian Pertanian adalah persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. Pada tahun 2020 masih dilakukan pengambilan sampel produk pangan segar asal hewan dan pangan olahan, terutama produk susu, sehingga capaian realisasi Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, hal ini juga sejalan dengan adanya proses pengolahan pada pangan olahan, sehingga cemaran akibat pertumbuhan mikroba yang terdapat dalam produk hewan olahan dapat diminimalisir.

Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Grafik 4.





Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, 2021

Grafik 4. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2016-2021

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan didukung oleh kegiatan dan KRO sebagaimana tercantum dalam Tabel 25 dengan nilai efisiensi sebesar **63,77%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 25. Kegiatan Pendukung IKU 4 Tahun 2021

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	FISIK			KEUANGAN		CRO per KRO $\frac{CRO}{\sum CRO} \times 100$	(AAKRO x CRO) - RAKRO	$E = \frac{\sum ((AAKRO \times (\sum CRO)^{\frac{1}{2}})) - RAKRO}{\sum AAKRO}$	$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$
	TVRO	RVRO	CRO: RVRO / TVRO	AAKRO: Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	RAKRO: Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output				
IKU 4 Persentase Pangan Segar Asal Hewan Yang Memenuhi Syarat Kemanan Dan Mutu Pangan									
1786.AEA Koordinasi									
001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kegiatan)	6	6	100%	8.197.085.000	7.835.438.379	100%	361.646.621	5,51%	63,77%
101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (PEN) (Kegiatan)	1	1	100%						
1786.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria									
001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner (NSPK)	6	6	100%	993.100.000	988.920.000	100%	4.180.000		
1786.PDF Sertifikasi Lembaga									
001 Sertifikasi Unit Usaha (Lembaga)	110	107	97%	10.437.912.000	10.111.730.807	99%	182.862.099		
101 Sertifikasi Unit Usaha (PEN) (Lembaga)	33	33	100%						
1786.QJA Penyidikan dan Pengujian Produk									
001 Mutu dan Keamanan Produk Hewan (Produk)	12.459	13.931	112%	21.372.583.000	20.869.339.236	106%	1.709.280.744		
101 Mutu dan Keamanan Produk Hewan (PEN) (Produk)	2.656	2.651	100%						
JUMLAH				41.000.680.000	39.805.428.422		2.257.969.464		

Sumber: Ditjen PKH, 2021

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha poduk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan.



Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2021 antara lain: meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada unit usaha produk hewan untuk penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan sehingga produk hewan yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya, serta meningkatkan peran pengawas kesmavet di provinsi/kabupaten/kota serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.

Adapun upaya-upaya tindak lanjut di tahun 2022 antara lain:

- 1) Memfokuskan arah dan rekomendasi pembinaan unit usaha berdasarkan analisis data hasil kegiatan monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan;
- 2) Melibatkan pengawas kesmavet dalam kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan sehingga secara efektif melakukan langkah-langkah tindak lanjut perbaikan penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan;
- 3) Mengajak keterlibatan *stakeholders* terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV serta meningkatkan peran dan kapasitas laboratorium kesmavet di daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan keamanan produk hewan.

Sasaran Program 3 (SP3)

MENINGKATNYA LUAS WILAYAH YANG TERKENDALI KASUS ZONOSIS

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat karena merupakan rantai penghubung antara Bidang Kesehatan Hewan dan kesehatan manusia yang berkaitan dengan pengobatan, pengendalian dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui hewan (*zoonosis*) serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (*foodborne diseases*), dalam hal ini pangan yang berasal dari hewan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012, Kesehatan Masyarakat Veteriner didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian *zoonosis*, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian No. 237 Tahun 2019 tentang Penetapan *Zoonosis* Prioritas, dimana tiga diantaranya merupakan prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, meliputi: *Avian Influenza*, *Rabies*, dan *Anthrax*.

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan pencegahan dan pengendalian *zoonosis* adalah persentase wilayah yang terkendali dari *zoonosis*, wilayah terkendali adalah provinsi yang tidak terjadi kasus atau mengalami penurunan *zoonosis* pada manusia.



SP3. IKU5	
Persentase Wilayah Yang Terkendali Zoonosis	
Target 74%	Realisasi 88%
% Capaian 118,92% (Sangat Berhasil)	

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis dilihat dari status wilayah terhadap kasus penyakit *Rabies* dan *Anthrax* pada tahun 2021 dibandingkan dengan kasus di tahun 2020. Cara penghitungannya yaitu jumlah provinsi yang terkendali dibagi seluruh jumlah provinsi dikalikan 100%.

Tabel 26. Status Wilayah Terhadap Kasus Penyakit *Rabies* dan *Anthrax* Tahun 2021 Dibandingkan Kasus Tahun 2020

NO	PROVINSI	Kasus Tahun		status wilayah <i>Rabies</i>	Kasus Tahun		status wilayah <i>Anthrax</i>
		2020	2021		2020	2021	
1	Aceh	0	0	terkendali	0	0	terkendali
2	Bali	2	0	terkendali	0	0	terkendali
3	Bangka Belitung	0	0	terkendali	0	0	terkendali
4	Banten	0	0	terkendali	0	0	terkendali
5	Bengkulu	0	0	terkendali	0	0	terkendali
6	DI Yogyakarta	0	0	terkendali	3	0	terkendali
7	DKI Jakarta	0	0	terkendali	0	0	terkendali
8	Gorontalo	1	0	terkendali	24	0	terkendali
9	Jambi	0	0	terkendali	0	0	terkendali
10	Jawa Barat	0	0	terkendali	0	0	terkendali
11	Jawa Tengah	0	0	terkendali	0	1	tidak terkendali
12	Jawa Timur	0	0	terkendali	1	8	tidak terkendali
13	Kalimantan Barat	2	5	tidak terkendali	0	0	terkendali
14	Kalimantan Selatan	0	0	terkendali	0	0	terkendali
15	Kalimantan Tengah	0	0	terkendali	0	0	terkendali
16	Kalimantan Timur	0	0	terkendali	0	0	terkendali
17	Kalimantan Utara	0	0	terkendali	0	0	terkendali
18	Kepulauan Riau	0	0	terkendali	0	0	terkendali
19	Lampung	1	1	terkendali	0	0	terkendali
20	Maluku Utara	0	0	terkendali	0	0	terkendali
21	NTB	6	7	tidak terkendali	0	0	terkendali
22	NTT	5	3	terkendali	8	0	terkendali
23	Papua	0	0	terkendali	0	0	terkendali
24	Papua Barat	0	0	terkendali	0	0	terkendali
25	Riau	4	0	terkendali	0	0	terkendali
26	Sulawesi Barat	0	1	tidak terkendali	0	0	terkendali
27	Sulawesi Selatan	4	0	terkendali	0	0	terkendali
28	Sulawesi Tengah	1	1	terkendali	0	0	terkendali
29	Sulawesi Tenggara	0	0	terkendali	0	0	terkendali
30	Sulawesi Utara	7	9	tidak terkendali	0	0	terkendali
31	Sumatera Barat	2	0	terkendali	0	0	terkendali
32	Sumatera Selatan	2	2	terkendali	0	0	terkendali
33	Sumatera Utara	1	3	tidak terkendali	0	0	terkendali



NO	PROVINSI	Kasus Tahun		status wilayah <i>Rabies</i>	Kasus Tahun		status wilayah <i>Anthrax</i>
		2020	2021		2020	2021	
34	Maluku	2	2	Tidak terkendali	0	0	terkendali

Hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase wilayah yang terkendali *zoonosis* dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Capaian Indikator Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis*

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	74,00	74,50	75,00	76,00	118,92	-	115,79
Realisasi IKSP (%)	-	88,00	-	-	-			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Pada tabel 27 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* pada tahun 2021 adalah 88% jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 74%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* sebesar 118,92% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* merupakan indikator kinerja baru pada Tahun 2021, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target atau realisasi tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* tahun 2021 sebesar 88%, jika dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 76%, maka saat ini sudah mencapai 115,79%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Strategi pencegahan penularan *zoonosis* dilakukan melalui koordinasi intens antar kelembagaan terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan penularan *zoonosis*. Ditjen PKH melalui Fungsi Direktorat Kesmavet memperkuat strategi ini melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan penularan *zoonosis* dari hewan ke manusia dilakukan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun penguatan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli *zoonosis*. Dengan demikian, Direktorat Kesmavet berperan penting dalam mengkomunikasikan upaya pentingnya pencegahan *zoonosis* baik kepada pemangku kepentingan terkait maupun kepada masyarakat.



2. Pencegahan penularan *zoonosis* dari produk hewan ke manusia dilakukan melalui penerapan strategi penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* di Rumah Potong Hewan (RPH). Selain itu pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari kegiatan *surveilans* pengendalian penyakit hewan, khususnya *zoonosis*.

Status wilayah terhadap kasus penyakit *Rabies* dan *Anthrax* pada tahun 2021 dibandingkan dengan kasus di tahun 2020 selengkapnya di Lampiran 7.

Secara keseluruhan jumlah wilayah terkendali *zoonosis* pada manusia pada tahun 2021 adalah 88%, yang meliputi jumlah persentase wilayah yang terkendali *Rabies* 82% dan *Anthrax* 94%. Provinsi yang mengalami kenaikan kasus *Rabies* diantaranya Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara, sedangkan yang mengalami peningkatan adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Faktor yang menyebabkan masih terjadinya *Rabies* di beberapa wilayah diantaranya rendahnya cakupan vaksinasi pada anjing sehingga *Rabies* masih bersirkulasi, anjing liar sulit untuk divaksinasi dan tidak dipelihara oleh pemilik maupun komunitas, pemilik anjing yang tidak bertanggung jawab sehingga anjingnya tidak vaksin dan korban gigitan tidak mendapatkan penanganan *Rabies*, yang meliputi mencuci luka gigitan dengan sabun dan pemberian Vaksin Anti *Rabies* (VAR), apabila orang tidak teredukasi maka tidak mengetahui cara penanganan apabila terkena gigitan, selain itu sulitnya mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan juga menjadi faktor daerah tetap menjadi endemis.

Adapun faktor yang menjadi pemicu terjadinya *Anthrax* di wilayah baru diantaranya adanya introduksi ternak *Anthrax* dari daerah tertular ke daerah baru dan kurangnya pemahaman peternak maupun pejagal tentang bahaya *Anthrax*, sehingga dilakukan pemotongan dan penanganan daging yang terinfeksi *Anthrax*, selain itu rendahnya vaksinasi *Anthrax* pada ternak juga menyebabkan ternak terinfeksi.

Perlu adanya peningkatan pemahaman kepada masyarakat melalui KIE tentang pentingnya bahaya *Anthrax* dalam rangka mencegah penularan *Anthrax* dari hewan kepada manusia.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* didukung oleh kegiatan dan KRO sebagaimana tercantum dalam Tabel 28 dengan nilai efisiensi sebesar **61,93%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.



Tabel 28. Kegiatan Pendukung IKU 5 Tahun 2021

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	FISIK			KEUANGAN		CRO per KRO $\frac{CRO}{\sum(CRO)}$	(AAKRO x CRO) - RAKRO	$E = \frac{\sum((AAKRO \times (\sum(CRO))^{\frac{1}{20}}) - RAKRO)}{\sum(AAKRO)}$	$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$
	TVRO	RVRO	CRO: RVRO / TVRO	AAKRO: Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	RAKRO: Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output				
IKU 6 Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Zoonosis									
1786.AEA Koordinasi									
001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kegiatan)	6	6	100%	8.197.085.000	7.835.438.379	100%	361.646.621	4,77%	61,93%
101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (PEN) (Kegiatan)	1	1	100%						
1786.AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria									
001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner (NSPK)	6	6	100%	993.100.000	988.920.000	100%	4.180.000		
1786.QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat									
001 Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan (Orang)	1.326	1.496	113%	783.073.000	773.455.205	113%	110.011.789		
JUMLAH				9.973.258.000	9.597.813.584		475.838.390		

Sumber: Ditjen PKH, 2021

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian *zoonosis*, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan *Zoonosis* Prioritas, dimana tiga diantaranya merupakan prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, yang salah satunya meliputi *Rabies* dan *Anthrax* dengan memperkuat strategi ini melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Analisis Risiko Bersama

Koordinasi dan kolaborasi antara lintas sektor antara kementerian dan pemangku kebijakan terkait yang bertanggungjawab dalam aspek kesehatan manusia, kesehatan masyarakat dan lingkungan. Analisis risiko meliputi opsi manajemen dan komunikasi risiko serta tersedianya rekomendasi. Melalui analisis risiko ini manajemen risiko dan komunikasi dilakukan antar sektor dan terpadu, dengan berdasarkan kajian ilmiah.

2. Pemeriksaan kesehatan hewan (*ante-mortem*) dan pemeriksaan kesehatan jeroan serta karkas (*post-mortem*).

Pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan jeroan serta daging, berperan penting dari pemantauan *zoonosis* dan penyakit hewan menular, karena sebagian besar hewan ternak akan dipotong di RPH, pemeriksaan ini elemen yang signifikan dalam rantai pangan asal hewan, dimana data klinis, patologi, kontaminasi kimia dapat tersedia dan terukur. Pemeriksaan ini juga berkontribusi dalam deteksi dini *hazard* (bahaya) yang berdampak pada kesehatan manusia, maupun kesehatan dan kesejahteraan hewan.

3. Pemetaan *Zoonosis*

Pemetaan *zoonosis* dalam menjamin keamanan pangan untuk memahami konsentrasi bahaya (*hazard*) pada tahapan rantai pangan asal hewan yang berdampak pada risiko kesehatan manusia. Bahaya pada pemetaan ini meliputi *Zoonotik-Tuberculosis* (zTB), *Mycobacterium Bovis* pada sapi dan *Toxoplasma gondii* pada kambing.



4. Pembentukan Kader Siaga *Rabies* (Kasira)

Sebagai upaya mendorong pembebasan *Rabies* berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia, Direktorat Kesmavet Ditjen PKH telah menginisiasi pembentukan Kasira di 5 (lima) kabupaten dan kota di wilayah Pulau Sumbawa dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten, diharapkan di tahun mendatang Kasira dapat direplikasi di wilayah-wilayah endemis dan berisiko tinggi di Indonesia. Keberadaan Kasira ini diharapkan mampu mempercepat proses pelaporan kasus dan respon, meningkatkan cakupan vaksinasi anjing, memperluas penyebaran informasi serta meningkatkan pengetahuan sikap dan praktik masyarakat dalam pengendalian *Rabies*. Selain itu keberadaan Lembaga Kasira diharapkan mampu meningkatkan sinergitas unsur Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Puskesmas dan instansi terkait dalam meningkatkan motivasi dan komitmen kader serta mendorong melalui konsep *One Health* sehingga strategi pengendalian *Rabies* dapat dilaksanakan secara efektif.

5. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Pencegahan dan pengurangan risiko *zoonosis* dilakukan melalui komunikasi risiko yang meliputi: pemberian informasi kepada masyarakat tentang risiko penanggulangan, pemberian informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk melindungi mereka selama penanggulangan *zoonosis*. Sasaran utama komunikasi risiko adalah masyarakat dan pihak-pihak terkait yang berisiko terhadap situasi kegawatdaruratan kesehatan.

6. Pencegahan penularan *zoonosis* dari hewan ke manusia dilakukan melalui KIE kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun penguatan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli *zoonosis*. Dengan demikian, Ditjen PKH berperan penting dalam mengomunikasikan pencegahan *zoonosis* baik kepada pemangku kepentingan terkait maupun kepada masyarakat.

7. Pencegahan penularan *zoonosis* dari produk hewan ke manusia dilakukan melalui penerapan strategi penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui pemeriksaan *antemortem* dan *post-mortem* di RPH. Selain itu pemeriksaan *antemortem* dan *post-mortem* memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari kegiatan *surveillans* pengendalian penyakit hewan, khususnya *zoonosis*.

8. Melaksanakan program penanggulangan penyakit dilakukan di wilayah-wilayah prioritas dengan melakukan vaksinasi massal tertarget.

9. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemahaman nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit melalui KIE.

10. Meningkatkan pelaksanaan *surveillans* untuk deteksi dini melalui *surveillans* terintegrasi dengan Sektor Kesehatan.

11. Melakukan identifikasi wilayah-wilayah berisiko lalu lintas hewan dari lokasi tertular dengan tujuan meningkatkan pengawasan lalu lintas antar daerah dengan melibatkan instansi terkait.



12. Monitoring pelaporan tanda klinis dan sindrom penyakit hewan yang dilaporkan oleh petugas kesehatan hewan melalui Informasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

Sasaran Program 4 (SP4)

MENINGKATNYA LUAS WILAYAH YANG TERKENDALI DARI PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

Berdasarkan UU No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik. Selain itu, berdasarkan Kepmentan No. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis, bahwa dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk dan menyebarnya penyakit hewan, perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular. Pada tahun 2021, Ditjen PKH memprioritaskan Pengendalian Hewan Menular Strategis pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, dan *Hog Cholera* (RABAH).

Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis *Zoonosis* (PHMSZ) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih difokuskan pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, dan *Hog Cholera* (RABAH). Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat *zoonosis* atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja wilayah terkendali PHMSZ didapat dari rata-rata Angka Kesehatan Hewan (AKH) 402 kabupaten/kota di 34 Provinsi dengan hasil 80,7%.

SP4. IKU6	
Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target 80,5%	Realisasi 80,7 %
% Capaian 100,25% (Sangat Berhasil)	



Cara perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah Identifikasi total wilayah yang terkendali dari PHMS (kabupaten/kota) (a) dibagi dengan Identifikasi total wilayah yang terdampak PHMS (kabupaten/kota) (b), dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Kegiatan pengendalian di 402 kabupaten/kota terhadap 5 PHMS yaitu *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza (AI)* dan *Hog Cholera* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29. Kegiatan Pengendalian PHMS Tahun 2021

No	Penyakit	Jumlah Kabupaten Kota	Jumlah Terkendali
1	<i>Anthrax</i>	113	99
2	<i>AI</i>	261	182
3	<i>Brucellosis</i>	253	226
4	<i>Hog Cholera</i>	53	47
5	<i>Rabies</i>	156	121
	Total	836	675

Hasil perhitungan: $675/836 \times 100\% = 80,7\%$

Hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Hasil perhitungan Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	80,00	80,50	80,50	81,00	81,00	100,25	100,86	99,63
Realisasi IKSP (%)	80,01	80,7	-	-	-			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Pada tabel 30 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS pada tahun 2021 adalah 80,70% jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 80,50%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 100,25% atau masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**. Penghitungan Persentase wilayah terkendali PHMS berdasarkan pada Angka Kesehatan Hewan di 404 Kabupaten/kota di 34 Provinsi. Data status kesehatan hewan per provinsi tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 8.



b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Pada Tabel 30 dapat dilihat bahwa capaian realisasi Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 80,01% adalah mencapai 100,86%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Pada Tabel 30 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 81,00%, maka realisasi capaian tahun 2021 mencapai 99,63%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Ditjen PKH Dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS tahun 2021 sebesar 80,7% telah melebihi target Kementerian Pertanian yaitu 80,50% atau masuk dalam kategori “**sangat berhasil**” dengan capaian sebesar 100,25%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian realisasian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS, diantaranya disebabkan:

1. Pelaksanaan *surveillans* ke wilayah tertarget yang dilakukan oleh 8 (delapan) UPT Veteriner yaitu: Balai Veteriner Medan, Balai Veteriner Bukittinggi, Balai Veteriner Lampung, Balai Veteriner Banjarbaru, Balai Besar Veteriner Maros, Balai Besar Veteriner Wates, Balai Besar Veteriner Denpasar, serta Balai Veteriner Subang. Target awal *surveillans* sebesar 86.596 sampel dan setelah ada refocusing maka target berubah menjadi 77.684 sampel, terealisasi sebesar 95.330 sampel. Kegiatan *surveillans* untuk penyakit *Rabies* sebanyak 9.000 sampel dengan rincian dari alokasi reguler sebesar 84.990 dan alokasi dana PEN sebesar 4.270 sampel.
2. Pencegahan dan pengamanan penyakit dengan target 2.196.000 dosis terealisasi sebanyak 2.313.492 dosis (105,35%) dengan rincian obat dan vaksin antara lain *Rabies, AI, Anthrax, ASF, Brucellosis, dan Hog Cholera*.
3. Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner pada tahun 2021 sebanyak 1.026 orang, dengan rincian 575 orang Dokter Hewan, 119 orang S1 Paramedik, 194 orang D3 Paramedik dan 138 orang SMA Paramedik. Pada akhir Oktober terjadi perubahan dikarenakan adanya penerimaan CPNS dan PPPK, sehingga jumlah *existing* sebanyak 292 orang Dokter Hewan, dan 257 orang sebagai Paramedik.

Adanya tenaga kesehatan hewan memiliki andil besar dalam pencegahan kematian ternak, terutama petugas Puskesmas dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kesehatan Hewan. Kegiatan pengobatan yang dilaporkan oleh THL pada tahun 2021 terhadap



550.269 ekor ternak, penanganan cacangan pada ternak yang telah dilaksanakan oleh THL pada tahun 2021 sebanyak 29.173 ekor.

4. Kegiatan Kompartementalisasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Pada tahun 2021, telah menerbitkan Sertifikat Kompartemen bebas AI sebanyak 84 unit yang terdiri dari 9 (Sembilan) unit Peternakan *Grand Parent Stock* (GPS), 37 unit *Parent Stock* (PS), 21 unit *Final Stock* (FS) dan 17 unit *hatchery*. Unit usaha peternakan tersebut tersebar di 13 provinsi.
5. Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - a. Pengendalian Penyakit *Rabies*
 - 1) Vaksinasi *Rabies* di 29 provinsi sebanyak 851.608 dosis
 - 2) Program penanggulangan *Rabies* dilakukan di wilayah-wilayah prioritas dengan melakukan vaksinasi massal dengan target melakukan vaksinasi pada 100% anjing pada basis desa secara serentak dengan durasi waktu pelaksanaan yang cepat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemahaman nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian dan pemberantasan *Rabies* melalui KIE, meningkatkan pelaksanaan surveilans untuk deteksi dini melalui surveilans terintegrasi dengan sektor kesehatan dengan implementasi tata laksana kasus gigitan (takgit), melakukan identifikasi wilayah-wilayah berisiko lalu lintas anjing dari lokasi tertular dengan tujuan meningkatkan pengawasan lalu lintas antar daerah dengan melibatkan instansi terkait. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut perlu dibahas lebih lanjut mengenai keterbatasan anggaran dan sumber daya yang diperlukan serta kontribusi daerah dalam pelaksanaan program.
 - b. Pengendalian Penyakit *Avian Influenza* (AI)
 - 1) Pada tahun 2021 telah dikeluarkan sertifikasi bebas AI pada perusahaan peternakan skala menengah dan besar yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, serta Sulawesi Selatan.
 - 2) Penerapan kegiatan biosekuriti dan kompartementalisasi bebas penyakit AI pada peternakan unggas,
 - 3) Pelaksanaan vaksinasi AI tertarget pada wilayah tertular dan perbatasan untuk mencegah penyebaran penyakit AI sebanyak 1.195.000 dosis.
 - c. Pengendalian Penyakit *Brucellosis*
 - 1) Pengendalian penyakit *Brucellosis* dilaksanakan pada wilayah yang tertular dan pada wilayah pembebasan dengan melakukan *surveilans* dengan prevalensi penyakit diatas 0,2% dilakukan program vaksinasi dengan vaksin *Brucellosis*, sedangkan prevalensi bawah 0,2% dilakukan kegiatan test dan potong bersyarat (*test & slaughter*).
 - 2) Melakukan vaksinasi *Brucellosis* sebanyak 39.200 dosis untuk mendukung Kegiatan Gangguan Reproduksi dan program nasional SIKOMANDAN.



d. Pengendalian Penyakit *Anthrax*

Dalam upaya pengendalian penyakit *Anthrax* dilakukan kegiatan vaksinasi sebanyak 31.000 dosis dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular untuk mengurangi penyebaran *Anthrax* ke wilayah/daerah sekitar.

e. Pengendalian Penyakit *Hog Cholera*

Dalam upaya pengendalian penyakit *Hog Cholera* dilakukan vaksinasi sebanyak 7.000 dosis di wilayah tertular yaitu di Provinsi Bali, Sumatera Utara, Nias, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, perbatasan Riau, perbatasan DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS didukung oleh kegiatan dan KRO sebagaimana tercantum dalam Tabel 31 dengan nilai efisiensi sebesar **52,91%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 31. Kegiatan Pendukung IKU 6 Tahun 2021

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	FISIK			KEUANGAN		CRO per KRO $\frac{CRO}{\sum CRO} \times 100\%$	(AAKRO x CRO) - RAKRO	$E = \frac{\sum ((AAKRO \times (\sum CRO)^{\frac{1}{2}}) - RAKRO)}{\sum (AAKRO)}$	$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$		
	TVRO	RVRO	CRO: RVRO / TVRO	AAKRO: Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	RAKRO: Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output						
IKU 5 Presentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis											
1784.AEA Koordinasi											
001)Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	7	7	100%	6.561.472.000	5.715.321.161	100%	846.150.839	1,16%	52,91%		
101)Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan (PEN)	1	1	100%								
1784.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
001)Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	7	7	100%	29.233.734.000	28.723.589.598	100%	508.144.402				
101)Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan (PEN)	1	1	100%								
1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya											
001)Pelayanan Kesehatan Hewan	151	151	100%	133.250.021.000	131.387.094.581	100%	1.662.926.419				
002)Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologi	1	1	100%								
003)Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	65	65	100%								
101)Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN)	10	10	100%								
102)Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologi (PEN)	1	1	100%								
103)Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan (PEN)	8	8	100%								
1784.QJA Penyidikan dan Pengujian Produk											
001)Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	1.650	1.650	100%	10.810.989.000	10.799.695.277	100%	11.303.723				
101)Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (PEN)	50	50	100%								
JUMLAH				144.061.020.000	142.306.789.858		1.674.230.142				

Sumber: Ditjen PKH, 2021

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja persentase wilayah yang terkendali PHMS, antara lain:

1. Pemberian anggaran untuk obat dan vaksin serta operasional vaksinasi melalui dana Tugas Pembantuan serta penyediaan bahan pengendalian sebagai stok pusat dalam keadaan wabah.
2. Pelaksanaan *surveillans* tertarget oleh 8 UPT Veteriner.
3. Produksi Obat dan Vaksin oleh Pusvetma.
4. Pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan dalam rangka penjaminan mutu obat hewan.
5. Pengawasan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan dan penerapan *biosecurity*.



6. Pengawasan Obat Hewan.
7. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi dan fasilitasi Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner di Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya.
8. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan dan kapasitas laboratorium veteriner.

Sasaran Program 5 (SP5)

TERMANFAATKANNYA SARANA PERTANIAN SESUAI KEBUTUHAN

Transformasi ke arah Peternakan Modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan teknologi, serta mampu menghasilkan *output* berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi.

Dalam penyediaan pangan asal ternak bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dibutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis. Namun dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, adanya keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah maupun pusat menyebabkan terbatasnya penyediaan fasilitas tersebut di Indonesia.

SP5. IKU7	
Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 91,25%	Realisasi 98,42%
% Capaian 107,86% (Sangat Berhasil)	

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana peternakan (sarana kesmavet, sarana kesehatan hewan, sarana perbibitan dan produksi ternak, dan sarana pakan), maka dilakukan survei terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan/termanfaatkan sesuai dengan tujuannya.

Tingkat kemanfaatan sarana prasarana Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Pakan Olahan dilakukan dengan monitoring ke kelompok penerima manfaat menggunakan kuisisioner, sedangkan tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesmavet serta perbibitan dan produksi ternak menggunakan kuesioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang Menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menerima bantuan. Khusus untuk tingkat kemanfaatan sarana-prasarana laboratorium kesehatan hewan dilakukan menggunakan kuesioner dengan menggunakan beberapa parameter penilaian berupa: kelengkapan administrasi, pengendalian dan pembinaan, serta pemeliharaan) dan didistribusikan ke 8 (delapan) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Veteriner. Jenis sarana-



prasarana dapat dilihat pada Lampiran 9 dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Alsintan yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel Alsintan (Unit)	Alsintan Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Direktorat Pakan				
Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	30	30	30	100,00%
Sarana Prasarana Pakan Olahan	2	2	2	100,00%
Direktorat Perbibitan dan Produksi ternak				
Container Semen Beku	1502	1502	1502	100,00%
Direktorat Keswan				
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	349	349	349	92,10%
Direktorat Kesmavet				
Sarana Prasarana RPH	1	1	1	100,00%
Rata-rata Tingkat Kemanfaatan				98,42%

Sumber: Hasil perhitungan dari Kuesioner yang dibagikan ke Responden yang diolah oleh Direktorat lingkup Ditjen PKH

Realisasi capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	91,25	92,25	93,50	94,50	107,86	103	104,15
Realisasi IKSP (%)	95,69	98,42	-	-	-			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Pada tabel 33 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021 sebesar 98,42% jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 91,25%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 107,86% atau masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Pada tabel 33 dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021 sebesar 98,42%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 95,69%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 103%.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Pada tabel 33 dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 94,5%, maka realisasi capaian tahun 2021 mencapai 104,15%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021 sebesar 98,42% atau mencapai 113,53% apabila dibandingkan dengan target Kementerian Pertanian sebesar 86,69%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya:

1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) merupakan salah satu mata rantai dalam penyediaan daging bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Namun saat ini masih banyak RPHR khususnya milik pemerintah yang belum memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, hal tersebut karena keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan di daerah yang menyebabkan terbatasnya penyediaan biaya pemeliharaan dan perbaikan RPHR.

Dalam rangka upaya penjaminan keamanan daging ASUH tersebut, maka diberikan bantuan anggaran pada RPHR berupa pembangunan, renovasi dan fasilitasi peralatan. Bantuan tersebut juga digunakan untuk memfasilitasi tempat pemotongan hewan kurban mengingat setiap tahun jumlah pemotongan kurban di daerah juga semakin meningkat.

Pada tahun 2020, fasilitasi prasarana dan sarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan hanya 1 lokasi yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan berupa fasilitasi perbaikan dan peralatan RPHR Kota Makassar.

Berdasarkan tingkat kemanfaatan sarana prasana Kesmavet maka penghitungan dilakukan berdasarkan kemanfaatan fasilitasi prasarana sarana yang diberikan pada tahun 2020 yaitu fasilitasi perbaikan dan peralatan RPHR Kota Makassar.

Tingkat kemanfaatan sarana prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner tahun 2020 terealisasi 100%, dengan capaian kinerja 108,70% dari target 92%. RPHR Kota Makassar beserta peralatannya sudah digunakan untuk melakukan pemotongan ternak ruminansia besar.





Sumber: Ditjen PKH, 2021

Gambar 1. Pematongan sapi di RPHR Kota Makassar

2) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan Hewan

Efektivitas pengelolaan laboratorium secara umum dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai standar.

Kemanfaatan sarana prasarana laboratorium diperoleh dengan distribusi kuisioner ke 8 (delapan) UPT Veteriner dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut:

Tabel 34. Perhitungan Kemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium

Parameter		Kriteria	Score (YA=10/TIDAK=0)	Rata-rata
Kelengkapan Administrasi				
1	Ada Spek dan data dukung pengadaan	Ya/Tidak	10	10
2	Ada SK Pengawasan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	7
3	Ada Dokumen pengelolaan (pembukuan penggunaan) Alat Lab dan pemanfaatannya	Ya/Tidak	10	10
Pengendalian				
4	Ada SOP Mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	10
5	Ada Pengawasan Kelayakan dan Pemanfaatan Alat Laboratorium Berkala	Ya/Tidak	10	10
6	Ada Laporan Pemanfaatan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	10
7	Ada Mekanisme Realokasi Alat Laboratorium yang tidak dimanfaatkan secara optimal	Ya/Tidak	10	7
8	Ada Database Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	10
Pembinaan dan Pemeliharaan				
9	Ada pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan	Ya/Tidak	10	10
10	Ada pelatihan untuk operator	Ya/Tidak	10	10
			Rata-rata	92,1

Sumber: Ditjen PKH, 2021

Alat laboratorium yang dinilai kemanfaatannya adalah alat yang digunakan di 7 (tujuh) bagian laboratorium yaitu Virologi, Bakteriologi, Parasitologi, Bioteknologi, Serologi, Patologi dengan jumlah peralatan laboratorium sebanyak 349 unit dengan hasil penilaian 92,1% masih dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan dengan baik.

3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana perbibitan dan produksi ternak tahun 2021 maka dilakukan identifikasi jumlah sarana berupa kontainer di provinsi. Kontainer tersebut digunakan untuk mendistribusikan semen beku dalam mensukseskan kegiatan SIKOMANDAN. Dalam rangka pendistribusian semen beku tahun 2020 telah dialokasikan bantuan berupa kontainer sejumlah 281 unit.

Untuk mengukur capaian Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana peternakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Perhitungan tingkat kemanfaatan, diukur menggunakan metode survei melalui kuesioner dengan sampel penerima bantuan sebanyak 38% atau 13 provinsi dari 34 provinsi. Klasifikasi penilaian bantuan yang memanfaatkan sebagai berikut:

- a) 100 jika jawaban ya mencapai 91% s.d 100%
- b) 90 jika jawaban ya mencapai 81% s.d 90%
- c) 80 jika jawaban ya mencapai 71% s.d 80%
- d) 70 jika jawaban ya mencapai 61% s.d 70%
- e) 60 jika jawaban ya mencapai 51% s.d 60%

Dari sampling yang dilakukan, diketahui bahwa semua bantuan sarana prasarana yang disalurkan telah dimanfaatkan seluruhnya atau 100%, sehingga capaiannya mencapai 111% atau **sangat berhasil**.

Tabel 35. Tingkat Kemanfaatan Saprass Perbibitan dan Produksi Ternak

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Capaian
1	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak	90	100	111,11	Sangat Berhasil

Sumber: Ditjen PKH, 2021

4) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pakan

Capaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana pakan olahan tahun 2020 diperoleh dari pemanfaatan sarana pakan olahan tahun 2020 melalui kegiatan Bank Pakan pada kelompok:

- (1) Bumbang Wetan yang berlokasi di Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan kelompok Sido Makmur 3 yang berlokasi di Desa Sidomukti Kec. Tanjungsari Kab. Lampung Selatan Lampung. Sarana pakan di kelompok Bumbang Wetan dimanfaatkan untuk memproduksi silase, dan
- (2) Sido Makmur 3 dimanfaatkan untuk produksi konsentrat sapi potong.

Capaian kinerja kemanfaatan sarana Hijauan Pakan Ternak (HPT) tahun 2020 diperoleh dari 30 kelompok yang tersebar di provinsi sebagai berikut:



- (1) Merta Nadi berlokasi di Desa Tengkidak, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali.
- (2) Suka Mekar Lestari di Desa Bukit Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali.
- (3) Al-Hikmah berlokasi di Desa Bukit Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali.
- (4) Bukit Sari berlokasi di Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, Bali.
- (5) Muja Mekar berlokasi di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali.
- (6) Gunung Putih Berjaya di Desa Gunung Putih, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara.
- (7) Tunas Baru di Desa Gunung Putih, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara.
- (8) Maspul Jaya di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara.
- (9) Mekar Lestari di Desa Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara.
- (10) Harapan Mandiri di Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara.
- (11) Ngudi Mulyo di Desa Kujau, Kec. Betayau Kab. KTT, Kalimantan Utara.
- (12) Suka Maju di Desa Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kab. Tarakan, Kalimantan Utara.
- (13) Harapan Sejahtera di Desa Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kab. Tarakan, Kalimantan Utara.
- (14) Sejahtera di Desa Malinau Hilir, Kec. Malinau Hilir, Kab. Malinau, Kalimantan Utara.
- (15) Usaha Mandiri di Desa Malinau, Kec. Malinau, Kab. Malinau, Kalimantan Utara.
- (16) Lestari di Desa Malinau Hilir, Kec. Malinau Hilir, Kab. Malinau, Kalimantan Utara.
- (17) Mapalus berlokasi di Desa Leleoto, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara.
- (18) Maju Jaya di Desa Daka Ino, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, Maluku Utara.
- (19) Talenta di Desa Tataleka, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara.
- (20) Berkat Yakin di Desa Pulau beralo, Kec. Kuantan Hilir Sebrang, Kab. Kuansing, Riau.
- (21) Al Muhajirin di Desa Pulau Pematang, Kec. Pangean, Kab. Kuansing, Riau.
- (22) KPIB Karya Bersama di Ds. Kuantan Babu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, Riau.
- (23) Serumpun Jaya di Desa Redang, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau.
- (24) Barokah di Desa Bunut Lembah Subur, Kec. Krumutan, Kab. Pelalawan, Riau.
- (25) Sumber Rezeki di Desa Pangkalan Kuras, Kec. Sidomukti, Kab. Pelalawan, Riau.
- (26) Tunas Harapan di Desa Merangkai, Kec. Dayun, Kab. Siak, Riau.
- (27) Tembesu di Desa Dayun, Kec. Dayun, Kab. Siak, Riau.
- (28) Sabar Jaya berlokasi di Desa Pasiran, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, Riau.
- (29) Ekonomi Sejahtera di Desa Prapat Tunggal, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau.
- (30) Eka Makmur di Desa Mesuji Raya, Kec. Mataram Jaya, Kab. OKI Sumatera Selatan.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung oleh kegiatan dan KRO sebagaimana tercantum dalam Tabel 36 dengan nilai efisiensi sebesar **59,86%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 36. Kegiatan Pendukung IKU 7 Tahun 2021

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	FISIK			KEUANGAN		CRO per KRO [(CRO) ^(1/2)]	(AAKRO x CRO) - RAKRO	$E = \frac{\sum((AAKRO \times (CRO)^{(1/2)})) - RAKRO}{\sum(AAKRO)}$	NE = 50% + ($\frac{E}{20} \times 50$)
	TVRO	RVRO	CRO: RVRO / TVRO	AAKRO: Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	RAKRO: Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output				
IKU 7 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan									
1783.QEG Bantuan Peralatan / Sarana									
001 Hewan Pakan Temak (Unit)	15	15	100%	99.935.493.000	97.811.387.179	100%	2.124.105.821	3,94%	59,86%
002 Pakan Olahan dan bahan pakan (Unit)	13	13	100%						
101 Hewan Pakan Temak (PEN) (Unit)	4	4	100%						
102 Pakan Olahan Dan Bahan Pakan (PEN) (Unit)	29	29	100%						
1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya									
001 Pelayanan Kesehatan Hewan	151	151	100%	133.250.021.000	131.587.094.581	100%	1.662.926.419	3,94%	59,86%
002 Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologi	1	1	100%						
003 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	65	65	100%						
101 Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN)	10	10	100%						
102 Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologi (PEN)	1	1	100%						
103 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan (PEN)	8	8	100%						
1785.QEH Bantuan Kelompok Masyarakat									
001 Optimalisasi Reproduksi (Kelompok Masyarakat)	1.204.220	1.204.220	100%	755.762.613.000	702.350.535.545	98%	39.581.042.363	3,94%	59,86%
002 Temak Ruminansia Perah (Kelompok Masyarakat)	13	13	100%						
003 Temak Ruminansia Potong (Kelompok Masyarakat)	21	21	100%						
004 Temak Unggas dan Aneka Temak (Kelompok Masyarakat)	16	16	100%						
101 Optimalisasi Reproduksi (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.481.921	2.586.920	120%						
102 Temak Ruminansia Perah (PEN) (Kelompok Masyarakat)	6	5	83%						
103 Temak Ruminansia Potong (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.045	943	90%						
104 Temak Unggas Dan Aneka Temak (PEN) (Kelompok Masyarakat)	1.203	1.150	96%						
1786.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
001 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	21	21	100%	1.763.260.000	1.747.069.283	100%	16.190.717		
1786.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
001 Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	21	21	100%	1.763.260.000	1.747.069.283	100%	16.190.717		
JUMLAH				1.167.293.182.000	1.107.625.268.174		46.037.666.683		

Sumber: Ditjen PKH, 2021.

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan sesuai permintaan dan pengajuan proposal dari dinas provinsi, kelompok, dan lab. veteriner;
- 2) Penerima bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan pada Direktorat Pakan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku KPA;
- 3) Adanya koordinasi yang optimal antara satker provinsi, kabupaten/kota dengan pusat, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- 4) Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk: a) peningkatan sistem mutu laboratorium (ISO SNI 17025); b) penggunaan peralatan pengujian laboratorium; c) pakan olahan; d) kesmavet.



Sasaran Program 6 (SP6) MENINGKATNYA NILAI TAMBAH KOMODITAS PERTANIAN

SP6. IKU8	
Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	
Target 87%	Realisasi 81,82%
% Capaian 94,05% (Berhasil)	

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dilakukan survei terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan/termanfaatkan.

Data tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan diperoleh berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh Pembina Daerah dan penerima manfaat. Penghitungan realisasi tingkat kemanfaatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kemanfaatan} &= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana termanfaatkan}}{\text{Jumlah total sarana prasarana}} \times 100\% \\ &= \frac{27}{33} \times 100\% = 81,82\% \end{aligned}$$

Capaian realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kegiatan} &= \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\% \\ &= \frac{81,82}{87} \times 100\% = 94,05\% \end{aligned}$$

Jenis sarana prasarana dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Jenis Sarana Prasarana	Jumlah yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel (Unit)	Alsintan yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
1. Sarana Pengolahan Susu	2	2	2	100,00
2. Sarana pengolahan Pupuk	3	3	3	100,00
3. Sarana Pengolahan Unggas	1	1	1	100,00
4. Sarana Pengolahan Daging	1	1	1	100,00
5. Sarana Pengolahan Limbah (Biogas)	25	25	20	80,00
6. Sarana Tata Niaga	1	1	0	0,00
Jumlah	33	33	27	81,82
Rata-rata Tingkat Kemanfaatan				81,82

Sumber: Direktorat PPHNak, Ditjen PKH, 2021



Realisasi capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	87,00	90,00	92,00	95,00	94,05		86,13
Realisasi IKSP (%)		81,82	-	-	-			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Pada tabel 38 dapat dilihat bahwa Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2021 sebesar 81,82% atau mencapai 94,05% dari target sebesar 87%, artinya capaian kinerja “Berhasil” dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target atau realisasi tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 belum dilakukan survei ke penerima manfaat bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang diberikan ke masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Pada tabel 38 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2021 sebesar 81,82% atau mencapai 86,13% dan apabila dibandingkan dengan target Jangka Menengah tahun 2024 sebesar 95%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi capaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2021 sebesar 81, 82 % atau mencapai 96,94% dari target target Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian yaitu sebesar 84,40%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja tingkat sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, diantaranya:

1. Kondisi sarana prasarana (kondisi baik dan tidak rusak).
2. Tingkat pemahaman dan keterampilan personil yang mengoperasikan.
3. Ketepatan jenis dan spesifikasi sarana dengan kebutuhan penerima.



4. Komitmen penerima manfaat dalam memanfaatkan sarpras yang diberikan.
5. Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah Fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan T-1 (tahun 2020) berjumlah 33 unit terdiri dari 32 unit sarana prasarana pengolahan dan 1 unit sarana prasarana pemasaran hasil peternakan. Jenis sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 10.

Dari fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran tahun 2020 sebanyak 33 unit telah termanfaatkan sebanyak 27 unit sedangkan 6 unit belum termanfaatkan dengan optimal, yaitu:

- a) Fasilitasi sarana prasarana pengolahan biogas kegiatan pengembangan 1.000 desa sapi di Kabupaten.
- b) Ngada sebanyak 5 unit belum bisa dimanfaatkan karena gagal lelang pengadaan sapi. Sarana prasarana biogas baru akan termanfaatkan bila pengadaan sapi sudah diterima kelompok.
- c) Fasilitasi sarana prasarana pengolahan biogas kegiatan pengembangan 1.000 Desa Sapi Kelurahan Margi Santoso III, Desa Purut, Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, Jatim sudah dimanfaatkan namun dalam proses perbaikan oleh penyedia karena kerusakan pada pipa jaringan.
- d) Fasilitasi sarana pengolahan biogas kegiatan pengembangan 1.000 desa sapi Kelurahan Ballaparang, Desa Kalase'rena, Kec. Botonompo, Kab. Gowa, Sulsel sudah dimanfaatkan namun sedang mengalami kerusakan akibat banjir.
- e) Fasilitasi sarana pengolahan biogas kegiatan pengembangan 1.000 desa sapi Kelurahan Juluero, Desa Bontolangkasa, Kec. Botonompo Kab. Gowa, Sulsel sudah dimanfaatkan namun mengalami kendala teknis karena pipa inlet (pipa pemasukan kotoran hewan ke biogas) mampet.
- f) Fasilitasi sarana prasarana tata niaga (*holding ground*) di NTT merupakan kegiatan *multiyears* dan dibangun pada lokasi baru yang pembangunannya selesai pada tahun 2021, sehingga untuk tahun ini belum bisa termanfaatkan karena masih dalam proses pembangunan berupa penambahan kapasitas dan baru akan dimanfaatkan pada tahun 2022.

Tindak lanjut terkait kerusakan pada instalasi biogas di atas, telah dilakukan koordinasi dengan produsen untuk segera melakukan perbaikan, mengingat layanan purna jual (garansi) instalasi biogas berlaku selama 5 tahun. Perbaikan jaringan instalasi direncanakan pada bulan Januari 2022.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan didukung oleh kegiatan dan KRO sebagaimana tercantum dalam Tabel 39 dengan nilai efisiensi sebesar **53,29%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 39. Kegiatan Pendukung IKU 8 Tahun 2021

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	FISIK			KEUANGAN		CRO per KRO $\frac{CRO}{\sum CRO}$	(AAKRO x CRO) - RAKRO	$E = \frac{\sum ((AAKRO \times (\sum CRO)^{\frac{1}{2}}) - RAKRO)}{\sum (AAKRO)}$	$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$
	TVRO	RVRO	CRO: RVRO / TVRO	AAKRO: Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	RAKRO: Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output				
IKU 8 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan									
5891.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
001 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Unit)	21	21	100%	4.167.628.000	4.105.817.741	100%	61.810.259	1,32%	53,29%
101 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PEN) (Unit)	16	16	100%						
5891.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
001 Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Unit)	21	21	100%	1.763.260.000	1.747.069.283	100%	16.190.717		
JUMLAH				5.930.888.000	5.852.887.024		78.000.976		

Sumber: Ditjen PKH, 2021.

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut

- 1) Bantuan sarana peternakan yang diberikan sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal dari provinsi.
- 2) Adanya koordinasi yang optimal dan terencana antara satker pelaksana, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- 3) Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Namun demikian terdapat sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang belum dapat dimanfaatkan, karena pada kelompok penerima manfaat pada Kegiatan Desa Korporasi Sapi belum ada ternaknya disebabkan adanya gagal lelang.

Sasaran Program 7 (SP7)

MENINGKATNYA DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas Subsektor Peternakan telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti obat hewan dan produk unggas. Hal ini mengingat komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu penyumbang devisa negara, namun masih dinilai perlu ditingkatkan daya saingnya di pasar luar negeri. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.



SP7. IKU 9	
Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 15,00%	Realisasi 8,21%
% Capaian 54,73% (kurang berhasil)	

Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan nilai ekspor terhadap target tahun 2021.

Cara perhitungan Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun berjalan (A^t) ($t=2021$) dikurangi akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2020$), dibagi dengan akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2020$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil perhitungan IKU peningkatan nilai ekspor untuk produk Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Lampiran 11 dan realisasi capaian IKU dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 40. Realisasi capaian IKU Peningkatan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	15	15,00	20,00	25,00	30,00	54,73	27,74	27,37
Realisasi IKSP (%)	29,6	8,21	-	-	-			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebesar 8,21%, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 15%, maka realisasi Indikator mencapai 54,73% atau masuk dalam kategori “Kurang Berhasil”.

Namun demikian, Capaian Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021 secara keseluruhan dari kelima kelompok komoditas yang terdiri dari hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk nonpangan, obat hewan, serta benih dan bibit ternak telah melebihi dari yang ditargetkan, yaitu mencapai sebesar US\$ 1,04



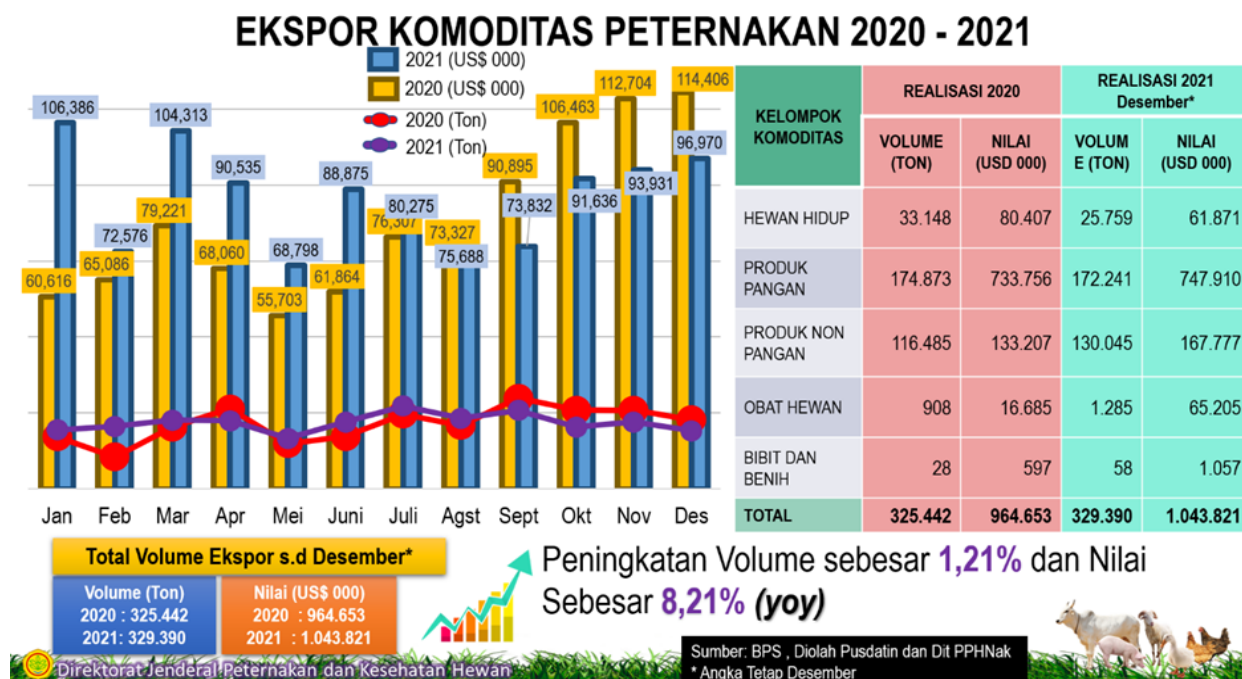
milyar atau 106,03% jika dibandingkan dengan total target nilai ekspor tahun 2021 sebesar US\$ 984,49 juta. Hal ini menunjukkan capaian nilai ekspor produk peternakan tahun 2021 adalah **Sangat Berhasil**. Capaian Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Capaian Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

No	Komoditas	Nilai Ekspor (US\$ 000)		%
		Target	Realisasi	
1	Hewan hidup	77.463	61.871	79,87
2	Produk pangan segar dan olahan	692.845	747.910	107,95
3	Produk non pangan	193.792	167.778	86,58
4	Obat hewan	19.494	65.205	334,48
5	Benih dan bibit ternak	905	1.057	116,80
		984.499	1.043.821	106,03

Sumber: Ditjen PKH, 2021

Sedangkan Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 5..



Grafik 5. Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan tahun 2021

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan (hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta benih dan bibit ternak) tahun 2021 sebesar 8,21% atau mencapai 27,74% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar



29,60%. Secara rinci Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 42. Nilai Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2021

No	Komoditas	Nilai Ekspor (USD)						Pertumbuhan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020 - 2021	2016 - 2020
1	Hewan Hidup	59,136,490	57,312,868	63,985,608	60,949,932	66,038,048	80,407,271	61,871,086	(23.05)	9.25
2	Produk Pangan Segar dan Olahan	248,893,904	348,988,698	436,078,594	446,993,171	523,890,058	733,756,382	747,910,837	1.93	21.18
3	Produk Non Pangan	123,211,374	123,014,666	112,489,463	118,124,463	138,127,221	133,207,036	167,777,958	25.95	2.46
4	Obat Hewan	11,784,321	12,133,855	10,210,191	13,126,425	14,126,487	16,684,860	65,205,214	290.80	9.61
5	Benih dan Bibit Ternak	406,759	1,842,200	2,380,194	976,894	2,196,295	597,528	1,056,728	76.85	5.57
Jumlah/ Total		443,432,848	543,292,287	625,144,050	640,170,885	744,378,109	964,653,077	1,043,821,823	8.21	15.83

Sumber: Ditjen PKH, 2021

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan (hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta benih dan bibit ternak) tahun 2021 sebesar 8,21% jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2024 sebesar 30%, maka saat ini sudah mencapai 27,37%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 8,21% telah melebihi target Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian yaitu 7,71% dengan capaian sebesar 106,49%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

Total nilai ekspor pertanian tahun 2021 senilai USD 40,95 Milyar dengan kontribusi subsektor sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 43. Capaian Nilai Ekspor Pertanian Tahun 2021

No	Subsektor	Capaian Realisasi Nilai Tahun 2021 (USD 000)	Share terhadap Capaian Realisasi Nilai Kementan (%)
1	Tanaman Pangan	280.033	0,68
2	Hortikultura	466.335	1,14
3	Perkebunan	39.164.373	95,63
4	Peternakan	1.043.822	2,55
Total		40.954.563	100,00

Sumber: LAKIN Kementan 2021 dan Ditjen PKH, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor sektor pertanian yakni subsektor perkebunan sebesar USD 39,16 Milyar atau



setara dengan 95,63%. Subsektor Peternakan merupakan urutan kedua penyumbang terbesar yaitu 2,55% terhadap capaian nilai ekspor sektor pertanian atau sebesar USD 1,04 Milyar, disusul Subsektor Hortikultura sebesar 1,14% atau sebesar USD 466,3 Juta dan Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,68% atau sebesar USD 280 Juta.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

1) Keberhasilan

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja di atas, Ditjen PKH telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan peningkatan ekspor untuk produk peternakan diantaranya:

- a) Adanya peningkatan nilai ekspor produk nonpangan terutama bulu, tulang dan tanduk, kulit, wol dan pakan hewan. Peningkatan ekspor produk non pangan tahun 2021 tersebut terutama disumbang oleh peningkatan nilai ekspor pakan hewan 23,09% menjadi US\$ 98,39 juta ke 52 negara di Dunia. Selanjutnya nilai ekspor kulit sebesar US\$ 63,33 juta yang mengalami peningkatan 27,31% dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2021 Indonesia telah berhasil mengekspor produk kulit ke 81 negara di dunia. Kemudian disumbang oleh nilai ekspor bulu sebesar US\$ 3,64 juta yang mengalami peningkatan 87,31%. Penyumbang keempat nilai ekspor produk nonpangan yakni tulang dan tanduk sebesar US\$ 2,27 juta dengan peningkatan 66,51% serta nilai ekspor wol US\$ 65,98 ribu dengan peningkatan 8.384,68% dibanding tahun sebelumnya.
- b) Penambahan pelaku usaha ekspor produk obat hewan ikut mendorong semakin meningkatnya ekspor obat hewan. Dengan pemanfaatan teknologi dan penerapan standar cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB), pelaku usaha ekspor obat hewan di tahun 2021 telah berhasil menembus 115 negara di 5 benua. Nilai ekspor obat hewan pada tahun 2021 adalah sebesar 390,80% jika dibandingkan dengan realisasi ekspor pada tahun 2020 yang sebesar US\$ 16,68 juta; dan 361,58% jika dibandingkan nilai ekspor 2 tahun sebelumnya 2019 yang baru mencapai US\$ 14,12 juta. Peningkatan nilai ekspor produk obat hewan disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor obat hewan selain vaksin sebesar 5.819,97% dari tahun 2020 senilai US\$ 811,48 ribu menjadi US\$ 48,03 juta pada tahun 2021. Strategi peningkatan ekspor obat hewan ke depan diperlukan diversifikasi produk yang termasuk dalam kategori obat hewan tidak hanya vaksin hewan, tetapi dapat berupa bahan baku obat hewan, *feed additive* maupun *feed suplement*. Perluasan dan promosi obat hewan ke negara-negara nontradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin diharapkan dapat mencapai target ekspor peternakan di tahun 2024.



- c) Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Instansi terkait tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPOM dan perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Atase Pertanian, serta Indonesian *Trade Promotion Center* (ITPC) untuk mendorong pembukaan akses pasar bagi komoditas dan produk peternakan Indonesia ke mancanegara. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dengan beberapa *market place* seperti Aspenku untuk pasar ekspor, sedangkan yang untuk memfasilitasi pengembangan pasar dalam negeri telah difasilitasi kerja sama antara para pelaku usaha peternakan dengan *market place* PT. Transportasi Indonesia (Grab); PT. Solusi Pangan Perwiratama (Etanee); PT. Tani Supply Indonesia; PT. Kreasi Tani Laksmi (Sayur Box); dan Tokopedia.

Salah satu Program Strategis Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan ekspor adalah Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS). Oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju pertanian maju, mandiri, dan modern. Terdapat 5 (lima) kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ekspor komoditas pertanian, yang juga menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam upaya mencapai target GRATIEKS, terdiri dari:

- a) Mendorong pertumbuhan eksportir baru, dengan cara menyiapkan unit usaha dan memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar siap ekspor.

Pada tahun 2021 telah dilakukan upaya identifikasi pelaku usaha ekspor di daerah dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan di seluruh provinsi. Melalui kegiatan identifikasi pelaku usaha ekspor tersebut, dapat diidentifikasi potensi komoditas di masing-masing wilayah yang memiliki potensi ekspor, dan para pelaku usaha peternakan yang siap ekspor atau perlu dilakukan pendampingan agar siap ekspor. Disamping itu, pada tahun 2021 juga telah dilakukan beberapa pertemuan dan penyampaian informasi kepada para pelaku usaha baik skala industri maupun UMKM yang memiliki potensi ekspor, untuk fasilitasi akses pasar ekspor, diantaranya yakni:

- (1) Fasilitasi pertemuan dengan *market place* Aspenku.com yang berorientasi ekspor sebagai sarana promosi produk yang berbasis digital.
- (2) Penyampaian informasi terkait peluang promosi dan akses pasar ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Afrika Selatan, Jepang, Brunei Darussalam, dan Singapura.



- (3) Melakukan serangkaian kegiatan promosi ke 9 Negara yang dikemas dalam program *One Day With Indonesian Coffee, Fruits, Floriculture, Livestock and Veterinary Products (ODICOFF-LV)*.
- b. Menambah ragam komoditas ekspor dengan cara: mendorong varian komoditas ekspor termasuk dari bahan raw atau setengah jadi menjadi dalam bentuk jadi, kerja sama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* menggali potensi daerah, serta mendorong tumbuhnya investasi di bidang industri agribisnis. Pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai upaya dalam menambah jenis produk yang dapat diterima di negara yang telah menjadi tujuan ekspor Indonesia, diantaranya adalah:
- (1) Jepang yang sebelumnya baru menerima produk olahan daging ayam yang telah melewati proses pemanasan, maka telah mulai dilakukan proses *G to G* untuk produk lainnya seperti daging beku ayam, dan daging sapi beserta olahannya. Pihak Jepang masih memerlukan informasi lebih lanjut terkait sertifikasi bebas kompartemen AI yang dilakukan Indonesia, serta proses *self declaration* bebas kompartemen AI tersebut di OIE.
 - (2) Singapura yang sebelumnya baru menerima produk daging babi dan telur asin, maka tengah dilakukan proses *G to G* untuk akses pasar daging ayam beserta olahannya, dan telur ayam untuk konsumsi.
 - (3) Brunei Darussalam yang sebelumnya telah menerima produk susu Indonesia serta kambing dan domba, saat ini juga menerima pakan sapi perah, sedangkan untuk penambahan komoditas *Hatching Egg* (HE) masih dalam proses *G to G*.
- c. Cina yang sebelumnya telah menerima produk sarang burung walet asal Indonesia, maka pada tahun 2020 dan 2021 telah diproses permintaan dibukanya akses pasar untuk produk daging ayam dan ceker ayam. Namun proses *G to G* masih terkendala, karena pihak Cina meminta akses pasar untuk komoditas yang sama. Meningkatkan frekuensi pengiriman ekspor dilakukan melalui kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan rekomendasi untuk ekspor di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Upaya menambah *buyer* baru melalui pameran dan promosi juga merupakan upaya untuk meningkatkan frekuensi pengiriman produk Peternakan dan Keswan ke negara tujuan ekspor.
- d. Menambah negara mitra dagang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, KBRI sebagai Perwakilan Negara Indonesia, termasuk diaspora Indonesia di negara tujuan ekspor serta memanfaatkan berbagai forum perundingan dan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral. Pada tahun 2021 negara yang menjadi target mitra dagang baru yakni Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Qatar dan Singapura.



- e. Meningkatkan volume ekspor dengan cara koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para *stakeholder* termasuk para pelaku usaha ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K). Upaya yang telah dilakukan, yakni dengan mendorong para pelaku usaha ekspor terutama untuk komoditas ternak hidup kambing dan domba dengan melakukan kemitraan dengan para peternak serta melakukan pendampingan kepada mitranya dalam aspek produksi. Dengan demikian dapat dihasilkan ternak yang memiliki kualitas sesuai dengan persyaratan ekspor, serta memiliki daya saing baik secara mutu maupun harga di pasar ekspor. Upaya lain adalah dengan mempertemukan antara pelaku usaha peternakan dengan calon *buyer* di negara tujuan, seperti di Jepang yang saat ini telah lancar melakukan eksportasi olahan daging ayam, kita juga mendorong agar produk UMKM Indonesia seperti abon, rendang daging kambing kaleng, dan rendang daging sapi juga bisa dibeli oleh *buyer* yang sama.

Upaya yang dilakukan oleh Ditjen PKH untuk peningkatan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan antara lain:

- a) Melakukan penetapan komoditas strategis ekspor yang terdiri dari: hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk nonpangan, obat hewan, benih dan bibit ternak.
- b) Melakukan pemetaan potensi komoditas peternakan di Indonesia, diantaranya: 1) Komoditas Utama yakni sarang burung walet; 2) Komoditas Andalan meliputi kambing, domba dan olahannya, unggas dan produk unggas, babi, serta obat hewan; serta 3) Komoditas Pengembangan meliputi *Black Soldier Fly* (BSF), burung hias, madu dan kelinci.
- c) Melakukan pemetaan produk (produksi dan daerah sentra) di 33 provinsi
- d) Melakukan pemetaan potensi negara tujuan berdasarkan hasil analisis *market intelligent*, antara lain negara UEA, Jepang, Canada, Cina, Brunei Darussalam dan Singapura.
- e) Melakukan harmonisasi persyaratan kesehatan hewan dengan negara target tujuan ekspor. Pada tahun 2021 telah dilakukan proses *G to G* dengan UEA, Singapura, Jepang, Singapura dan Brunei Darussalam yang diantaranya adalah untuk produk ayam, kambing dan domba, serta telur.
- f) Melakukan promosi produk, misi dagang dan negosiasi akses pasar ekspor. Tahun 2021 telah dilakukan misi dagang ke 9 Negara yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan *One Day With Indonesian Coffee, Fruits, Floriculture, Livestock and Veterinary Products (ODICOFF-LV)*.
- g) Melakukan sinergisme dengan pemerintah daerah dan Kementerian/ Lembaga seperti Biro Kerja sama Luar Negeri Kementan, Kementerian Luar Negeri. Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka identifikasi produk dan pelaku usaha yang berpotensi ekspor di wilayahnya. Disamping itu, juga dilakukan koordinasi baik melalui pertemuan maupun komunikasi



intensif dengan instansi terkait seperti Biro Kerja sama Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri dalam pemanfaatan forum kerja sama untuk mencari peluang ekspor.

- h) Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor dan peningkatan pengetahuan kepada pelaku usaha yang berpotensi ekspor. Hal ini terutama dilakukan kepada pelaku usaha yang akan melakukan ekspor baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis yang diminta negara tujuan ekspor, maupun dalam pengisian kuesioner *establishment* yang diberikan oleh negara tujuan ekspor.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan ekspor tersebut, Ditjen PKH melaksanakan langkah dan strategi peningkatan ekspor peternakan yang terdiri dari:

- a. Penguatan kelembagaan peternak dengan pengembangan kemitraan dengan *offtaker* dan berkoordinasi dengan asosiasi HPDKI terkait ekspor kambing dan domba.
- b. Identifikasi komoditas dan wilayah produksi potensi komoditas ekspor
- c. Pendataan negara yang berpotensi menjadi tujuan ekspor dan telah dilakukan proses *G to G*, dan dilakukan perluasan akses pasar untuk beberapa komoditas.
- d. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan ekspor telah dilakukan kepada 17 unit perusahaan dalam rangka mendorong untuk memasuki pasar ekspor baik melalui pertemuan dengan *market place* berorientasi ekspor
- e. Penambahan pelaku usaha ekspor produk obat hewan ikut mendorong semakin meningkatnya ekspor obat hewan melalui pemanfaatan teknologi dan penerapan standar Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk industri tujuan ekspor.
- f. *Market Inteligent*, promosi, misi dagang pada tahun 2021 telah dilakukan bekerja sama dengan perwakilan Indonesia di KBRI negara tujuan ekspor dan para pelaku usaha yakni dengan UEA, Jepang, Cina, Brunei Darussalam dan Singapura.
- g. Ditjen PKH melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi unit usaha produk hewan dan menjadi salah satu persyaratan bagi unit usaha yang akan melakukan pemasukan (impor) dan/atau pengeluaran (ekspor).
- h. Peningkatan status kesehatan hewan melalui penerapan kompartementalisasi bebas penyakit sebagai salah satu persyaratan produk peternakan yang akan diekspor.
- i. Peningkatan investasi melalui pemanfaatan KUR untuk usaha budidaya maupun pasca panen dan pengolahan.
- j. Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Peternak baik di tingkat nasional.



2) Kendala

Beberapa jenis komoditas seperti hewan hidup babi dan unggas tahun 2021 mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 23,05% dibanding tahun 2020, disebabkan mewabahnya *African Swine Fever (ASF)* di beberapa wilayah di Indonesia dan adanya kebijakan *Lockdown* akibat pandemi *Covid-19* di Timor Leste yang merupakan salah satu negara tujuan ekspor unggas Indonesia.

Tabel 44. Perbandingan Rincian Ekspor Hewan Hidup

No	Komoditas Hewan Hidup	2019		2020		r ¹ Nilai Ekspor (%)	2021		r ¹ Nilai Ekspor (%)
		Vol (ton)	Nilai (000 USD)	Vol (ton)	Nilai (000 USD)		Vol (ton)	Nilai (000 USD)	
1	Babi	30,721.54	60,684.54	32,751.11	75,489.69	24.40	25,167.46	55,854.93	(26.01)
2	Biri-biri	21.00	97.70	176.75	685.69	601.80	250.45	959.24	39.89
3	Kambing	15.12	118.94	4.92	19.15	(83.90)	136.22	381.12	1,890.19
4	Unggas	11.70	317.92	22.32	285.58	(10.17)	17.49	216.35	(24.24)
5	Binatang Hidup Lainnya	510.00	4,818.94	192.98	3,927.16	(18.51)	187.90	4,459.45	13.55

Keterangan: ¹r = pertumbuhan nilai ekspor tahun 2020-2019; ²r = pertumbuhan nilai ekspor tahun 2021-2020

Sumber: Ditjen PKH, 2021

Dari data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa komoditas babi hidup dan domba hidup mengalami peningkatan nilai ekspor di tahun 2020 masing-masing meningkat 24,40% dan 601,80%. Pada tahun 2021 capaian nilai ekspor babi hidup menurun sebesar 26,01% jika dibandingkan dengan capaian nilai ekspor tahun 2020. Penyebab utama menurunnya nilai ekspor komoditas babi hidup adalah adanya kasus penyakit *African Swine Fever (ASF)* di beberapa wilayah di Indonesia. Komoditas domba hidup berpotensi untuk diekspor ke beberapa negara tujuan ekspor terutama di wilayah ASEAN seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Salah satu komoditas yang masih belum meningkat dari tahun sebelumnya yaitu unggas. Salah satu penyebab menurunnya realisasi nilai ekspor komoditas unggas adalah terkendalanya transportasi sebagai akibat diberlakukannya pembatasan penerbangan dari Indonesia ke Timor Leste (hanya 1 kali sebulan) sehingga produk DOC Indonesia mengalami kesulitan masuk ke Dili.

Capaian nilai ekspor benih dan bibit ternak tahun 2021 meningkat 76,85% tahun 2020. Ekspor benih dan bibit ternak didominasi oleh ekspor *Hatching Egg (HE)* ke beberapa negara tetangga seperti Myanmar dan Vietnam. Namun belakangan ini kondisi politik keamanan Myanmar yang belum stabil sehingga sedikit menghambat proses eksportasi HE ke negara tersebut. Upaya perluasan akses pasar HE ke Brunei Darussalam telah dirintis sejak tahun 2019, saat ini masih belum selesai *G to G* antar kedua Negara terkait pemenuhan persyaratan Bebas AI.

Untuk produk semen beku, masih diperlukan promosi produk dan pendampingan akses pasar ekspor serta kebijakan ketersediaan semen beku dalam negeri



diperlukan support informasi dan data jumlah dan jenis semen beku dari jenis bangsa sapi yang dapat diekspor.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung oleh kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 45 dengan nilai efisiensi sebesar **56,06%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 45. Kegiatan Pendukung IKU 9 Tahun 2021

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	FISIK			KEUANGAN		CRO per KRO $\left(\frac{CRO}{KRO}\right)$	(AAKRO x CRO) - RAKRO	$E = \frac{\sum \left((AAKRO \times \left(\frac{CRO}{KRO}\right)^2) - RAKRO \right)}{\sum (AAKRO)}$	$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$		
	TVRO	RVRO	CRO: RVRO / TVRO	AAKRO: Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	RAKRO: Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output						
IKU 9	Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Peternakan Dan Kesehatan Hewan										
5891.AEA	Koordinasi										
001	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Kegiatan)	4	4	100%	11.661.955.000	11.401.215.658	100%	260.739.342	2,42%	56,06%	
101	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PEN) (Ke)	4	4	100%							
5891.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										
001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	3	3	100%	1.094.025.000	1.050.144.366	100%	43.880.634			
5891.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										
001	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Le)	34	34	100%	3.845.301.000	3.747.478.846	100%	97.822.154			
JUMLAH					16.601.281.000	16.198.838.870		402.442.130			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Salah satu Program Strategis Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan ekspor adalah Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS). Oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju pertanian maju, mandiri, dan modern. Terdapat 5 (lima) kebijakan strategis Kementan dalam meningkatkan ekspor komoditas pertanian, yang juga menjadi acuan bagi Ditjen PKH dalam upaya mencapai target GRATIEKS, terdiri dari:

1. Mendorong pertumbuhan eksportir baru, dengan cara menyiapkan unit usaha dan memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar siap ekspor.

Pada tahun 2021 telah dilakukan upaya identifikasi pelaku usaha ekspor di daerah dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan di seluruh provinsi. Melalui kegiatan identifikasi pelaku usaha ekspor tersebut, dapat diidentifikasi potensi komoditas di masing-masing wilayah yang memiliki potensi ekspor, dan para pelaku usaha peternakan yang siap ekspor atau perlu dilakukan pendampingan agar siap ekspor. Disamping itu, pada tahun 2021 juga telah dilakukan beberapa pertemuan dan penyampaian informasi kepada para pelaku usaha baik skala industri maupun UMKM yang memiliki potensi ekspor, untuk fasilitasi akses pasar ekspor, diantaranya yakni:

- a) Fasilitasi pertemuan dengan *market place* Aspenku.com yang berorientasi ekspor sebagai sarana promosi produk yang berbasis digital.
 - b) Penyampaian informasi terkait peluang promosi dan akses pasar ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Afrika Selatan, Jepang, Brunei Darussalam, dan Singapura.
 - c) Melakukan serangkaian kegiatan promosi ke 9 Negara yang dikemas dalam program *One Day With Indonesian Coffee, Fruits, Floriculture, Livestock and Veterinary Products (ODICOFF-LV)*.
2. Menambah ragam komoditas ekspor dengan cara: mendorong varian komoditas ekspor termasuk dari bahan raw atau setengah jadi menjadi dalam bentuk jadi, kerja sama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* menggali potensi daerah, serta mendorong tumbuhnya investasi di bidang industri agribisnis. Pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai upaya dalam menambah jenis produk yang dapat diterima di negara yang telah menjadi tujuan ekspor Indonesia, diantaranya adalah:
- a) Jepang yang sebelumnya baru menerima produk olahan daging ayam yang telah melewati proses pemanasan, maka telah mulai dilakukan proses *G to G* untuk produk lainnya seperti daging beku ayam, dan daging sapi beserta olahannya. Pihak Jepang masih memerlukan informasi lebih lanjut terkait sertifikasi bebas kompartemen AI yang dilakukan Indonesia, serta proses *self declaration* bebas kompartemen AI tersebut di OIE.
 - b) Singapura yang sebelumnya baru menerima produk daging babi dan telur asin, maka tengah dilakukan proses *G to G* untuk akses pasar daging ayam beserta olahannya, dan telur ayam untuk konsumsi.
 - c) Brunei Darussalam yang sebelumnya telah menerima produk susu Indonesia serta kambing dan domba, saat ini juga menerima pakan sapi perah, sedangkan untuk penambahan komoditas *Hatching Egg* (HE) masih dalam proses *G to G*.
3. Cina yang sebelumnya telah menerima produk sarang burung walet asal Indonesia, maka pada tahun 2020 dan 2021 telah diproses permintaan dibukanya akses pasar untuk produk daging ayam dan ceker ayam. Namun proses *G to G* masih terkendala, karena pihak Cina meminta akses pasar untuk komoditas yang sama. Meningkatkan frekuensi pengiriman ekspor dilakukan melalui kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan rekomendasi untuk ekspor di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Upaya menambah *buyer* baru melalui pameran dan promosi juga merupakan upaya untuk meningkatkan frekuensi pengiriman produk Peternakan dan Keswan ke negara tujuan ekspor.
4. Menambah negara mitra dagang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, KBRI sebagai Perwakilan Negara Indonesia, termasuk diaspora Indonesia di negara tujuan



ekspor serta memanfaatkan berbagai forum perundingan dan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral. Pada tahun 2021 negara yang menjadi target mitra dagang baru yakni Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Qatar dan Singapura.

5. Meningkatkan volume ekspor dengan cara koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para *stakeholder* termasuk para pelaku usaha ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K). Upaya yang telah dilakukan, yakni dengan mendorong para pelaku usaha ekspor terutama untuk komoditas ternak hidup kambing dan domba dengan melakukan kemitraan dengan para peternak serta melakukan pendampingan kepada mitranya dalam aspek produksi. Dengan demikian dapat dihasilkan ternak yang memiliki kualitas sesuai dengan persyaratan ekspor, serta memiliki daya saing baik secara mutu maupun harga di pasar ekspor. Upaya lain adalah dengan mempertemukan antara pelaku usaha peternakan dengan calon *buyer* di negara tujuan, seperti di Jepang yang saat ini telah lancar melakukan eksportasi olahan daging ayam, kita juga mendorong agar produk UMKM Indonesia seperti abon, rendang daging kambing kaleng, dan rendang daging sapi juga bisa dibeli oleh *buyer* yang sama.

Upaya yang dilakukan oleh Ditjen PKH untuk peningkatan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan antara lain:

- a. Melakukan penetapan komoditas strategis ekspor yang terdiri dari: hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk nonpangan, obat hewan, benih dan bibit ternak.
- b. Melakukan pemetaan potensi komoditas peternakan di Indonesia, diantaranya: 1) Komoditas Utama yakni sarang burung walet; 2) Komoditas Andalan meliputi kambing, domba dan olahannya, unggas dan produk unggas, babi, serta obat hewan; serta 3) Komoditas Pengembangan meliputi *Black Soldier Fly* (BSF), burung hias, madu dan kelinci.
- c. Melakukan pemetaan produk (produksi dan daerah sentra) di 33 provinsi
- d. Melakukan pemetaan potensi negara tujuan berdasarkan hasil analisis *market intelligent*, antara lain negara UEA, Jepang, Canada, Cina, Brunei Darussalam dan Singapura.
- e. Melakukan harmonisasi persyaratan kesehatan hewan dengan negara target tujuan ekspor. Pada tahun 2021 telah dilakukan proses *G to G* dengan UEA, Singapura, Jepang, Singapura dan Brunei Darussalam yang diantaranya adalah untuk produk ayam, kambing dan domba, serta telur.
- f. Melakukan promosi produk, misi dagang dan negosiasi akses pasar ekspor. Tahun 2021 telah dilakukan misi dagang ke 9 Negara yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan *One Day With Indonesian Coffee, Fruits, Floriculture, Livestock and Veterinary Products (ODICOFF-LV)*.
- g. Melakukan sinergisme dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga seperti Biro Kerja sama Luar Negeri Kementan, Kementerian Luar Negeri. Koordinasi



dengan pemerintah daerah dalam rangka identifikasi produk dan pelaku usaha yang berpotensi ekspor di wilayahnya. Disamping itu, juga dilakukan koordinasi baik melalui pertemuan maupun komunikasi intensif dengan instansi terkait seperti Biro Kerja sama Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri dalam pemanfaatan forum kerja sama untuk mencari peluang ekspor.

- h. Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor dan peningkatan pengetahuan kepada pelaku usaha yang berpotensi ekspor. Hal ini terutama dilakukan kepada pelaku usaha yang akan melakukan ekspor baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis yang diminta negara tujuan ekspor, maupun dalam pengisian kuesioner *establishment* yang diberikan oleh negara tujuan ekspor.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan ekspor tersebut, Ditjen PKH melaksanakan langkah dan strategi peningkatan ekspor peternakan yang terdiri dari:

- a. Penguatan kelembagaan peternak dengan pengembangan kemitraan dengan *offtaker* dan berkoordinasi dengan asosiasi HPDKI terkait ekspor kambing dan domba.
- b. Identifikasi komoditas dan wilayah produksi potensi komoditas ekspor.
- c. Pendataan negara yang berpotensi menjadi tujuan ekspor dan telah dilakukan proses *G to G*, dan dilakukan perluasan akses pasar untuk beberapa komoditas.
- d. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan ekspor telah dilakukan kepada 17 unit perusahaan dalam rangka mendorong untuk memasuki pasar ekspor baik melalui pertemuan dengan *market place* berorientasi ekspor.
- e. Penambahan pelaku usaha ekspor produk obat hewan ikut mendorong semakin meningkatnya ekspor obat hewan melalui pemanfaatan teknologi dan penerapan standar Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk industri tujuan ekspor.
- f. *Market Inteligent*, promosi, misi dagang pada tahun 2021 telah dilakukan bekerja sama dengan perwakilan Indonesia di KBRI negara tujuan ekspor dan para pelaku usaha yakni dengan UEA, Jepang, Cina, Brunei Darussalam dan Singapura.
- g. Ditjen PKH melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi unit usaha produk hewan dan menjadi salah satu persyaratan bagi unit usaha yang akan melakukan pemasukan (impor) dan/atau pengeluaran (ekspor).
- h. Peningkatan status kesehatan hewan melalui penerapan kompartementalisasi bebas penyakit sebagai salah satu persyaratan produk peternakan yang akan diekspor.
- i. Peningkatan investasi melalui pemanfaatan KUR untuk usaha budidaya maupun pascapanen dan pengolahan.
- j. Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Peternak baik di tingkat nasional.



Sasaran Program 8 (SP8)

TERWUJUDNYA BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA

SP8. IKU 10	
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 32,75	Realisasi 32,66
% Capaian 99,73% (Berhasil)	

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menegaskan akan pentingnya penerapan *clean government* dan *good governance* secara universal yang menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka dalam pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan instrumen untuk pengawasan dan penilaian pelaksanaan.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk Kementerian Pertanian. PMPRB diisikan langsung oleh masing-masing instansi pemerintah baik pusat maupun daerah pada sistem penilaian yang telah dibangun. Ditjen PKH sebagai bagian unit kerja dari Kementerian Pertanian turut mendukung suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penilaian setiap kemajuan yang telah dilakukan dan menarasikan bukti program/kegiatan dalam upaya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

PMPRB Ditjen PKH dilaksanakan dengan tujuan untuk memudahkan dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh unit kerja. Selain itu, juga untuk menyediakan data/informasi bagi Kementerian dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Terkait pelaksanaan PMPRB, pada Ditjen PKH telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Pada tahun 2021, periode penilaian pelaksanaan PMPRB Ditjen PKH dilaksanakan pada 2-18 Juni 2021. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan



efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu evaluasi yang dilakukan juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas PMPRB di Ditjen PKH.

Pengukuran Nilai PMPRB diperoleh dengan membandingkan antara target dan nilai maksimal yang dapat diperoleh pada komponen pengungkit dikali 100%, sedangkan sumber data didapatkan dari lembar kerja evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian Nilai PMPRB Ditjen PKH mendapat nilai dari Inspektorat Jenderal Kementan sebesar 32,66. Realisasi capaian IKU Nilai PMPRB Ditjen PKH dapat dilihat pada tabel 46.

Tabel 46. Realisasi Capaian IKU Nilai PMPRB Ditjen PKH

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	32,3	32,75	33,50	34,00	35,50	99,73	101,11	92,00
Realisasi IKSP (%)	32,3	32,66	-	-	-			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Capaian Indikator Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH tahun 2021 adalah 32,66 apabila dibandingkan dengan target 2021 sebesar 32,75, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH 99,73% dengan kategori “**Berhasil**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Realisasi Indikator Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH tahun 2021 adalah 32,66 atau mencapai 101,11% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 32,30.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH tahun 2021 sebesar 32,66, jika dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 35,50, maka saat ini sudah mencapai 92%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja reformasi birokrasi di Ditjen PKH dapat dilihat dari kenaikan nilai PMPRB yang setiap tahunnya selalu meningkat. Keberhasilan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021 dengan melaksanakan program terkait 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Ditjen PKH juga menunjuk agen perubahan pada setiap unit kerja untuk mendukung perbaikan di 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1) Manajemen Perubahan

Untuk manajemen perubahan telah disusun Rencana Aksi, diantaranya:

- a) Penguatan Gerakan perubahan pola pikir Budaya Kerja dan Budaya Organisasi (menetapkan agen perubahan, penyusunan rencana aksi perubahan, internalisasi tugas dan fungsi, pengembangan kompetensi);
- b) Penegakkan Program Revolusi Mental (Imbauan/pemasangan spanduk/*banner*/stiker tentang bersih melayani, Pengajian/Motivasi Disiplin Bekerja, Kegiatan Pengajian di Kantor Pusat, sosialisasi anti narkoba, stiker tentang protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*);
- c) Strategi Manajemen Perubahan (Implementasi program RB dalam rapat pimpinan dan setiap kegiatan, kesepakatan rencana aksi agen perubahan);
- d) Monitoring rencana aksi Reformasi Birokrasi secara Berkala;
- e) Pelaksanaan *Quick Wins* Program SIKOMANDAN dan peningkatan produksi DOD di BPTU-HPT Pelaihari;
- f) Nilai Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) Ditjen PKH adalah 93,92.

2) Deregulasi Kebijakan (Penataan Peraturan Perundang-undangan)

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terkait bidang layanan perizinan berusaha Kementerian Pertanian telah menerbitkan 4 Peraturan Menteri Pertanian, diantaranya yaitu:

- a) Permentan 15/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
- b) Permentan 28/2021 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 19/2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease -19 (*Covid-19*);
- c) Permentan 17/2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum; dan
- d) Permentan 16/2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan.

3) Penataan dan Penguatan Organisasi

Melakukan evaluasi tugas dan fungsi organisasi Ditjen PKH berdasarkan Permentan 40 Tahun 2021, serta menyusun analisis beban kerja dan analisis jabatan dalam rangka evaluasi Peta Jabatan Kementerian Pertanian. Selain itu juga dilakukan penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Veteriner Loka Papua untuk memperkuat kelembagaan veteriner dalam rangka meningkatkan Sistem Kesehatan Hewan Nasional.



4) Penataan Tata Laksana

Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government

5) Penataan Sistem Manajemen SDM

- a) Melakukan identifikasi kebutuhan pegawai Ditjen PKH sesuai dengan beban kerja organisasi (peta jabatan) serta identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai;
- b) Melakukan pengelolaan kinerja pegawai tahun 2021;
- c) Melakukan monitoring kehadiran pegawai secara berkala (bulanan);
- d) Melakukan penyusunan revisi peta jabatan baru Ditjen PKH;
- e) Melakukan promosi pegawai dan uji kompetensi jabatan fungsional;
- f) Penetapan kinerja individu dan pelaksanaan evaluasi jabatan;
- g) Menyusun program Pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kompetensi.

6) Akuntabilitas

- a) Nilai kinerja Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen PKH setiap tahun mengalami peningkatan, dari 85,16 pada tahun 2019 naik menjadi 85,18 pada tahun 2020;
- b) Ditjen PKH mengajukan penilaian WBK sebanyak 7 UPT dan WBBM sebanyak 5 UPT.

7) Pengawasan

Sejak tahun 2009, Ditjen PKH berkomitmen melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkat organisasi dan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan agar tujuan pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai optimal, dengan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien, mewujudkan laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2021 mulai diterapkan SPIP terintegrasi. Salah satu indikator bahwa SPIP itu berjalan adalah dengan minimnya temuan temuan dalam audit baik internal maupun eksternal. Adapun hasil penilaian penjaminan kualitas tahun 2021 dari Itjen Kementan selaku *quality assurance* adalah sebesar 3,64.

8) Pelayanan Publik

Ditjen PKH selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Ditjen PKH dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima (terbaik) bagi masyarakat, yang mempunyai kepentingan pada organisasi Ditjen PKH sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pelayanan Publik dapat dilihat dari:



- a) Seluruh unit pelaksana teknis lingkup Ditjen PKH sudah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik, berdasarkan Permentan nomor 78 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- b) Semua unit kerja lingkup Ditjen PKH sudah mendapat sertifikasi ISO 9001-2015 untuk sistem manajemen mutu, dan semua laboratorium pengujian obat hewan, produk hewan, penyakit hewan dan perbibitan sudah terakreditasi, dan secara reguler alat-alat laboratorium dikalibrasi untuk akurasi pengujian;
- c) Ditjen PKH menjadi sampel evaluasi pelaksanaan standar pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB;
- d) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Ditjen PKH adalah sebesar 3,47 Skala Likert;
- e) Dalam rangka implementasi PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permentan No. 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, Ditjen PKH melakukan penyesuaian/perubahan pada sistem layanan rekomendasi dengan tetap mengutamakan terwujudnya pelayanan prima untuk kepuasan pelanggan. Pada tahun 2021, terdapat beberapa perubahan dan penambahan pada aplikasi SIMREK PKH. Perubahan aplikasi yang sudah di non-aktifkan diantaranya: (1) Rekomendasi pemasukan produk pangan asal hewan; (2) Rekomendasi pemasukan produk hewan nonpangan; (3) Rekomendasi pemasukan produk pangan asal hewan-susu; (4) Rekomendasi pemasukan produk hewan non pangan-bulu; (5) Rekomendasi pemasukan produk hewan non pangan-kulit; (6) Rekomendasi pemasukan makanan hewan kesayangan (*pet food*), diubah menjadi aplikasi: (1) Rekomendasi pemasukan produk pangan asal hewan; (2) Rekomendasi pemasukan produk hewan non pangan; (3) Rekomendasi pemasukan makanan hewan kesayangan (*pet food*). Pada aplikasi SIMPOL PKH juga terdapat perubahan sistem pada pendaftaran obat hewan baru, pendaftaran obat hewan ulang, pendaftaran pakan dalam negeri, dan pengalihan nomor pendaftaran pakan di tahun 2021 yang diintegrasikan dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sedangkan penambahan aplikasi SIMREK PKH diantaranya: (1) Sertifikat veteriner dari keswan untuk pengeluaran produk hewan (*hard gelatine capsule & black soldier fly*); (2) Rencana kebutuhan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya; (3) Rencana kebutuhan pemasukan ruminansia besar. Untuk memfasilitasi rencana kebutuhan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya dan rencana kebutuhan pemasukan ruminansia besar, SIMREK PKH melakukan integrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) dari Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kemenkeu, sebagai implementasi kebijakan pemerintah terkait Neraca Komoditas untuk penerbitan perizinan impor ekspor yang tertuang pada PP No. 5 tahun 2021.



e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH didukung oleh kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 47 dengan nilai efisiensi sebesar **58,90%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Tabel 47. Kegiatan Pendukung IKU 10 Tahun 2021

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	FISIK			KEUANGAN		CRO per KRO $\left[\frac{CRO}{CRO^{(1)}}\right]$	(AAKRO x CRO) - RAKRO	$E = \frac{\sum((AAKRO \times (\frac{CRO}{CRO^{(1)}})^{1.5}) - RAKRO)}{\sum(AAKRO)}$	$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$		
	TVRO	RVRO	CRO: RVRO / TVRO	AAKRO: Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	RAKRO: Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output						
IKU 10 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan											
1787.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal											
001 Layanan Perencanaan (Layanan)	57	57	100%	26.863.262.000	26.103.903.210	100%	759.358.790	3,56%	58,90%		
002 Layanan Pembendaharaan Internal (Layanan)	56	56	100%								
003 Layanan Pengalokasian Barang Milik Negara (Layanan)	58	58	100%								
1787.EAC Layanan Umum											
001 Layanan Kearsipan dan Ketatausahaan (Layanan)	1	1	100%	11.591.833.000	11.431.629.175	100%	160.203.825				
002 Layanan Keumahainggaan (Layanan)	1	1	100%								
1787.EAD Layanan Sarana Internal											
001 Layanan Sarana Internal (Unit)	4	4	100%	1.472.209.000	1.204.260.400	100%	267.948.600				
1787.EAE Layanan Prasarana Internal											
001 Layanan Prasarana Internal (Unit)	1	1	100%	150.000.000	148.405.000	100%	1.595.000				
1787.EAF Layanan SDM											
001 Layanan Manajemen SDM (Orang)	1	1	100%	2.689.209.000	2.566.885.261	100%	122.313.739				
1787.EAG Layanan Hukum											
001 Layanan Hukum (Layanan)	1	1	100%	2.921.650.000	2.910.538.535	100%	11.111.465				
1787.EAI Layanan Kehumasan dan Protokol											
001 Layanan Humas dan Informasi (Layanan)	23	23	100%	5.509.939.000	5.326.877.116	100%	183.061.884				
002 Layanan Protokol (Layanan)	1	1	100%								
1787.EAJ Layanan Data dan Informasi											
001 Layanan Sistem Informasi (Layanan)	1	1	100%	5.206.100.000	4.626.244.808	100%	579.855.192				
002 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	35	35	100%								
1787.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal											
001 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Laporan)	55	55	100%	2.156.957.000	2.084.714.994	100%	72.242.006				
JUMLAH				58.561.159.000	56.403.468.499		2.085.448.485				

Sumber: Ditjen PKH, 2021

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen PKH telah mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi. Pelaksanaan reformasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, diantaranya:

- (1) Menerapkan SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu terintegrasi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Salah satu bentuk komitmen Ditjen PKH untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang pelayanan prima serta bersih dan bebas dari KKN adalah dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016. Diharapkan dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (SMMAP) ini, Ditjen PKH dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta proaktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan suap.

Ruang lingkup penerapan SNI ISO Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan Ditjen PKH terdiri dari:



- a) Sekretariat adalah 1) Kepegawaian; 2) Keuangan (PNBP); 3) Pengadaan; dan 4) Layanan Rekomendasi;
- b) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak adalah 1) Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit; 2) Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi;
- c) Direktorat Pakan adalah 1) Pengeluaran dan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT); 2) Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit HPT Hijauan Pakan Ternak); dan 3) Penerbitan Nomor Pendaftaran Pakan;
- d) Direktorat Keswan adalah 1) Izin Pemasukan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) ; 2) SK & Sertifikat Izin Usaha Obat Hewan;
- e) Direktorat Kesmavet adalah Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya; dan
- f) Direktorat PPHNak adalah 1) Pemanfaatan Data 2) Akselerasi Ekspor.

Ditjen PKH sejak tahun 2018 telah melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (SMMP) SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 Terintegrasi dan telah mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan SMMP SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 akan dilakukan surveilans berupa Audit Eksternal setiap tahun sekali.

Pada tahun 2021 ini yakni tahun kelima sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah berhasil melakukan resertifikasi dengan hasil tetap dipertahankan sertifikasinya yang menjadi bukti nyata kepada masyarakat terkait komitmen pelayanan prima dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- (2) Sejak tahun 2009, Ditjen PKH berkomitmen melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkat organisasi dan program/ kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan agar tujuan pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai optimal, dengan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien, mewujudkan laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu indikator bahwa SPIP itu berjalan adalah dengan minimnya temuan temuan dalam audit baik internal maupun eksternal.

Tim Satlak SPIP Pusat harus mampu mendorong Satker UPT maupun Dinas Provinsi melalui implementasi SPIP yang optimal untuk memperoleh unit kerja berpredikat WBK, WBBM menuju Zona Integritas (ZI). Hasil Penjaminan Penilaian Maturitas SPIP lingkup Kementan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021, level maturitas SPIP Ditjen PKH masuk dalam level 3 dengan nilai 3,64, yaitu sudah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.



- (3) Ditjen PKH telah menerapkan dan terus memperbaiki Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Ditjen PKH setiap tahun mengalami peningkatan, dari 85,16 pada tahun 2019 naik menjadi 85,18 pada tahun 2020.

Sasaran Program 9 (SP9)
TERWUJUDNYA ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN
YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS

SP9. IKU11	
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 88,68	Realisasi 90,42
% Capaian 101,96% (Sangat Berhasil)	

Nilai Kinerja (NK) Anggaran merupakan salah satu indikator sasaran program Ditjen PKH atas pelaksanaan anggaran belanja untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran. Alat pengukuran evaluasi kinerja dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks yang semuanya dituangkan ke dalam Aplikasi SMART.





Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu atas Pengukuran dan Evaluasi Kinerja tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga yang dapat diakses melalui alamat website <https://smart.kemenkeu.go.id/>. Capaian didapatkan dengan menghitung Nilai Kinerja Program berdasarkan nilai kinerja yang ditampilkan pada *dashboard* aplikasi SMART. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH tahun 2021 adalah 90,42. Realisasi Capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH secara rinci dapat dilihat pada tabel 48.

Tabel 48. Realisasi Capaian NK Anggaran Ditjen PKH

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85	101,96	99,11	99,53
Realisasi IKSP (%)	91,23	90,42	-	-	-			

Sumber: Ditjen PKH, 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Indikator Kinerja NK Anggaran Ditjen PKH yang dipantau melalui aplikasi SMART per tanggal 15 Januari 2022 adalah sebesar 90,42 jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 88,68, maka diperoleh capaian 101,96% atau masuk ke dalam kategori “**Sangat Berhasil**”. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PKH Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Capaian Kinerja Anggaran Ditjen PKH Tahun 2021



Sumber: Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 22/2021 (SMART), 2021

Adapun rincian realisasi indikator capaian yang dinilai sebagai berikut:

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja NK Anggaran Ditjen PKH pada tahun 2021 sebesar 90,42 apabila dibandingkan dengan realisasi NK tahun 2020, maka NK Anggaran Ditjen PKH mencapai 99,11%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja NK Anggaran Ditjen PKH tahun 2021 sebesar 90,42 apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 90,85, maka saat ini sudah mencapai 99,53%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Target NK Anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2021 sebesar 91,61%, sehingga Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH tahun 2021 apabila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Kementan mencapai 98,70%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Realisasi capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH yang dipantau melalui aplikasi SMART per tanggal 15 Januari 2022 adalah sebesar 90,42 Nilai atau 101,96% dari target 88,68 Nilai pada tahun 2021. Adapun rincian realisasi indikator capaian yang dinilai sebagai berikut:

- 1) Capaian sasaran program dengan nilai sebesar 100%;
- 2) Penyerapan anggaran dengan nilai sebesar 95,62%;
- 3) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 86,71%;
- 4) Capaian output program dengan nilai sebesar 100%;
- 5) Efisiensi 1,04 dan dikonversi menjadi Nilai efisiensi sebesar 52,6; dan
- 6) Rata-rata Nilai Kinerja Satker dengan nilai sebesar 86,3

Keberhasilan pencapaian NK Anggaran Ditjen PKH dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Masing-masing Satker telah membentuk Tim *Person in Charge* (PIC) yang menangani aplikasi monitoring dan evaluasi (Monev).
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang menangani monitoring dan evaluasi (Monev) masing-masing Satker karena telah dilakukan (dua) kali *workshop* dan pendampingan.
3. Peran aktif dari Tim Monev masing-masing satker yang meningkat dalam melakukan penginputan data capaian keluaran program/kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian Rata-rata Nilai Kinerja Satker sebesar 86,3.
4. Koordinasi yang intensif antara petugas Monev pusat dengan Petugas Monev unit kerja UPT dan Satker dinas Provinsi, baik melalui komunikasi WA *group* maupun kunjungan langsung ke Satker untuk melakukan bimbingan teknis jika ada yang mengalami kendala.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH diantaranya:

1. Adanya revisi DIPA karena realokasi dan refocusing anggaran sebanyak 11 kali berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya refocusing dan realokasi anggaran menyebabkan perubahan data informasi kinerja, yaitu berkurangnya target atau bahkan ada yang dihilangkan, sehingga berpengaruh terhadap target volume keluaran atau target Indikator Keluaran Kegiatan (IKK). Namun karena sebelumnya sudah dilaksanakan persiapan pelaksanaan (koordinasi, CP/CL, pertemuan dalam rangka persiapan dan lain-lain), dan sudah menggunakan anggaran, maka untuk target tidak bisa dihilangkan. Hal ini tentunya berpengaruh pada capaian realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) di Satker. Selain itu juga terdapat data informasi kinerja yang tidak dilakukan pemutakhiran sesuai dengan dokumen perencanaan revisi akhir.
3. Rencana Penarikan Dana (RPD) di beberapa Satker tidak sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan nilai konsistensi rendah. Beberapa Satker tidak melakukan Revisi RPD sesuai dengan realisasi pada halaman III DIPA.
4. Adanya kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan ternak, serta gagal lelang menyebabkan tidak tercapainya realisasi serapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5. Nilai kinerja anggaran tingkat satker belum optimal karena Satker belum melakukan penginputan data CRO secara keseluruhan karena masih menunggu selesainya distribusi ternak ke kelompok dan penyelesaian pengadaan lainnya.
6. Nilai efisiensi masih rendah, terutama pada Satker yang belum selesai pengadaan dan distribusi ternaknya, padahal telah dilakukan pembayaran dengan jaminan Bank Garansi.



Rekomendasi perbaikan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH, yaitu:

1. Target output Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan Ditjen PKH ke depan yaitu: Satuan capaian *output* Layanan Dukungan Manajemen hendaknya menggunakan satuan Laporan jika dalam satu tahun anggaran menghendaki target *output* 1 (satu) atau dapat menggunakan satuan Layanan jika dalam satu tahun anggaran menghendaki target *output* 12 (dua belas), agar tercapai keselarasan antara capaian *output* dengan realisasi anggaran.
2. Masing-masing direktorat teknis agar melakukan revisi informasi kinerja, jika ditemukan ketidaksesuaian data informasi kinerja pada aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas.
3. Masing-masing direktorat teknis agar melakukan inventarisir data informasi kinerja pada masing-masing aplikasi Monev, diantaranya target per Rincian Output (RO) dan level komponen, termasuk pada Satuan Kerja di bawahnya agar sudah sesuai dengan data terbaru setelah dilakukan revisi anggaran terakhir. Jika terdapat perbedaan data, agar berkoordinasi dengan kelompok perencanaan untuk proses pemutakhiran data di aplikasi KRISNA dan SatuDJA.
4. Unit Kerja Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan bertanggungjawab melakukan input data realisasi kinerja pada level: Komponen, Rincian Output Satker, Rincian Output dan Indikator Kinerja Kegiatan.
5. Masing-masing direktorat teknis diharapkan agar melakukan koordinasi kepada Satuan Kerja dibawahnya untuk melengkapi pelaporan level Komponen dan RO.
6. Masing-masing Satker dengan capaian RO rendah agar melakukan upaya:
 - a. Memastikan data-data terkait target per RO dan target volume RO agar sudah sesuai dengan data terbaru setelah dilakukan revisi anggaran terakhir. Jika ada perbedaan data, agar berkoordinasi dengan bagian yang menangani perencanaan di masing-masing unit kerja untuk dilakukan pemutakhiran data.
 - b. Memastikan pengisian Realisasi Volume RO, progress, dan keterangan telah terisi pada kolom Data Integrasi pada Aplikasi SMART.
7. Satker dengan capaian serapan rendah agar segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan serapan anggaran.
8. Satker dengan konsistensi anggaran rendah diharapkan agar melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA sesuai dengan realisasi belanjanya dan melakukan *updating* RPD halaman III DIPA triwulan IV tahun 2021 berdasarkan perhitungan rencana realisasi belanja Satker di triwulan IV tahun 2021 untuk diajukan revisinya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja NK Anggaran Ditjen PKH didukung oleh kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 49 dengan nilai efisiensi sebesar **57,16%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.



Tabel 49. Kegiatan Pendukung IKU 11 Tahun 2021

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	FISIK			KEUANGAN		CRO per KRO [CRO] ⁽¹⁾	(AAKRO x CRO) - RAKRO	$E = \frac{\sum((AAKRO \times (CRO)^{(1)}) - RAKRO)}{\sum(AAKRO)}$	NE = 50% + $\frac{E}{20} \times 50$
	TVRO	RVRO	CRO: RVRO / TVRO	AAKRO: Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	RAKRO: Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output				
IKU 11 Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan									
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal									
1787.001 Layanan Perencanaan (Layanan)	57	57	100%	26.863.262.000	26.103.903.210	100%	759.358.790	2,87%	57,16%
002 Layanan Pembendaharaan Internal (Layanan)	56	56	100%						
003 Layanan Pengadaan Barang Milik Negara (Layanan)	58	58	100%						
1787. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal									
001 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Laporan)	55	55	100%	2.156.957.000	2.084.714.994	100%	72.242.006		
JUMLAH				29.020.219.000	28.188.818.204		831.600.796		

Sumber: Ditjen PKH, 2021

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH pada tahun 2021 melebihi dari target yang telah ditetapkan karena adanya penguatan dalam tata kelola anggaran yang merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mengembangkan proses dan layanan kerja yang pada akhirnya memberikan hasil yang lebih baik.

Selain itu, Ditjen PKH berupaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja anggaran melalui pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) triwulanan, baik secara luring maupun secara daring. Pertemuan Monev tersebut menghadirkan peserta Tim Monev dari masing-masing Satker baik dari pusat maupun dari Unit Pelaksana Teknis dan Provinsi yang diisi dengan bimbingan teknis penginputan data, juga sekaligus dilakukan workshop pengentrian data, serta diskusi untuk penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Ditjen PKH.

Penurunan capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 karena adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan beberapa pengadaan ternak yang belum selesai dilakukan pada tahun 2021.

Rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH, maka akan dilakukan koordinasi secara intensif ke seluruh Satker dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses, metode kerja, sistem pengendalian, dan koordinasi yang didasari oleh kerja profesional, mengikuti aturan, serta integritas dan komitmen semua pegawai yang kuat. Selain itu, akan dilakukan perbaikan perencanaan, terutama penyesuaian Informasi Kinerja agar mudah dalam monitoring dan evaluasi. Adapun rekomendasi untuk perbaikan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH kepada semua unit kerja, yaitu:

1. Melakukan bedah DIPA/POK tahun 2022, antisipasi penyesuaian untuk awal tahun.
2. Persiapkan dan rancang pelaksanaan kegiatan mulai bulan Desember 2021.
3. Menyusun mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan tahun 2022.
4. Menyusun dan mendistribusikan Juknis dan Juklak pada bulan Januari tahun 2022.

5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun (*timeline* yang sudah direncanakan), sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terjadwal dan tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun.
6. Melakukan lelang Pra-DIPA.
7. Percepatan input data pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SIRUP.
8. Melaksanakan kegiatan belanja barang dari awal tahun.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan melakukan tindakan pengendalian.

3.3 Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya yang diraih oleh Ditjen PKH tahun 2021 diantaranya:

1. Penghargaan Predikat Zona Integritas menuju WBK Nasional tahun 2021 oleh BBVet Wates dan BBPMSOH Gunung Sindur dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Gambar 3. Penghargaan Predikat Zona Integritas menuju WBK Nasional Tahun 2021

2. Penghargaan SNI Award dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 oleh BET Cipelang, Pusvetma, BBVet Wates, dan BPMSP Bekasi dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).



Gambar 4. Penghargaan SNI Award dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021



3. Penghargaan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Resertifikasi SNI ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) dari PT. Garuda Sertifikasi Indonesia November Tahun 2021.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pagu Alokasi Anggaran Awal Tahun 2021 sebesar Rp.2,13 triliun. Selama berjalannya waktu terdapat revisi anggaran, sehingga pagu akhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.1,621 triliun. Selama TA. 2021 dilakukan 11 (sebelas) kali revisi yang menyebabkan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar satker lingkup Ditjen PKH. Kronologi revisi anggaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA I, Refocusing dan Realokasi Anggaran
 Revisi anggaran diawali di bulan Januari 2021 berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 Tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
 Melalui surat undangan Kepala Biro Perencanaan Nomor B.111/RC.020/A.1/1/2021 Tanggal 13 Januari 2021, dilakukan pembahasan rancangan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Pertanian TA 2021, dengan target penghematan Ditjen PKH sebesar Rp.754.772.529.000,- (Tujuh ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga pagu akhir menjadi Rp1.378.081.995.000 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Surat Pengesahan DIPA revisi terbit pada Tanggal 16 Februari 2021 melalui SPRA Nomor: S-113/AG/AG.3/2021.
- b. Revisi DIPA II, Revisi Buka Bintang Rehab Rumah Potong Hewan/RPH Gowa.
 Revisi anggaran dilakukan untuk membuka bintang/blokir kegiatan rehab RPH di Kab. Gowa yang sebelumnya belum dilengkapi dengan data dukung. Surat Pengesahan revisi tanggal 10 Maret 2021 sesuai SPRA No. S-177/AG/AG.3/2021.
- c. Revisi DIPA III berupa Penambahan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
 Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp.615.314.798.000,- (enam ratus lima belas miliar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu), sehingga pagu anggaran menjadi Rp1.993.396.793.000,- (Satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Pengesahan revisi tanggal 26 Maret 2021 melalui SPRA No. S-205/AG/AG.3/2021.
- d. Revisi DIPA IV dalam rangka Penghapusan RO Cadangan.
 Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penghapusan RO Cadangan kegiatan 1786 dari rehab RPH Kab. Gowa pada Satker BBVet Maros senilai Rp.1.930.000.000,- yang digunakan pada kegiatan yang sama yaitu rehab RPH Kota Makassar, BPMSPH, BVet Banjarbaru, Penyusunan DED Pembangunan RPH Gunung Kidul, dan kegiatan pusat. Surat pengesahan tanggal 12 April 2021 melalui SPRA No. S-240/AG/AG.3/2021.
- e. Revisi DIPA V, Penggabungan Kegiatan PEN



Revisi anggaran dalam rangka tindak lanjut hasil RAKER Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI, berupa pergeseran anggaran penyesuaian RO PEN, Pengadaan *Bull* di BIB Lembang, Pengembangan Ayam dan Itik di BPTU-HPT Pelaihari, Pengembangan Ternak Babi di BBVet Denpasar, Pengembangan ternak ruminansia potong di BIB Lembang, dan penyediaan informasi monitoring dan evaluasi program PEN. Surat pengesahan revisi tanggal 20 April 2021 melalui SPRA No. S-260/AG/AG.3/2021.

f. Revisi DIPA VI

Revisi anggaran dalam rangka pengembangan ternak perah/peralatan reproduksi/peralatan produksi pakan/peralatan pengolah daging/peralatan RPH di Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, serta Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Surat pengesahan revisi tanggal 1 Juli 2021 melalui SPRA No. S-425/AG/AG.3/2021.

g. Revisi DIPA VII

Revisi anggaran pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas Ditjen PKH antara lain:

- 1) Pengembangan ternak sapi lokal sebanyak 1.100 ekor di BPMSP, Bekasi;
- 2) Pengembangan Ternak Sapi Sumba Ongol 500 ekor di BPTU-HPT Sapi Bali;
- 3) Pengembangan kuda di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 26 ekor;
- 4) Pengembangan Bank Pakan;
- 5) Peningkatan Kerjasama Ditjen PKH-UNHAS;
- 6) Bimtek Peternakan;
- 7) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesmavet;
- 8) Tambahan Penyediaan Bibit BPTP dan Hibah BPTU-HPT Sembawa;
- 9) Fasilitasi Alsin di Provinsi Maluku;
- 10) Tambahan Pengembangan SPIP;
- 11) Fasilitasi *One Day with Indonesian Coffee and Fruits* dalam rangka pemasaran produk peternakan ke luar negeri;
- 12) Fasilitasi *Food Estate* Kalimantan Tengah.

Pengesahan revisi tanggal 21 Juli 2021 sesuai SPRA No. S-483/AG/AG.3/2021.

h. Revisi DIPA VIII

Revisi anggaran dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas PKH antara lain:

- 1) Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan di BPMSPH dan BVet Bukittinggi (pengadaan peralatan laboratorium);
- 2) Surveilans penyakit hewan di 8 UPT Balai Veteriner;
- 3) Penguatan Laboratorium Pakan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4) Pengembangan ayam lokasi di 143 kelompok, dengan satker pelaksanaan BPTUHPT Sembawa;
- 5) Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan di BPMSP Bekasi (pengadaan peralatan laboratorium);
- 6) Peningkatan mutu bibit dan benih ternak di BBIB Singosari, BIB Lembang dan BET Cipelang (pengadaan peralatan produksi);



- 7) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesmavet Pusat;
- 8) Pengembangan ternak ruminansia perah sebanyak 204 ekor untuk kelompok dengan satker pelaksana BBPTU-HPT Baturraden;
- 9) Pengembangan Unit Pengolah Pakan Sapi Potong di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
- 10) Sebelum Revisi DIPA VIII dilakukan revisi informasi kinerja berupa penambahan komponen Pengembangan Ternak Kuda pada RO Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak yang pengadaan ternaknya pada revisi DIPA VII.
Pengesahan revisi tanggal 6 Agustus 2021 sesuai SPRA No. S-614/AG/AG.3/2021.

i. Revisi DIPA IX

Revisi anggaran berupa pergeseran anggaran dalam rangka pengembangan ternak ruminansia potong SO sebanyak 500 ekor dan penambahan pengadaan ternak kuda, dan belanja modal peralatan di UPT.

Pengesahan revisi tanggal 27 Agustus 2021 sesuai SPRA No. S-679/AG/AG.3/2021.

j. Revisi DIPA X

Revisi anggaran dalam rangka tindak lanjut RAKER Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI, berupa pergeseran anggaran penyesuaian RO PEN dan penyediaan informasi monitoring dan evaluasi program PEN. Pengesahan revisi tanggal 22 September 2021 sesuai SPRA No. S-729/AG/AG.3/2021.

k. Revisi DIPA XI

Revisi anggaran berupa pergeseran anggaran dan pemanfaatan sisa kontraktual untuk pemenuhan belanja modal peralatan dan persediaan bahan pengujian laboratorium di UPT Balai Veteriner dan Keswan Kesmavet, serta pengadaan pakan di UPT. Pengesahan revisi tanggal 29 Oktober 2021 sesuai SPRA No. S-820/AG/AG.3/2021.

Kronologis revisi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2021 secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



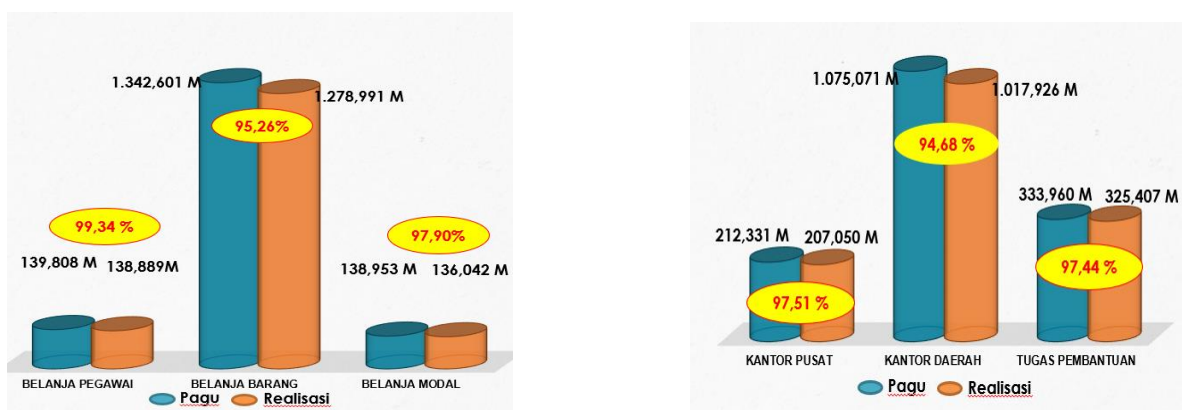


Gambar 5. Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2021

Dari total anggaran 1,621 triliun, sebesar 12,81% (Rp 207 milyar) anggaran dialokasikan di kantor pusat, sedangkan untuk kantor daerah sebesar 66,60% (Rp

1.079 milyar) dan TP Provinsi sebesar 20,60% (Rp. 333 milyar). Anggaran tersebut dialokasikan di 57 satker, terdiri dari 1 kantor pusat, 22 kantor daerah (UPT) dan 34 satker TP Provinsi. Serapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun anggaran 2021 adalah sebesar 95,62% atau Rp.1,550 triliun dari total alokasi anggaran Ditjen PKH Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1,621 triliun.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis kewenangan adalah: (i) Satker Pusat sebesar 97,51% atau Rp 207,050 miliar dari anggaran sebesar Rp.212,331 miliar, (ii) Satker UPT sebesar 94,68% atau Rp. 1.017,926 miliar dari anggaran sebesar Rp 1.075,071 miliar, dan (iii) Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 97,44% atau Rp 325,407 miliar dari anggaran sebesar Rp 333,960 miliar



Grafik 6. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja dan Kewenangan

Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Kementerian Keuangan, 2021



Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu (i) Belanja Pegawai sebesar 99,34% atau Rp.138,889 miliar dari pagu Rp.139,808 miliar,- (ii) Belanja Barang sebesar 95,26% atau Rp.1.278,991 miliar dari pagu Rp.1.342,601 miliar (iii) Belanja Modal sebesar 97,90% atau Rp.136,042 miliar dari pagu Rp.138,953 miliar.

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama yaitu: (i) Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar 94,04% atau Rp 906,699 miliar dari pagu Rp 964,208 miliar (ii) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak 97,11% atau Rp.116,871 miliar dari pagu Rp.120,348 miliar (iii) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 98,46% atau Rp.176,827 miliar dari pagu Rp.179,595 miliar (iv) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 95,10% atau Rp.51,459 miliar dari pagu Rp 54,109 miliar (v) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 97,87% atau Rp 22,051 miliar dari pagu sebesar Rp.22,532 miliar dan (vi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKH 98,54% atau Rp.276,475 miliar dari pagu Rp.280,568 miliar.

Tabel 50. Realisasi Anggaran per Kegiatan (dalam ribuan)

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak	120.348.719	116.871.282	97,11
2	1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	179.595.991	176.827.701	98,46
3	1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	964.208.653	906.699.532	94,04
4	1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	54.149.765	51.459.583	95,10
5	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	280.568.415	276.475.426	98,54
6	5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	22.532.169	22.051.726	97,87
Total		1.621.363.712	1.550.385.249	95,62

Sumber: Ditjen PKH, 2021



IV. PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKH merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN & RB No. 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Ditjen PKH. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Ditjen PKH kepada masyarakat (publik).

Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2021 disusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program, 6 (enam) indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil, 3 (tiga) indikator kinerja masuk kategori berhasil, dan 2 (dua) indikator kinerja masuk kategori kurang berhasil. Oleh karena itu, pencapaian kinerja Ditjen PKH dikatakan **sangat berhasil**.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan, serta segenap jajaran Ditjen PKH dalam peningkatan kinerja masing-masing unit kerja. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Ditjen PKH tahun 2021.

Keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2021 khususnya perkembangan capaian 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program tersebut juga tidak terlepas dari dukungan seluruh kegiatan yang ada di lingkup Ditjen PKH baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Ditjen PKH. Selain itu, juga dukungan pengendalian internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** ada 6 (enam) yaitu: (1) Peningkatan produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan produksi susu; (3) Persentase wilayah yang terkendali *zoonosis*; (4) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis; (5) Tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan (6) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH. Sedangkan Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan dan (2) Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dan (3) Nilai PMPRB Ditjen PKH, serta Indikator kinerja yang masuk kategori



kurang berhasil yaitu: (1) Peningkatan produksi telur dan (2) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021, khususnya pada peningkatan populasi dan produksi ternak, peningkatan volume dan nilai ekspor subsektor peternakan, penurunan impor daging sapi dan susu menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi program yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

1. Pengembangan ternak ruminansia (sapi/kerbau) melalui kegiatan SIKOMANDAN tahun 2020-2021 mampu menambah kelahiran sebanyak 4.538.617 ekor. Namun demikian, pengembangan sapi potong di Indonesia, saat ini masih terkendala belum banyaknya pengembangan budidaya yang berskala ekonomi, sehingga produksi daging sapi/kerbau belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
2. Produksi daging khususnya ruminansia kecil telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan sudah ekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia.
3. Produksi unggas (telur dan daging ayam ras) saat ini sudah swasembada, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara, namun terdapat kendala di aspek hilirisasi untuk pasar dalam negeri.
4. Produksi susu nasional tahun 2021 sebesar 962.680 ton atau mengalami kenaikan sebesar 1,56% dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

Untuk menjawab permasalahan terkait dengan ketersediaan daging sapi/kerbau, ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Ditjen PKH, antara lain:

1. Penguatan UPT Perbibitan, termasuk optimalisasi asset lahan UPT untuk pengembangan sapi.
2. Pengembangan sapi potong berdasarkan pemetaan wilayah berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif.
3. Menyusun program terobosan sebagai solusi untuk memperkuat kelembagaan peternakan sapi potong melalui Super Program Prioritas, yaitu Korporasi Desa Sapi.
4. Mendorong pembiayaan yang bersumber dari non APBN antara lain: kredit perbankan (KUR), kerja sama investasi antar negara.
5. Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
6. Melanjutkan program percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau di dalam negeri melalui kegiatan SIKOMANDAN (Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri).
7. Penambahan impor bibit sapi indukan untuk meningkatkan jumlah induk sapi/kerbau dalam negeri dengan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tahun-tahun sebelumnya.
8. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
9. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota).



Dalam mengatasi permasalahan terkait upaya stabilisasi perunggasan, maka ada beberapa hal yang akan dilakukan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, antara lain:

1. Melakukan verifikasi dan validasi data perunggasan secara terintegrasi, serta melakukan harmonisasi data dengan *stakeholder* terkait.
2. Melakukan audit populasi dan performa *Parent Stock* di perusahaan pembibit (unit *farm* dan *hatchery*).
3. Mendorong Implementasi peningkatan kemitraan ayam ras pedaging sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan.
4. Kerjasama dengan Kementerian/lembaga, perguruan tinggi, asosiasi untuk meningkatkan promosi konsumsi daging dan telur ayam ras sebagai sumber protein hewani yang terjangkau.
5. Mengusulkan agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengupayakan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan daging dan telur ayam ras direalisasikan setiap bulan.
6. Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
7. Mendorong investasi di industri hilir.
8. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas produknya sesuai dengan standar internasional dan melakukan ekspor.
9. Koordinasi dengan atase-atase pertanian yang ditugaskan di beberapa negara untuk melakukan promosi guna mendorong ekspor unggas dan produk unggas.
10. Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk mendorong adanya *Roadmap* Perunggasan Nasional.

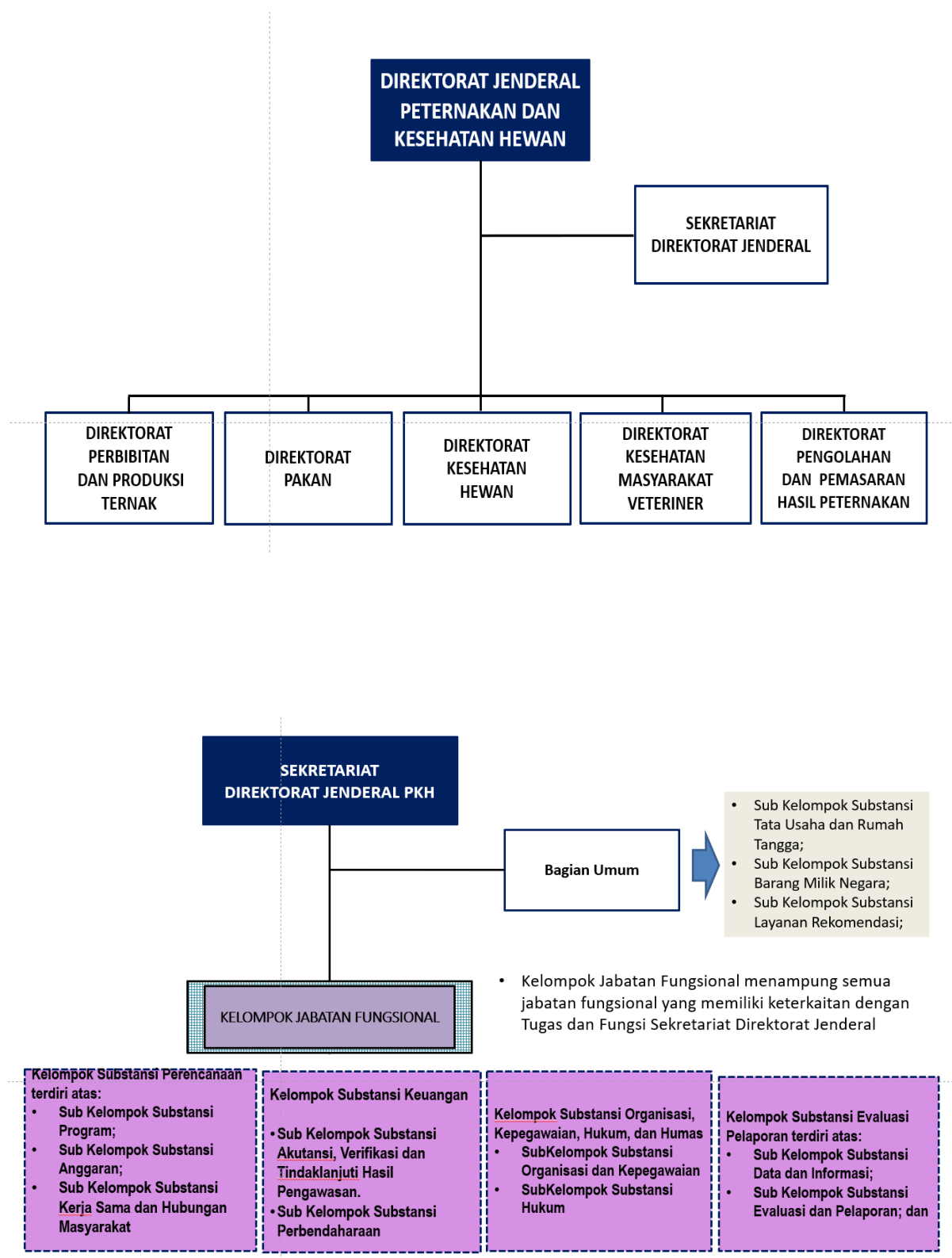
Untuk mengatasi permasalahan terkait persusuan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan Ditjen PKH, antara lain: (1) Perlu menambah anggaran untuk men-*support* pengembangan sapi perah yang sangat terbatas, apabila dibandingkan dengan anggaran untuk pengembangan sapi potong; (2) Mendorong peningkatan produktivitas susu sapi di tingkat peternak; (3) Mendorong peternak untuk memanfaatkan pembiayaan perbankan untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah di tingkat peternak yang masih di bawah skala ekonomis; dan (4) Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan. Sedangkan untuk pengembangan kambing dan domba akan dilakukan beberapa upaya yaitu: (1). Menyusun program terobosan sebagai solusi untuk memperkuat kelembagaan peternakan sapi potong melalui Super Program Prioritas (SPP), yaitu Korporasi Kambing/Domba; (2). Mendorong pembiayaan yang bersumber dari nonAPBN antara lain: kredit perbankan (KUR), kerja sama investasi antar negara; (3). Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif; (4). Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

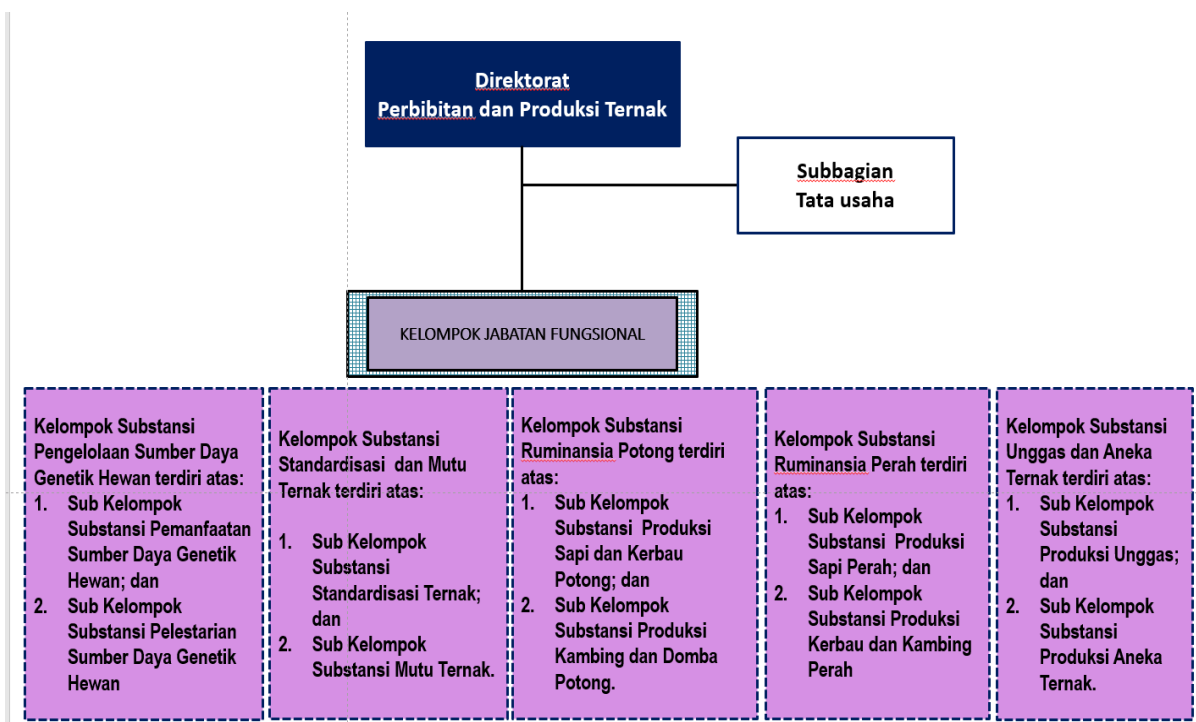


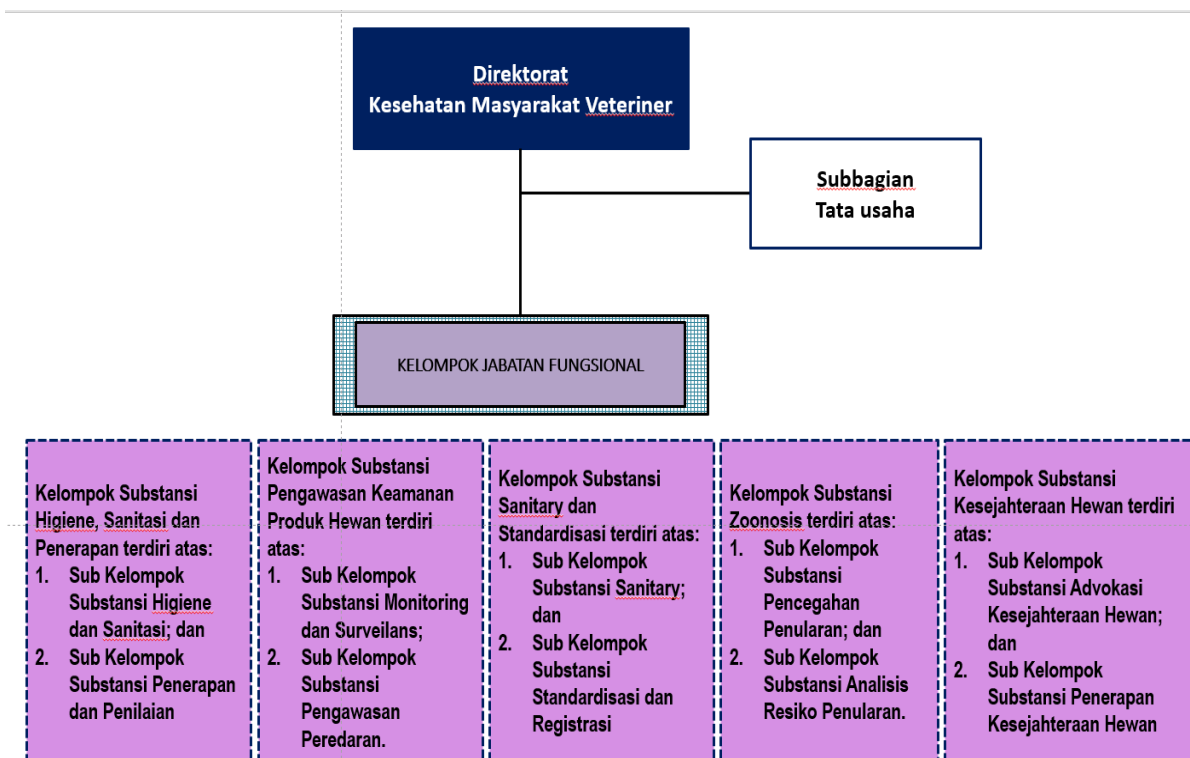
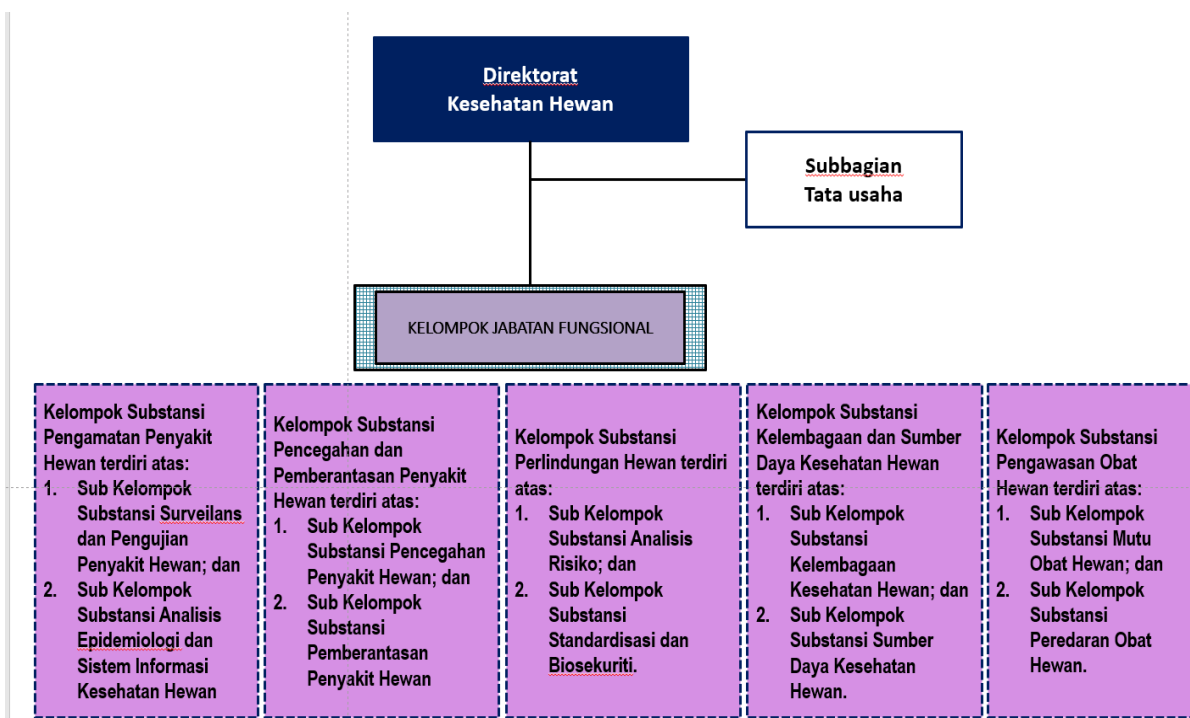
LAMPIRAN

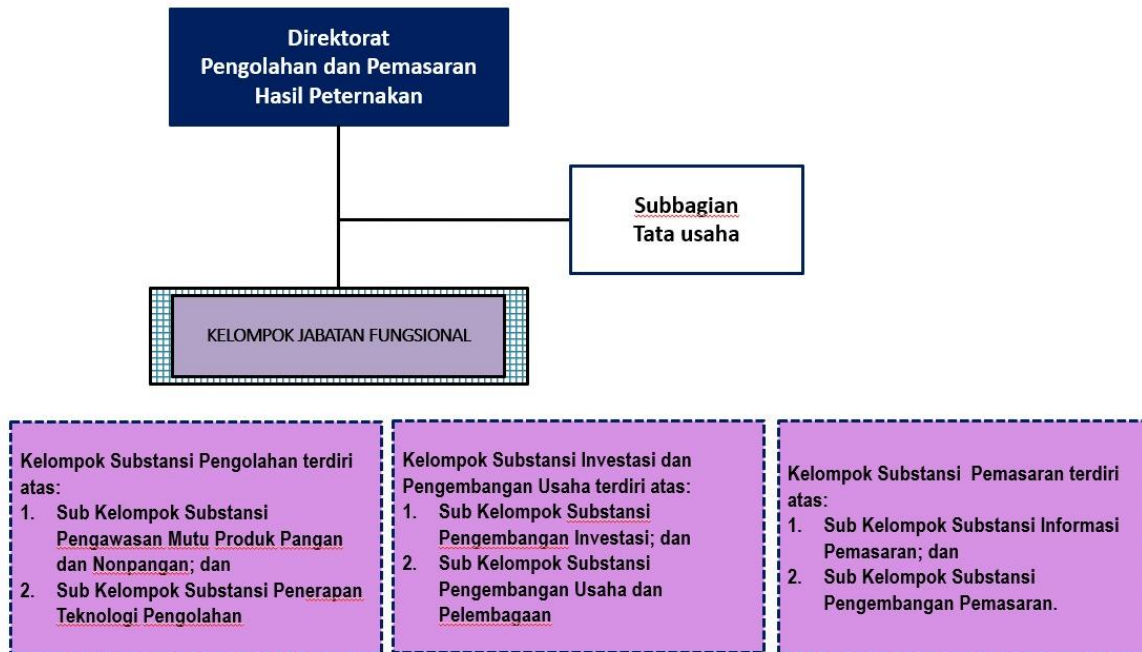


Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan









Lampiran 2. Data Pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

NO.	UNIT KERJA	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	JUMLAH
1.	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	1	1
2.	SEKRETARIAT DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	6	100	10	117
3.	DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK	-	2	43	14	59
4.	DIREKTORAT PAKAN	-	1	34	9	44
5.	DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN	-	9	37	35	81
6.	DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	3	22	21	46
7.	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	-	2	35	10	47
8.	PUSAT VETERINER FARMA	-	20	69	20	109
9.	BBPMSOH GUNUNG SINDUR	-	15	48	15	78
10.	BALAI BESAR VETERINER WATES	-	7	60	17	84
11.	BALAI BESAR VETERINER MAROS	-	12	45	12	69
12.	BALAI BESAR VETERINER DENPASAR	-	16	32	15	63
13.	BBPTUHPT BATURRADEN	2	49	58	9	118
14.	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	-	17	52	12	81
15.	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG	3	17	45	6	71
16.	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR	3	19	36	3	61
17.	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN	1	12	30	13	56
18.	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN	-	11	30	1	42
19.	BALAI VETERINER MEDAN	1	9	39	8	57
20.	BALAI VETERINER BUKITTINGGI	-	10	36	10	56
21.	BALAI VETERINER LAMPUNG	-	10	39	9	58
22.	BALAI VETERINER BANJARBARU	-	15	28	10	53
23.	BPTUHPT INDRAPURI	2	9	43	9	63
24.	BPTUHPT SIBORONGBORONG	3	31	36	4	74
25.	BPTUHPT PADANG MANGATAS	1	34	39	5	79
26.	BPTUHPT SEMBAWA	3	34	39	8	84
27.	BPTUHPT PELAIHARI	-	22	34	2	58
28.	BPTUHPT DENPASAR	2	26	26	3	57
29.	BALAI VETERINER SUBANG	-	10	40	9	59
TOTAL PEGAWAI DITJEN PKH		22	428	1.175	300	1.925



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,



Syahrul Yasin Limpo



Nasrullah



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak	Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik)	0,85 %
		Peningkatan Produksi Susu	0,55 %
		Peningkatan Produksi Telur	2,15 %
2	Meningkatnya Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Pangan Asal Ternak	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	85,2 %
3	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	74 %
4	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,5 %
5	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	91,25 %
6	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	87 %
7	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	15 %
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	32,75 <i>Nilai</i>
9	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	88.68 <i>Nilai</i>



No	Program	Anggaran
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 22.532.169.000
2.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 1.323.199.708.000
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 275.631.835.000
Total		Rp. 1.621.363.712.000

Jakarta, November 2021

Menteri Pertanian,



Syahrul Yasin Limpo

Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan



Nasrullah



Lampiran 4. Tabel Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2017-2021

Produksi/Production

Tabel 10.1 **Produksi Daging, Telur, dan Susu Tahun 2017 - 2021**
Table 10.1 **Meat, Egg, and Milk Production 2017 - 2021**

(000 ton)

No	Jenis/ Species	Tahun/Year				
		2017	2018	2019	2020	2021 ^a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	DAGING/MEAT	4.596,13	4.778,78	4.888,09	4.555,29	4.792,22
1	Sapi/Beef	486,32	497,97	504,80	453,42	437,78
2	Kerbau/Buffalo	29,38	25,35	24,79	18,53	20,97
3	Kuda/Horse	2,74	2,40	1,85	1,24	1,53
4	Kambing/Mutton	70,35	70,15	72,85	61,71	61,72
5	Domba/Lamb	55,11	82,27	70,07	54,19	55,86
6	Babi/Pork	317,40	215,81	236,28	280,94	323,67
7	Ayam Buras/Native Chicken	300,13	287,16	292,33	270,21	272,00
8	Ayam Ras Petelur/Layer	114,90	141,60	141,51	152,76	146,30
9	Ayam Ras Pedaging/Broiler	3.175,85	3.409,56	3.495,09	3.219,12	3.426,04
10	Itik/Duck	36,39	38,65	39,81	35,75	38,79
11	Itik Manila/Muscovy Duck	5,93	6,03	6,75	5,36	5,40
12	Kelinci/Rabbit	0,48	0,51	0,70	0,46	0,46
13	Puyuh/Quail	1,14	1,32	1,26	1,60	1,68
II	TELUR/EGG	5.216,64	5.267,93	5.354,62	5.874,38	5.926,03
1	Ayam Buras/Native Chicken	221,00	212,34	246,69	358,86	381,61
2	Ayam Ras Petelur/Layer	4.632,83	4.688,12	4.753,38	5.141,57	5.156,00
3	Itik/Duck	302,70	306,54	294,01	316,95	329,57
4	Itik Manila/Muscovy Duck	35,09	31,97	34,67	32,35	33,57
5	Puyuh/Quail	25,02	28,96	25,86	24,65	25,28
III	SUSU/MILK	928,11	951,00	944,54	946,91	962,68

Keterangan/Note : ^a) Angka sementara/Preliminary figures

Produksi Daging Ayam Ras Pedaging dan Telur Ayam Ras Petelur dari laporan perusahaan melalui Sistem Perunggasan Nasional yang diolah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan /
The source of Broiler Meats and Layer Eggs production from the company's report through the National Poultry System processed by the Directorate General of Livestock and Animal
Health Services



Lampiran 5. Tabel Populasi Ternak Tahun 2017-2021

Tabel 8.1
Table 8.1

Populasi Ternak Tahun 2017 - 2021
Livestock Population 2017 - 2021

(000 Ekor/000 Head)

No	Jenis/ Species	Tahun/Year				
		2017	2018	2019	2020	2021 ^{a)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I TERNAK BESAR/LARGE LIVESTOCK						
1	Sapi Potong/Beef Cattle	16.429	16.433	16.930	17.440	18.054
2	Sapi Perah/Dairy Cattle	540	582	565	568	579
3	Kerbau/Buffalo	1.322	894	1.134	1.154	1.189
4	Kuda/Horse	409	378	375	384	401
II TERNAK KECIL/SMALL LIVESTOCK						
1	Kambing/Goat	18.208	18.306	18.463	18.690	19.229
2	Domba/Sheep	17.142	17.611	17.834	17.524	17.903
3	Babi/Pig	8.261	8.254	8.542	7.623	8.012
III TERNAK UNGGAS/POULTRIES						
1	Ayam Buras/Native Chicken	299.701	300.978	301.761	305.445	317.054
2	Ayam Ras Petelur/Layer	374.778	324.153	336.490	345.181	368.192
3	Ayam Ras Pedaging/Broiler	2.922.636	3.137.707	3.169.805	2.919.516	3.107.183
4	Itik/Duck	49.056	50.528	47.783	48.245	50.312
5	Itik Manila/Muscovy Duck	8.502	9.024	9.446	8.325	8.340
IV ANEKA TERNAK/VARIOUS LIVESTOCK						
1	Kelinci/Rabbit	1.244	1.332	1.247	1.199	1.203
2	Puyuh/Quail	14.570	14.062	14.844	15.223	15.227

Keterangan/Note : ^{a)} Angka sementara/Preliminary figures

Populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2018 dan 2019 bersumber dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Pusat Statistik/ Beef Cattle, Dairy Cattle, and Buffaloes Population in 2018-2019 from the Directorate General of Livestock and Animal Health Services and BPS-Statistics Indonesia

Populasi Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging bersumber dari laporan perusahaan melalui sistem perunggasan nasional yang diolah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan / The source of Layers and Broilers Population from the company's report through the National Poultry System processed by the Directorate General of Livestock and Animal Health Services



Lampiran 6. Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2021

No	Jenis Unit Usaha	Jumlah Sampel Keseluruhan	Jumlah Sampel Yang Memenuhi Persyaratan	Parameter Uji	%
A	DAGING	15.362	14.605		94
1	Kios Daging	7.236	7.018	Cemaran mikroba, Residu antibiotika, Residu logam berat	97
2	Cold Storage	1.951	1.892	Cemaran mikroba, Residu antibiotika, Residu logam berat	97
3	RPH-U	2.443	2.320	Cemaran mikroba, Residu antibiotika, Residu logam berat	95
4	RPH-R	1.966	1.750	Cemaran mikroba, Residu antibiotika, Residu logam berat	89
5	Pengolahan Daging	1.767	1.625	Cemaran mikroba, Residu antibiotika, Residu logam berat	92
B	TELUR	815	815		100
6	PPPTK	815	815	Cemaran mikroba, Residu antibiotika	100
C	SUSU SEGAR	685	397		58
7	Penampungan/Koperasi/Pengolahan Susu	685	397	Cemaran mikroba, Residu antibiotika, Aflatoksin M1	58
Jumlah Sampel Produk Hewan		16.862	15.817	% Pangan Segar Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan (Daging, Susu, Telur)	84



Lampiran 7. Status Wilayah Terhadap Kasus Penyakit *Rabies* dan *Anthrax* Tahun 2021 Dibandingkan dengan Kasus Tahun 2020

NO	PROVINSI	Kasus Tahun		status wilayah <i>Rabies</i>	Kasus Tahun		status wilayah <i>Anthrax</i>
		2020	2021		2020	2021	
1	Aceh	0	0	terkendali	0	0	terkendali
2	Bali	2	0	terkendali	0	0	terkendali
3	Bangka Belitung	0	0	terkendali	0	0	terkendali
4	Banten	0	0	terkendali	0	0	terkendali
5	Bengkulu	0	0	terkendali	0	0	terkendali
6	DI Yogyakarta	0	0	terkendali	3	0	terkendali
7	DKI Jakarta	0	0	terkendali	0	0	terkendali
8	Gorontalo	1	0	terkendali	24	0	terkendali
9	Jambi	0	0	terkendali	0	0	terkendali
10	Jawa Barat	0	0	terkendali	0	0	terkendali
11	Jawa Tengah	0	0	terkendali	0	1	tidak terkendali
12	Jawa Timur	0	0	terkendali	1	8	tidak terkendali
13	Kalimantan Barat	2	5	tidak terkendali	0	0	terkendali
14	Kalimantan Selatan	0	0	terkendali	0	0	terkendali
15	Kalimantan Tengah	0	0	terkendali	0	0	terkendali
16	Kalimantan Timur	0	0	terkendali	0	0	terkendali
17	Kalimantan Utara	0	0	terkendali	0	0	terkendali
18	Kepulauan Riau	0	0	terkendali	0	0	terkendali
19	Lampung	1	1	terkendali	0	0	terkendali
20	Maluku Utara	0	0	terkendali	0	0	terkendali
21	NTB	6	7	tidak terkendali	0	0	terkendali
22	NTT	5	3	terkendali	8	0	terkendali
23	Papua	0	0	terkendali	0	0	terkendali
24	Papua Barat	0	0	terkendali	0	0	terkendali
25	Riau	4	0	terkendali	0	0	terkendali
26	Sulawesi Barat	0	1	tidak terkendali	0	0	terkendali
27	Sulawesi Selatan	4	0	terkendali	0	0	terkendali
28	Sulawesi Tengah	1	1	terkendali	0	0	terkendali
29	Sulawesi Tenggara	0	0	terkendali	0	0	terkendali
30	Sulawesi Utara	7	9	tidak terkendali	0	0	terkendali
31	Sumatera Barat	2	0	terkendali	0	0	terkendali
32	Sumatera Selatan	2	2	terkendali	0	0	terkendali
33	Sumatera Utara	1	3	tidak terkendali	0	0	terkendali
34	Maluku	2	2	Tidak terkendali	0	0	terkendali



Lampiran 8. Status Kesehatan Hewan Per Provinsi Tahun 2021

No	Provinsi	Nilai Rata-rata AKH
1	Papua	93,5
2	Kalimantan Timur	92,8
3	Bangka Belitung	90,7
4	Lampung	90,6
5	Nusa Tenggara Barat	80,0
6	Kalimantan Barat	89,3
7	Maluku Utara	88,9
8	Bengkulu	88,2
9	Kalimantan Utara	87,1
10	Maluku	86,2
11	Sumatera Selatan	86,0
12	Banten	85,8
13	Papua Barat	82,7
14	Dki Jakarta	82,5
15	Kalimantan Tengah	82,5
16	Kalimantan Selatan	82,1
17	Sulawesi Utara	79,5
18	Sulawesi Barat	79,1
19	Jawa Tengah	79,0
20	Jawa Barat	78,6
21	Jambi	78,1
22	Sulawesi Tenggara	78,0
23	Jawa Timur	77,7
24	Nusa Tenggara Timur	77,2
25	Sumatera Utara	77,1
26	Kepulauan Riau	76,9
27	Di Yogyakarta	76,8
28	Sulawesi Tengah	76,2
29	Bali	74,1
30	Sumatera Barat	73,1
31	Sulawesi Selatan	71,8
32	Riau	70,0
33	Aceh	69,4
34	Gorontalo	61,6
Rata-Rata		80,7



Lampiran 9. Data Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Penerima	Lokasi
1	Sarana Prasarana Pakan Olahan	1 Unit	Kelompok Ternak Bumbang Wetan	Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, NTB
2	Sarana Prasarana Pakan Olahan	1 Unit	Kelompok Ternak Sido Makmur 3	Desa Sidomukti, Kec. Tanjungsari, Kab. Lampung Selatan, Lampung
3	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kelompok Ternak Merta Nadi	Desa Tengkidak, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali
4	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Suka Mekar Lestari	Desa Bukit Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali
5	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Al-Hikmah	Desa Bukit Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali
6	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Bukit Sari	Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, Bali
7	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Muja Mekar	Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali
8	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Gunung Putih Berjaya	Desa Gunung Putih, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Kaltara
9	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Tunas Baru	Desa Gunung Putih, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Kaltara
10	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Maspul Jaya	Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Kaltara
11	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Mekar Lestari	Desa Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Kaltara
12	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Harapan Mandiri	Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Kaltara
13	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Ngudi Mulyo	Desa Kujau, Kec. Belayau Kab. KTT, Kaltara
14	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Suka Maju	Desa Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kab. Tarakan, Kaltara
15	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Harapan Sejahtera	Desa Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kab. Tarakan, Kaltara
16	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Sejahtera	Desa Malinau Hilir, Kec. Malinau Hilir, Kab. Malinau, Kaltara
17	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Usaha Mandiri	Desa Malinau, Kec. Malinau, Kab. Malinau, Kaltara
18	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Lestari	Desa Malinau Hilir, Kec. Malinau Hilir, Kab. Malinau, Kaltara
19	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Mapalus	Desa Leleoto, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara, Maluku
20	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Maju Jaya	Desa Daka Ino, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, Maluku
21	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Talenta	Desa Tataleka, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Maluku
22	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Berkat Yakin	Desa Pulau Beralo, Kec. Kuantan Hilir Sebrang, Kab. Kuansing, Riau
23	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Al Muhajirin	Desa Pulau Pembatang, Kec. Pangean, Kab. Kuansing, Riau
24	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	KPIB Karya Bersama	Desa Kuantan Babu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, Riau
25	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Serumpun Jaya	Desa Redang, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau
26	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Barokah	Desa Bunut Lembah Subur, Kec. Krumutan, Kab. Pelalawan, Riau
27	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Sumber Rezeki	Desa Pangkalan Kuras, Kec. Sidomukti, Kab. Pelalawan, Riau
28	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Tunas Harapan	Desa Merangkai, Kec. Dayun, Kab. Siak, Riau
29	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Tembesu	Desa Dayun, Kec. Dayun, Kab. Siak, Riau
30	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Sabar Jaya	Desa Pasiran, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, Riau
31	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Ekonomi Sejahtera	Desa Prapat Tunggal, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau
32	Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Eka Makmur	Desa Mesuji Raya, Kec. Mataram Jaya, Kab. OKI, Sumatera Selatan
33	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BBVet Denpasar	BBVet Denpasar
34	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BBVet Maros	BBVet Maros
35	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BBVet Wates	BBVet Wates
36	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	Bvet Subang	Bvet Subang
37	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	Bvet Lampung	Bvet Lampung
38	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	Bvet Bukittinggi	Bvet Bukittinggi
39	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	Bvet Banjarbaru	Bvet Banjarbaru
40	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	Bvet Medan	Bvet Medan
41	Container Semen Beku	3 Unit	Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian
42	Container Semen Beku	2 Unit	Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
43	Container Semen Beku	1 Unit	Provinsi Maluku	Dinas Pertanian
44	Container Semen Beku	242 Unit	Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
45	Container Semen Beku	51 Unit	Provinsi Lampung	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
46	Container Semen Beku	1 Unit	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
47	Container Semen Beku	1 Unit	Provinsi Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
48	Container Semen Beku	1 Unit	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
49	Container Semen Beku	32 Unit	Provinsi Jambi	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
50	Container Semen Beku	1.162 Unit	Provinsi Jawa Timur	UPT Inseminasi Buatan
51	Container Semen Beku	2 Unit	Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
52	Container Semen Beku	3 Unit	Provinsi Sulawesi Selatan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Lampiran 10. Data Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Penerima	Lokasi	Tingkat Kemanfaatan
1	Sarana Pengolahan Susu	1 Unit	Kelompok Umbul Mulyo	Bukik Malintang, Nagari Lubuk Gadang, Kec. Sangir Kab. Solok Selatan Sumbar	Termanfaatkan
2	Sarana Pengolahan Pupuk	1 Unit	Kelompok Tunas Maju 2	Desa Baskara, Kec. Namang Kab. Bangka Tengah-Babel	Termanfaatkan
3	Sarana Pengolahan Pupuk	1 Unit	Kelompok Taruna Mukti	Desa Cibodas, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung-Jabar	Termanfaatkan
4	Sarana Pengolahan Susu	1 Unit	KT. Tambah Rejo	Gendu, Kec. Jatimulyo, Kec. Grimulyo, Kab. Kulon Progo, DIY	Termanfaatkan
5	Sarana Pengolahan Pupuk	1 Unit	Kelompok Sato Amerta Utama	Banjar Rening, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali	Termanfaatkan
6	Sarana Pengolahan Uggas	1 Unit	Kelompok Tui Jati	Dusun Jerubut, Desa Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, NTB	Termanfaatkan
7	Sarana Pengolahan Daging	1 Unit	Kelompok Azzahra	Jl. Poros ATKP, Kec. Bontoa, Kab. Maros, Sulsel	Termanfaatkan
8	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Barokah Jaya	Desa Wonodadi, Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan-Lampung	Termanfaatkan
9	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Bumi Asih Sejahtera	Desa Wawasan, Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan-Lampung	Termanfaatkan
10	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Sukamaju II	Desa Purwodadi Dalam, Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan-Lampung	Termanfaatkan
11	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Sumber Rezeki	Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan-Lampung	Termanfaatkan
12	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Sudi Makmur III	Desa Sidomukti, Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan-Lampung	Termanfaatkan
13	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Genting Makmur Jaya	Desa Negorejo, Kec. Lumbang Kab. Probolinggo-Jatim	Termanfaatkan
14	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Baru Muncul	Desa Lumbang, Kec. Lumbang Kab. Probolinggo-Jatim	Termanfaatkan
15	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Makmur III	Desa Wonogoro, Kec. Lumbang Kab. Probolinggo-Jatim	Termanfaatkan
16	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Mukti Jaya Satu	Desa Sapih, Kec. Lumbang Kab. Probolinggo-Jatim	Termanfaatkan
17	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Margi Santoso III	Desa Punt, Kec. Lumbang Kab. Probolinggo-Jatim	Termanfaatkan
18	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Ranch Ria 1	Desa Ria 1, Kec. Riung Barat Kab. Ngada-NTT	Belum dimanfaatkan
19	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Wolomeze 2	Desa Wobomeze 2, Kec. Riung Barat Kab. Ngada-NTT	Belum dimanfaatkan
20	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Ranch Ria	Desa Ria, Kec. Riung Barat Kab. Ngada-NTT	Belum dimanfaatkan
21	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Ranch Wolomeze	Desa Wobomeze, Kec. Riung Barat Kab. Ngada-NTT	Belum dimanfaatkan
22	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Ranch Ngara 2	Desa Ngara, Kec. Riung Barat Kab. Ngada-NTT	Belum dimanfaatkan
23	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Mekar Jati	Kel. Mekar Jati, Desa Mertak, Kec. Pujut Kab. Lombok-NTB	Termanfaatkan
24	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Mele Maju	Desa Sukadana, Kec. Pujut Kab. Lombok-NTB	Termanfaatkan
25	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Tandur Desi	Desa Pengingat, Kec. Pujut Kab. Lombok-NTB	Termanfaatkan
26	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Dui Uhp	Desa Bangket Parak, Kec. Pujut Kab. Lombok-NTB	Termanfaatkan
27	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Tunas Karya II	Desa Teruwai, Kec. Pujut Kab. Lombok-NTB	Termanfaatkan
28	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Ballaparang	Desa Kalase'rena, Kec. Botonompo Kab. Gowa-Sulsel	Termanfaatkan
29	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Balam bungan	Desa Tam allayang, Kec. Botonompo Kab. Gowa-Sulsel	Termanfaatkan
30	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Alerang I	Desa Bontolangkasa Selatan, Kec. Botonompo Kab. Gowa-Sulsel	Termanfaatkan
31	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Juluero	Desa Bontolangkasa, Kec. Botonompo Kab. Gowa-Sulsel	Termanfaatkan
32	Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit	Kelompok Cipta Wahana	Desa Bategulung, Kec. Botonompo Kab. Gowa-Sulsel	Termanfaatkan
33	Sarana Tata Naga	1 Unit	Dinas Peternakan Kota Kupang	Jl. Timor Raya KM 7 Kelurahan Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT	Belum dimanfaatkan
Jumlah		33 Unit			
Rerata Tingkat Kemanfaatan Sarpras		94 %			



Lampiran 11. Data Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021

No	Komoditas/Commodities	2017		2018		2019		2020		2021	
		Volume (kg)	Nilai (USD)	Volume (kg)	Nilai (USD)	Volume (kg)	Nilai (USD)	Volume (kg)	Nilai (USD)	Volume (kg)	Nilai (USD)
(1)	2	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)
A	Temak/Livestock	29.176.854	63.985.608	28.398.742	60.949.932	31.279.363	66.038.048	33.148.600	80.407.271	25.759.525	61.871.086
1	Kuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Keludai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sapi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kerbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Babi	28.711.950	59.884.047	27.862.635	55.930.137	30.721.543	60.684.538	32.751.106	75.489.693	25.167.463	55.854.927
6	Biri-biri	-	-	815.000	346.772	21.000	97.704	1.767.45	685.686	250.450	959.242
7	Kambing	6.240	11.544	11.255	128.950	15.120	118.941	49.15	19.150	136.224	381.122
8	Unggas	218	926	3.756	67.478	11.695	317.923	223.16	285.578	17.485	216.346
9	Lebah hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bintang hidup lainnya	458.446	4.089.091	4.395.96	4.476.595	510.004	4.818.942	192.979	3.927.165	187.903	4.459.449
B	Hasil Temak/Livestock Product	146.035.668	436.078.594	152.143.940	446.993.171	154.773.093	523.890.058	17.487.3138	733.756.382	172.241.440	747.910.837
1	Daging	4.033.178	18.821.875	3.647.604	17.025.341	3.643.801	18.581.398	2.859.753	15.448.684	2.983.641	17.444.195
a	Sapi	28.638	82.410	13.657	35.866	23.688	53.821	2.7570	53.841	69.772	260.255
b	Babi	605	10.100	28.279	108.682	2.532	17.906	467	382	13.542	52.791
c	Kambing/domba	34	737	-	-	1.116	6.562	406	3.439	140	913
d	Kuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Unggas	325.273	670.785	4.188.88	898.241	740.027	1.747.615	6.204.37	1.145.544	673.702	1.441.116
f	Jeroan sapi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Jeroan Non sapi	-	-	-	-	8.000	2.780	-	-	-	-
h	Daging lainnya	3.678.628	18.057.843	3.186.781	15.982.551	2.868.438	16.752.734	2.210.874	14.245.479	2.226.484	15.688.121
2	Susu	33.870.557	53.635.086	35.227.357	58.283.272	37.342.468	68.267.307	4.391.2625	84.206.924	47.167.867	94.931.468
a	Susu dan kepalasusu	27.174.169	40.505.881	23.129.057	39.307.848	21.421.450	45.238.268	25.462.747	59.656.613	24.920.680	62.960.757
b	Yogurt	796.855	795.674	2.046.111	2.541.194	2.741.415	3.566.107	5.109.082	5.521.656	5.430.789	6.197.399
c	Mentega	4.539.630	8.116.037	8.893.144	12.821.271	11.928.883	16.405.590	11.222.177	11.846.113	14.556.429	17.929.051
d	Keju	1.359.903	4.217.494	1.159.045	3.612.959	1.250.720	4.057.342	2.118.619	7.182.543	2.259.968	7.844.262
3	Telur	9.929	3.098	2.027	6.776	7.333	51.728	573.28	1.008.509	4.102	55.199
4	Madu	370.454	1.730.019	201.146	909.869	273.273	1.063.817	2.136.26	462.121	491.262	1.180.268
5	Lemak	106.419.284	81.361.566	111.748.740	80.005.259	112.182.741	71.339.772	12.645.982	91.532.625	119.964.224	116.196.868
6	Makanan-olahan	45.139	82.976	24.859	89.587	47.025	295.717	398.73	177.938	56.983	141.391
7	Sarang burung walet	1.286.719	280.284.270	1.291.948	290.559.012	1.258.972	364.036.485	1.317.469	540.593.719	1.510.046	517.445.919
8	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan	408	159.674	259	114.056	17.480	253.834	154.83	325.862	63.314	515.529
C	Produk Hewan Non Pangan / Non-food Animal Products	50.136.318	112.489.463	66.105.021	118.124.463	97.285.979	138.127.221	116.485.230	133.207.036	130.045.349	167.777.888
1	Bulu	1.957.090	3.204.133	2.327.196	4.717.713	2.809.695	7.024.478	150.6672	1.943.951	1.897.170	3.641.142
2	Tulang dan Tanduk	522.549	353.034	443.960	220.404	568.874	298.903	594.118	1.367.073	908.343	2.276.348
3	Kulit	2.966.085	76.750.012	3.822.853	74.065.828	4.425.408	74.339.365	378.3803	49.744.045	4.337.161	63.331.243
4	Wol	1.031	1.745	67.96	16.365	67	139	44	778	2.142	65.982
5	Pakan Hewan	44.680.589	32.120.871	59.492.693	38.918.302	89.421.962	55.881.889	11.057.2270	79.943.988	122.840.611	98.399.147
6	Ulat sutera	8.976	59.670	11.523	185.851	59.973	582.447	283.23	207.201	59.922	64.026
D	Obat Hewan/Veterinary Medicine	549.028	10.210.191	7.395.08	13.126.425	832.896	14.126.487	9.082.256	16.684.860	1.285.753	65.205.214
1	Vaksin untuk obat hewan	518.230	10.024.170	667.641	12.279.506	591.030	12.960.068	7.35.899	15.871.576	646.419	17.165.582
2	Reagen berasal dari mikroba, dari jenis yang cocok untuk diagnosis biologis veteriner	-	-	-	-	-	-	150	1.800	-	-
3	Lain-lain	30.798	186.021	71.868	846.919	241.866	1.166.419	172.207	811.484	639.333	48.039.632
E	Benih/Bibit	394.028	2.380.194	47.420	976.894	177.594	2.196.295	278.19	597.528	58.411	1.056.728
1	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dan unggas	376.186	2.283.883	46.068	769.392	166.706	1.763.207	205.90	351.002	47.877	870.800
2	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari bebek	-	-	-	-	1.738	1.889	81	105	135	40
3	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari selain unggas dan bebek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mani dan Produk hewan lainnya tidak d rinci	17.842	96.311	1.352	207.502	9.150	431.199	7.148	246.421	10.399	185.889
F	Jumlah Total	226.291.896	625.144.050	247.434.632	640.170.885	284.348.925	744.378.110	325.442.504	964.653.078	329.390.478	1.043.821.752



Lampiran 12. Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

PENILAIAN		BOBOT	TAHUN		
			2020	2021 PKH	2021 ITJEN
A.	PENGUNGKIT	36,30	32,30	34,61	32,66
I.	PEMENUHAN	14,60	12,98	14,50	13,70
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	2,00	2,00	2,00
	i. Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,40	0,40	0,40
	ii. Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,40	0,40	0,40
	iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,80	0,80	0,80
	iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0,40	0,40	0,40	0,40
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00	1,00	1,00	1,00
	- Harmonisasi	1,00	1,00	1,00	1,00
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00	1,32	1,90	1,30
	i. Evaluasi Kelembagaan	1,00	0,65	0,90	0,80
	ii. Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	0,67	1,00	0,50
4	PENATAAN TATALAKSANA	1,00	0,89	1,00	1,00
	i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,50	0,39	0,50	0,50
	ii. Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,50	0,50	0,50
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40	1,17	1,40	1,40
	i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,20	0,20	0,20	0,20
	ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20	0,13	0,20	0,20
	iii. Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,31	0,40	0,40
	iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20	0,15	0,20	0,20
	v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	0,18	0,20	0,20
	vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20	0,20	0,20
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,50	2,50	2,50
	i. Keterlibatan pimpinan	1,00	1,00	1,00	1,00
	ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50	1,50	1,50
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,20	2,02	2,20	2,20
	i. Gratifikasi	0,30	0,30	0,30	0,30
	ii. Penerapan SPIP	0,30	0,23	0,30	0,30
	iii. Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50	0,50	0,50
	iv. Whistle Blowing System	0,30	0,30	0,30	0,30
	v. Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,28	0,30	0,30
	vi. Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,42	0,50	0,50
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	2,08	2,50	2,30
	i. Standar Pelayanan	0,40	0,40	0,40	0,27
	ii. Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,38	0,40	0,33
	iii. Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,39	0,60	0,60
	iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70	0,58	0,70	0,70
	v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,33	0,40	0,40
II.	REFORM	21,70	19,32	20,11	18,96
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	3,00	3,00	3,00
	i. Komitmen dalam Perubahan	1,50	1,50	1,50	1,50
	ii. Komitmen Pimpinan	1,00	1,00	1,00	1,00
	iii. Membangun Budaya Kerja	0,50	0,50	0,50	0,50
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	1,50	1,50	1,50
	- Peran Kebijakan	2,00	1,50	1,50	1,50
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	1,50	1,50	1,50
	- Organisasi Berbasis Kinerja	1,50	1,50	1,50	1,50
4	PENATAAN TATALAKSANA	3,75	3,25	3,25	3,25
	i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0,50	0,50	0,50	0,50
	ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1,25	1,25	1,25	1,25
	iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00	1,50	1,50	1,50
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00	2,00	2,00	2,00
	i. Kinerja Individu	1,00	1,00	1,00	1,00
	ii. Assessment Pegawai	0,50	0,50	0,50	0,50
	iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50	0,50	0,50	0,50
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75	3,53	3,57	3,18
	i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00	0,78	0,82	0,43
	ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1,00	1,00	1,00	1,00
	iii. Pemberian Reward and Punishment	1,00	1,00	1,00	1,00
	iv. Kerangka Logis Kinerja	0,75	0,75	0,75	0,75
7	PENGUATAN PENGAWASAN	1,95	1,95	1,95	1,20
	i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75	0,75	0,00
	ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,60	0,60	0,60	0,60
	iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60	0,60	0,60
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	2,60	3,34	3,33
	i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50	1,76	2,50	2,50
	ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	0,84	0,84	0,83



Lampiran 13. NKA Satker Lingkup Ditjen PKH Tahun 2021 pada Aplikasi SMART Kemenkeu

No	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	82,26	99,31	64,30	100,00	4,37	60,91
2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	81,33	98,15	70,20	99,81	1,84	54,59
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	98,46	99,70	94,82	100,00	19,21	98,03
4	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	89,49	98,52	90,55	100,00	7,90	69,75
5	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	86,14	99,16	99,58	100,00	0,84	52,10
6	DINAS PETERNAKAN ACEH	80,52	99,82	67,19	100,00	1,14	52,84
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	86,16	89,66	67,00	100,00	10,44	76,10
8	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT	96,69	98,21	90,84	100,00	17,94	94,85
9	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	87,64	99,55	68,37	100,00	10,83	77,07
10	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	84,33	99,51	90,77	100,00	0,49	51,24
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	85,08	99,28	94,15	100,00	0,72	51,81
12	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG	78,43	99,75	58,83	100,00	0,34	50,85
13	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	88,25	95,04	38,06	100,00	20,00	100,00
14	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	95,40	65,91	92,92	100,00	20,00	100,00
15	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	89,50	92,92	96,84	100,00	7,08	67,71
16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALTIM	77,29	97,57	45,53	100,00	2,43	56,07
17	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	92,83	96,24	70,65	100,00	17,95	94,88
18	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	88,10	89,29	86,92	100,00	8,14	70,35
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	91,61	87,50	82,46	100,00	14,42	86,05
20	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	93,30	97,99	71,52	100,00	18,15	95,37
21	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	93,73	99,99	82,55	100,00	15,67	89,18
22	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI	86,68	92,26	88,57	100,00	5,34	63,34
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	85,90	99,63	99,89	100,00	0,37	50,91
24	PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA	92,34	99,49	97,62	100,00	9,96	74,89
25	BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III BANDAR LAMPUNG	94,82	99,47	96,97	100,00	13,59	83,98
26	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	83,68	99,72	87,94	100,00	0,28	50,70
27	BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HUAJUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN	84,09	99,49	92,28	99,60	0,03	50,07
28	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	83,92	97,89	72,19	100,00	4,87	62,19
29	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG	78,83	97,24	57,67	100,00	1,54	53,86
30	BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN	87,76	96,47	98,47	100,00	3,74	59,36
31	BALAI BESAR VETERINER DENPASAR	58,67	61,15	74,27	76,13	11,47	21,33
32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	90,28	94,86	49,36	100,00	20,00	100,00
33	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI	84,80	97,70	87,26	100,00	2,30	55,74
34	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HUAJUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG	74,97	96,63	73,76	100,00	7,87	30,34
35	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS	98,28	92,83	94,37	100,00	20,00	100,00
36	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HUAJUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA	90,09	93,12	98,57	100,00	7,45	68,61
37	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HUAJUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI	87,51	94,95	97,59	99,54	4,11	60,26
38	BALAI VETERINER MEDAN	85,96	91,29	74,76	100,00	7,97	69,92
39	BALAI VETERINER SUBANG	86,38	97,60	92,20	100,00	3,27	58,17
40	BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI	97,36	91,74	89,90	100,00	20,00	100,00
41	BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA	60,98	95,66	97,52	73,63	17,31	6,72
42	BALAI VETERINER BANJARBARU	82,26	99,42	79,09	100,00	0,59	51,49
43	DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	80,35	98,61	64,05	100,00	1,85	54,63
44	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	76,54	99,92	44,58	100,00	1,31	53,27
45	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU	86,54	99,13	74,92	100,00	7,68	69,20
46	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	89,02	99,79	76,30	100,00	10,71	76,77
47	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	93,62	98,53	65,74	100,00	20,00	100,00
48	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	91,65	98,80	87,53	100,00	11,65	79,13
49	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	95,50	94,37	78,29	100,00	20,00	100,00
50	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	83,19	97,36	77,23	100,00	2,64	56,60
51	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA BARAT	81,21	100,00	75,31	100,00	-	50,00
52	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	79,13	95,26	46,58	100,00	5,05	62,62
53	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	88,62	99,14	98,39	100,00	4,61	61,51
54	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	89,78	85,00	86,71	100,00	11,13	77,82
55	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	85,44	99,72	97,61	100,00	0,28	50,69
56	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	95,78	98,79	77,45	100,00	20,00	100,00
57	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN	80,54	92,25	98,45	97,56	4,28	39,29

